

13

Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Sulawesi Tenggara



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
 PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
 1983 / 1984

**Sejarah Perlawanan
Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
Di Daerah
Sulawesi Tenggara**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DA' DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983 / 1984

MILIK DEPARTEMEN P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN

TIM PENULIS

1. Husein A. Chalik, BA
2. Drs. A. Djohan Mekno
3. Drs. Abd. Galib
4. Dra. Nio Lasang

Penyunting :

Drs. R.Z. Leirissa MA.

Drs. Suwadi Sjafei

Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh
Iswar KS

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi berbagai perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: PERLAWANAN DI DAERAH BUTON	10
	A. PERLAWANAN RAKYAT BUTON TERHADAP KOMPENI BELANDA	12
	1. Perlawanan Sultan Himayatuddin Muh. Saidi Oputa Mosabuna I Wasuamba	12
	a. Latar Belakang Perlawanan	12
	b. Wujud Perlawanan	14
	c. Jalannya Perlawanan	16
	d. Akibat Perlawanan	19
	B. PERLAWANAN RAKYAT BUTON TERHADAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA	20
	1. Perlawanan La Ode Boha	20
	a. Latar Belakang Perlawanan	20
	b. Wujud Perlawanan	25
	c. Jalannya Perlawanan	25
	d. Akibat Perlawanan	28
	2. Perlawanan Sangia Nilemba (Sangia Do-wo) di Moronene	29
	a. Latar Belakang Perlawanan	30
	b. Wujud Perlawanan	31
	c. Jalannya Perlawanan	31
	d. Akibat Perlawanan	34

3. Perlawanan Maatalagi	35
a. Latar Belakang Perlawanan	35
b. Wujud Perlawanan	36
c. Jalannya Perlawanan	37
d. Akibat Perlawanan	38
BAB III : PERLAWANAN DI DAERAH KENDARI	39
A. PERLAWANAN KERAJAAN KONAWA	39
1. Latar Belakang Perlawanan	40
2. Wujud Perlawanan	42
3. Jalannya Perlawanan	42
4. Akibat Perlawanan	60
B. PERLAWANAN TERHADAP NICA	60
BAB IV : PERLAWANAN DI DAERAH MUNA	65
A. PERLAWANAN TERHADAP HINDIA BE- LANDA	65
1. Latar Belakang Perlawanan	65
2. Wujud Perlawanan	73
3. Jalannya Perlawanan	74
4. Akibat Perlawanan	77
B. PERLAWANAN TERHADAP SEKUTU/- NICA	78
1. Latar Belakang Perlawanan	78
2. Wujud Perlawanan	85
3. Jalannya Perlawanan	86
4. Akibat Perlawanan	88
BAB V : PERLAWANAN DI DAERAH KOLAKA	90
A. PERLAWANAN TERHADAP PEMERIN- TAH HINDIA BELANDA	90
1. Latar Belakang Perlawanan	90
2. Wujud Perlawanan	92
3. Jalannya Perlawanan	93
4. Akibat Perlawanan	96

B. PERLAWANAN TERHADAP NICA	97
1. Latar Belakang Perlawanan	97
2. Wujud Perlawanan	109
3. Jalannya Perlawanan	101
4. Akibat Perlawanan	134
 BAB VI : SELAYANG PANDANG KEADAAN DI ZAMAN JEPANG	 136
A. KEADAAN UMUM	136
1. Pemerintahan	136
2. Kehidupan masyarakat	138
3. Sosial Budaya	139
4. Hubungan keluar daerah	141
B. TINDAKAN-TINDAKAN PEMBANG- KANGAN DAN PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP JEPANG	 141
 BAB VII : PENUTUP	 143
CATATAN	146
DAFTAR SUMBER :	
A. KEPUSTAKAAN	149
B. INFORMAN	151
LAMPIRAN (Peta Sulawesi Tenggara)	156
DAFTAR RALAT	

BAB I PENDAHULUAN

Daerah Sulawesi Tenggara merupakan suatu propinsi yang biasa disebut Propinsi Sulawesi Tenggara atau lazim disingkat dengan Sultra dan terletak pada jazirah tenggara pulau Sulawesi. Sejak terbentuknya daerah ini menjadi propinsi Daerah Tingkat I pada tanggal 27 April 1964; ibukotanya ialah Kendari.

Daerah ini terletak di sekitar 3 - 7 derajat LS dan 121 - 124 derajat BT. Luasnya meliputi 38.140 Km² yang terpapar pada empat kabupaten dan dua kotamadya administratif. Keempat kabupaten itu adalah :

1. Kabupaten Kendari ibukotanya Unaaha;
2. Kabupaten Buton ibukotanya Bau-Bau;
3. Kabupaten Kolaka ibukotanya Kolaka; dan
4. Kabupaten Muna ibukotanya Raha,

sedangkan dua kotamadya itu adalah Kotamadya Kendari dan Kotamadya Bau-Bau. Penduduknya berjumlah 941.634 jiwa.

Daerah ini berbatas pada sebelah utara dengan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, pada sebelah timur dengan Selat Maluku dan Laut Banda, pada sebelah selatan dengan Laut Flores dan pada sebelah barat dengan Teluk Bone.

Daerah ini terdiri dari areal yang cukup luas dengan kedudukan yang tampan dan strategis, karena di samping mempunyai daratan yang cukup luas dengan beraneka ragam kekayaan yang ada di atasnya juga memiliki laut, selat dan teluk yang banyak jumlahnya lagi potensial keadaannya.

Dilihat dari segi letak daerah maka Sulawesi Tenggara merupakan jalur pelayaran Laut Jawa - Laut Flores - Selat Makassar terus ke Laut Banda dan ke bagian timur nusantara Indonesia. Dalam jalur pelayaran ini, kota pelabuhan yang paling sering dising-

gahi adalah Bau-Bau kemudian menyusul Kendari, Raha dan Kolaka. Di samping kota-kota pelabuhan tersebut terdapat pula beberapa pelabuhan khusus, yakni Pomalaa sebagai pelabuhan nikel, Banabungi sebagai pelabuhan aspal, Torobulu sebagai pelabuhan kapas dan Mandeodo sebagai pelabuhan rotan-damar.

Sulawesi Tenggara sebagai suatu propinsi dari sejumlah propinsi di Indonesia, dibentuk dari gabungan empat daerah Otonom Tingkat II yaitu :

- Daerah Otonom Tingkat II Kendari ibukotanya Kendari;
- Daerah Otonom Tingkat II Buton ibukotanya Bau-Bau;
- Daerah Otonom Tingkat II Kolaka ibukotanya Kolaka; dan
- Daerah Otonom Tingkat II Muna ibukotanya Raha.

Ke empat daerah otonom tersebut di atas terbentuk atas dasar Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, yang merupakan penjelmaan dari Daerah Swatantra Tingkat II Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 sebagai bagian dari daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1940 dengan Penetapan Gubernur Timur Besar yang pada waktu itu disebut Gouverneur van Groote Oost, tertanggal 24 Februari 1940, Nomor 21 (Bijblad 14377) wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Kerajaan Laiwoi dan Kesultanan Buton tersusun dalam satu Afdeeling yang disebut Afdeeling Buton dan Laiwoi dengan ibukotanya Bau-Bau. Kecuali Kolaka yang merupakan wilayah Hadat Mekongga pada saat itu masih tergabung ke dalam Afdeeling Luwu. Afdeeling Buton dan Laiwoi tersebut di atas, terdiri dari tiga onderdeeling yakni Buton, Muna dan Kendari. Afdeeling diperintah oleh Assiten Resident sedangkan onderafdeeling diperintah oleh Controleur (Kontrolur) Belanda.

Kerajaan Laiwoi dan Kesultanan Buton sebagai Zelfbesturende Lanschappen di dalam lingkungan Keresidenan Sulawesi Selatan Dan Daerah Takluknya pada tahun 1938 telah diatur secara langsung dalam Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda yang disebut Zelfbestuurs Regeling Tahun 1938 (Ordonantie 1938 No. 524).

Sebenarnya, jauh sebelum imperialis Belanda menduduki

langsung dan berkuasa di daerah Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa kerajaan misalnya Kesultanan Buton, Kerajaan Muna atau Wuna, Kerajaan Konawe, Kerajaan Mekongga dan beberapa kerajaan kecil, misalnya kerajaan Tiworo, Kulisusu, Moronene dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya dengan ikatan perkawinan sehingga tumbuhlah suatu keluarga besar Sulawesi Tenggara yang sulit diceraiberaikan. Terdapat seorang tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara yang mendapat pengakuan sebagai leluhur bersama dari beberapa masyarakat kerajaan di Sulawesi Tenggara. Di kerajaan Konawe dan Mekongga serta Moronene tokoh tersebut dikenal namanya "Haluoleo" di kerajaan Wuna dikenal namanya "Lakilaponto" sedangkan di Kesultanan Buton dikenal nama "Murhum" atau "La Tolaki". Namun demikian pada tiap kerajaan tumbuh hidup dan berkembang penduduk masing-masing yang merupakan suatu suku bangsa. Suku-suku bangsa itu mempunyai dan memakai bahasa tersendiri, sehingga menurut kenyataannya suku-suku bangsa dimaksud kini merupakan penduduk asli atau penduduk lama daerah Sulawesi Tenggara.

Yang termasuk penduduk asli terdiri dari :

- a. Suku bangsa Tolaki, yang mendiami sebagian besar daratan jazirah tenggara pulau Sulawesi;
- b. Suku bangsa Moronene, yang mendiami bagian barat daya jazirah tenggara pulau Sulawesi;
- c. Suku bangsa Wuna (Muna) yang mendiami pulau Muna;
- d. Suku-suku bangsa Buton, yang mendiami pulau Buton dan kepulauan Tukang Besi.

Di samping penduduk asli yang dituliskan di atas, sebagai akibat perkembangan kemajuan akhir-akhir ini terdapat pula penduduk baru yang datang dari luar daerah ini dan tersebar pada pemukiman-pemukiman seperti yang tersebut di bawah ini.

1. Suku Bugis, tersebar di daerah-daerah pantai sampai ke pelosok di mana terdapat usaha persawahan.
2. Suku Makassar dan Selayar, tersebar di tempat-tempat yang memungkinkan usaha niaga.
3. Suku Minahasa, Sangir, Ambon, Batak, Aceh, Melayu dan Minangkabau pada umumnya diam di kota-kota.

4. Suku bangsa Jawa, Sunda, Madura dan Bali, ada yang berdiam di kota-kota dan kebanyakan berdiam di desa-desa obyek pertanian atau di pemukiman Transmigrasi.

Bangsa asing misalnya Cina dan Arab, tinggal di kota-kota perdagangan; bangsa Jepang kebanyakan di obyek-obyek pertambangan; bangsa Amerika di obyek-obyek perusahaan pertanian negara misalnya perkebunan kapas, tebu/gula.

Silsilah raja-raja di Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa kerajaan-kerajaan Buton, Wuna, Konawe dan Mekongga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kerajaan Luwu dan Bone, bahkan diakui bahwa raja pertama dari kerajaan di Sulawesi Tenggara adalah dari keluarga Sawerigading. Dalam pertumbuhan masyarakat kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara banyak berhubungan dengan Ternate, sehingga tidak mengherankan kalau Ternate sebagai kerajaan yang lebih kuat mempunyai pengaruh tertentu atas wilayah Sulawesi Tenggara. Pengaruh Ternate itu terutama terhadap kerajaan Muna dan kesultanan Buton menjadi jalur mengalirnya agama Islam dari Ternate memasuki Buton dan sekitarnya, yang berlangsung sekitar pertengahan abad ke-16. Kebiasaan dan kegemaran bertanam rempah-rempah di Ternate, juga diikuti oleh masyarakat petani di Buton, sehingga beberapa saat kemudian Buton merupakan penghasil rempah-rempah dalam urutan ke dua sesudah Ternate (Maluku).

Wilayah kesultanan Buton yang merupakan pintu masuk ke sumber rempah-rempah terbesar di Maluku bagi pelayaran Belanda dari Batavia, sangat diperhitungkan pengaruhnya baik oleh V.O.C. maupun dari kerajaan Goa yang mengaku sebagai pemegang hegemoni pelayaran di bagian timur nusantara.

Usaha keras V.O.C. memaksakan monopoli perdagangan pada pertengahan abad ke-17 menimbulkan perlawanan rakyat terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Tenggara dan perlawanan-perlawanan terjadi pula pada saat imperialisme sebagai Pemerintah Hindia Belanda berusaha menaklukkan dan menduduki kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Perlawanan rakyat terjadi pula setelah diumumkan kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai konsekwensi dalam

rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara yang telah diproklamasikan itu.

Dalam perlawanan terhadap imperialisme itu terselip rasa sentimen keagamaan, namun sebagai penyebab utamanya ialah karena Belanda ingin menguasai kerajaan-kerajaan dan menempatkan raja-raja di bawah kekuasaan penjajah. Banyak peristiwa perlawanan tetapi motifnya adalah kebebasan dari ikatan asing dan dari belenggu penjajahan. Semangat yang telah mendorong rakyat mengadakan perlawanan, wujud dan jalannya perlawanan serta akibat dari perlawanan-perlawanan itu perlu diteliti dan dituliskan bagi pewarisannya kepada generasi pelanjut.

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme bertujuan untuk mengungkapkan tekad dan keberanian bangsa Indonesia menentang kekuasaan asing di Tanah air. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme telah terjadi di mana-mana di seluruh wilayah nusantara sejak dari awal masuknya kekuasaan penjajah. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu memang anti kepada penjajahan. Fenomena ini penting diketahui oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa guna meneruskan pemupukan semangat perjuangan bangsa, menuju arah pencapaian tujuan akhir dari kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hasil dari penulisan ini akan dapat dimanfaatkan untuk kelengkapan bahan penyusunan sejarah nasional yang sementara diusahakan penyempurnaannya. Sekiranya sejarah nasional yang lengkap dan sempurna telah tersusun dan menjadi bahan bacaan umum terutama di kalangan generasi muda, maka akan nampak bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki jiwa dan semangat kesatuan yang kokoh sejak dahulu, mempunyai persamaan tindakan mengusir penjajah karena sadar akan rasa harga diri sebagai bangsa yang berhak mengatur diri di tengah-tengah keluarga dunia. Akan nampak pula bahwa dengan jiwa kesatuan dan semangat persatuan serta persamaan tindakan menentang penjajah akhirnya tercapailah kemerdekaan bangsa dan negara Indo-

nesia yang perlu dibangun dalam berbagai segi pembangunan demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia.

B. MASALAH

Sejak awal abad ke-16, kekayaan yang terdapat di Kepulauan Nusantara merupakan besi berani yang menarik bangsa asing datang ke negeri ini. Perdagangan hasil bumi terutama rempah-rempah mendatangkan keuntungan besar di Eropa. Keadaan itu mengundang bangsa-bangsa Eropa berdatangan untuk membeli barang-barang dagangan, kemudian kembali ke Eropa membawa barang-barang dagangan yang dibelinya dengan harga murah lalu dijualnya dengan harga yang amat mahal. Karena secara mendadak memberikan keuntungan bagi negerinya, maka lama kelamaan bangsa-bangsa asing saling mengadakan perlombaan untuk menjalankan monopoli perdagangan. Dalam perlombaan dan persaingan dagang itu ternyata pihak Belanda tampil selaku pemenang dengan membentuk suatu persekutuan usaha dagang yang disebut *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC pada awal abad ke-17 atau tepatnya pada tahun 1602. Yang menjadi persoalan bagi Belanda ialah bagaimana cara yang ditempuhnya agar monopoli dagang berada dalam tangannya. Selanjutnya setelah mengadakan perdagangan bagaimana caranya untuk menguasai bangsa dan Tanah Air Indonesia, yang pada waktu itu terdiri atas kerajaan-kerajaan. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan merdeka di Nusantara termasuk kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara muncul persoalan ialah, apakah kekuasaan asing itu diterima begitu saja ataukah harus mengadakan perlawanan?

Dengan terjadinya perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai tempat, maka peristiwanya perlu diketahui dan dipahami agar arti gejala kesejarahan yang melatarbelakangi peristiwa itu dapat dihayati oleh bangsa Indonesia baik sekarang maupun yang akan datang terutama bagi generasi penerus perjuangan bangsa.

Pengungkapan peristiwa perlawanan di berbagai daerah di Indonesia memberikan gambaran bahwa di mana saja di Nusantara ini rakyat tidak rela menerima penjajahan. Perlawanan-perlawanan

yang telah terjadi merupakan benih tumbuhnya perjuangan membebaskan diri dari penguasaan bangsa lain dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah merupakan puncak perjuangan menghilangkan penjajahan di bumi Indonesia. Di sini nampak adanya mata rantai perjuangan sejak dari leluhur sampai pada generasi sekarang bahkan sampai pada generasi yang akan datang sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa.

C. RUANG LINGKUP

Perlawanan yang diungkapkan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas wilayah administrasi Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Penulisan sejarah perlawanan ini dimulai dari pertengahan abad ke-17 yaitu dengan peristiwa penebangan pohon-pohon cengkeh dan pala di Buton yang menjadi sumber mula timbulnya sakit hati rakyat terhadap Belanda, hingga berakhir dengan perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung sampai pertengahan tahun 1947.

Perlawanan kepada imperialisme dan kolonialisme Belanda yang dicatat di sini baik terhadap kekuasaan VOC maupun Pemerintah Hindia Belanda dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH DAN PROSEDUR PENELITIAN

1. Penulisan sejarah perlawanan ini ditulis sebagaimana penulisan sejarah pada umumnya yaitu dengan bersifat deskriptif dan menampilkan kejadian sebagaimana adanya. Kejadian atau peristiwa disusun menurut kronologi di dalam hubungan sebab-akibat. Data yang dikumpulkan diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber tertulis berupa dokumen-dokumen dan dari sumber lisan berupa keterangan-keterangan dari para informan.

Dengan demikian metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metoda kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap kejadian yang masih terjangkau oleh para informan, misalnya kejadian pada awal abad ke-20, sedangkan kejadian yang sudah lama berlaku dipelajari dari bahan tertulis dengan metoda kepustakaan.

2. Tim penyusun terdiri atas lima orang. Seorang di antaranya menjabat Ketua Tim dan merangkap sebagai anggota. Dari lima orang anggota tim, seorang adalah tenaga yang berasal dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan sedangkan yang empat orang lagi adalah tenaga dari daerah. Tiap anggota tim ditugaskan mengakan pengumpulan data sampai pada pengolahan dan penyusunan naskah sejarah perlawanan pada tiap kabupaten, sehingga tersusunlah pembagian tanggungjawab penelitian dan penyusunan konsep naskah sebagai berikut :

- Drs. Abd. Galib, meliputi daerah kabupaten Kendari;
- Drs. A. Djohan Mekuo, meliputi daerah kabupaten Buton;
- Dra. Nio Lasang, meliputi daerah kabupaten Muna;
- Husen A. Chalik BA, meliputi daerah kabupaten Kolaka; dan
- Drs. Mardanas Safwan, membantu di semua daerah kabupaten, disamping bertindak selaku penghubung ke Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional cq Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta.

Kerangka penulisan dan pengungkapan materi ditetapkan berdasarkan pedoman penulisan dilengkapi dengan hasil-hasil pertemuan Tim Pengarah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta. Perlawanan-perlawanan di Sulawesi Tenggara ditulis menurut lokasi daerah kejadiannya, di samping itu disusunlah secara kronologi perlawanan-perlawanan yang terjadi pada tiap lokasi daerah kejadian. Setiap perlawanan di suatu lokasi daerah kejadian. Setiap perlawanan di suatu lokasi daerah kejadian diungkapkan mulai dengan latar belakang perlawanan. Pada uraian berikutnya ditampilkan wujud atau bentuk perlawanan disusul dengan

jalannya perlawanan dan pada akhir penulisan dikemukakan akibat yang timbul dari perlawanan itu.

Walaupun perlawanan-perlawanan itu terjadi dalam waktu dan tempat yang berbeda namun jiwa dan semangat yang melatarbelakanginya pada dasarnya sama ialah kebebasan dari tindasan dan belenggu penjajahan kaum imperialisme dan kolonialisme.

BAB II PERLAWANAN DI DAERAH BUTON

Daerah Buton adalah bagian dari wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara. Dahulunya daerah ini merupakan suatu kerajaan yaitu Kerajaan Wolio yang dalam perkembangan sejarahnya dinamakan Kerajaan Buton.¹⁾

Pemerintahannya dipegang oleh seorang raja yang dibantu oleh beberapa orang menteri kerajaan yang disebut Bonto²⁾. Dahulunya Bonto ini merupakan Kepala-kepala Kampung yang menguasai wilayah tertentu. Setelah daerah Buton mendapatkan pengaruh kebudayaan Islam, gelar raja bergelar Sultan. Sultan Buton I di Kerajaan Buton ialah Murhum yang terkenal di Daerah Kendari dengan nama Halu Oleo.

Letak geografis daerah ini sangat strategis utamanya dalam dunia perdagangan. Pulau Buton terletak di antara pulau Jawa dan Maluku sehingga daerahnya merupakan jembatan perdagangan antara Makassar, Ternate, Ambon dan Maluku.

Faktor geografis ini mengundang kehadiran para pedagang baik dari dalam negeri Indonesia sendiri, maupun bangsa-bangsa asing yang masuk berdagang di Indonesia. Keadaan yang demikian itu mendorong terbentuknya pelabuhan dagang di pulau Buton.

Bangsa asing yang mula-mula menjangkau daerah Buton ialah bangsa Spanyol dan Portugis di sekitar awal abad ke-16. Namun tidak terdapat data autentik yang mengungkap peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis di Buton, sebab kedatangan kedua bangsa asing tersebut tidak bermaksud untuk berkuasa kecuali untuk berdagang. Untuk itu tidaklah mengherankan bila di Daerah Buton dan di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara terdapat meriam, bedil buatan Portugis.

Di samping itu jejak kedua bangsa ini berbekas pula dalam istilah jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan sedikit di bidang kesenian. Jabatan-jabatan Kapita, Tunani, Siriganti, Parabela

kemungkinannya berasal dari istilah bahasa Spanyol/Portugis. Demikian pula nama nyanyian Lakadandio yang dipergunakan mengiringi tari tradisional daerah Buton dan Tari Linda di Daerah Muna. Diperkirakan dari bahasa Spanyol yaitu dari perkataan Can Deo, sebab istilah tersebut bukan bahasa Wolio (Buton).

Di sekitar awal abad ke-17, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1613 bangsa Belanda pun menginjakkan kakinya di daratan Buton. Peristiwa ini ditandai dengan kunjungan Komodor Afolonius Schot di Kerajaan Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton IV Dayanu Ikhasanuddin (1597 – 1631).³⁾

Pada mulanya merekapun datang hanya untuk berdagang sehingga terjalinnya persahabatan antara Belanda dengan Sultan. Di satu pihak bangsa Belanda berjanji untuk bekerjasama serta melindungi Kerajaan Buton dari ancaman musuh-musuhnya. Mereka juga akan berusaha memperbaiki nama pedagang-pedagang asing yang sudah ternoda di saat Portugis dan Spanyol. Bahkan bersedia memerangi pedagang-pedagang asing yang masuk di Buton dengan dalih melindungi kekuasaan Sultan. Di pihak lain Sultan memberikan keluasaan kepada orang-orang Belanda untuk berdagang dalam daerahnya. Demikianlah halnya sehingga pada bulan Agustus 1613, Gubernur Jenderal Pieter Both dalam perjalanan ke Maluku singgah di Buton dan mengesahkan perjanjian tersebut.

Akan tetapi kenyataannya, bangsa Belanda tidak hanya bermaksud mengadakan perdagangan di daerah itu, tetapi lebih dari itu Belanda bermaksud untuk menguasainya. Perjanjian itu hanya merupakan titian dalam mencapai tujuan/idiologinya. Sultan dan segenap penduduk negeri menyadari maksud Belanda yang terselebung, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang merupakan perlawanan rakyat dalam membela negerinya dari usaha penguasaan Belanda.

Berdirinya benteng Kraton Buton dan beberapa kubu pertahanan rakyat di wilayah kekuasaan Sultan, merupakan jawaban rakyat terhadap maksud Belanda yang licik itu. Pertahanan rakyat yang dahulunya hanya terdiri dari tirai-tirai bambu berduri, sejak itu ditingkatkan menjadi benteng-benteng yang kukuh kuat untuk menghadapi serangan bangsa Belanda yang bersenjata api.

Di beberapa tempat terjadi perlawanan rakyat yang tidak ingin hidup di bawah kolonialis/imperialis Belanda. Pada tahun 1616, Belanda meninggalkan Buton sementara hati rakyat terluka oleh tindak laku Belanda yang menyimpang dari perjanjian. Sejak itu semangat perlawanan rakyat Buton mulai berkobar. Perasaan benci terhadap orang kulit putih tertanam di hati rakyat. Sejak itu pula perhatian Belanda mulai menyorot ke arah penguasaan wilayah Buton secara kekerasan. Gubernur Jenderal Van Diemen mencoba memaksakan Sultan Buton untuk berdamai, namun kobaran semangat perlawanan rakyat tak kunjung padam. Penduduk Buton tidak ingin lagi diperdaya kompeni Belanda.

A. PERLAWANAN RAKYAT BUTON TERHADAP KOMPENI BELANDA

1. PERLAWANAN SULTAN HIMAYATUDDIN MUHAMMAD SAIDI OPUTA MOSABUNA I WASUAMBA.

a. Latar Belakang Perlawanan.

Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah satu-satunya Sultan Buton yang dua kali menjabat sebagai Sultan terpilih. Ia menjabat Sultan Buton XX pada tahun 1751 – 1752. Setelah dua orang Sultan Buton yang lain berkuasa, maka atas keinginan rakyat ia terpilih kembali sebagai Sultan Buton XXIII dan memerintah pada 1760 – 1763.

Kenaikannya sebagai Sultan Buton XX adalah menggantikan mertuanya Sultan Darul Alam Oputa Sangia Manuru yang wafat pada tahun 1750. Sebelum menjabat Sultan, Himayatuddin telah memangku jabatan Kapitan Laut (Panglima Perang Kerajaan Buton). Sebagai seorang pejabat tinggi kerajaan dan menantu Sultan, ia telah banyak mengetahui keadaan/situasi politik kerajaan dari dekat, terutama dalam hubungannya dengan Kompeni Belanda. Himayatuddin telah menyadari betapa peranan dan campur tangan Kompeni Belanda dalam urusan pemerintahan kerajaan, sehingga Kerajaan Buton seperti kehilangan kedaulatannya. Ia menge-

tahui pula, bahwa Kompeni Belanda senantiasa berusaha menanamkan idiloginya secara lunak melalui perjanjian-perjanjian yang sifatnya mengikat. Pada hakekatnya pengakuan Kompeni Belanda terhadap kekuasaan Sultan hanyalah suatu taktik untuk menjadikan Sultan sebagai alat dalam usaha Kompeni Belanda menguasai Kerajaan Buton.

Keadaan yang demikian ini sangat berkesan di hati Himayatuddin sehingga setelah ia menaiki takhta kesultanan yang pertama pada tahun 1751, ia bersifat apriori terhadap semua perjanjian yang telah ada yang dibuat oleh Kompeni dan Sultan sebelumnya. Ia merasa tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian itu. Ketetapan hatinya bertambah teguh setelah seorang bekas pegawai Kompeni yang berkebangsaan Belanda bernama Frans Frous memberikan informasi bahwa campur tangan Kompeni terhadap urusan pemerintahan raja-raja di Indonesia merupakan hal yang tidak wajar dan perlu ditentang. Kedatangan Frans Frous ke Daerah Buton ini disertai keluarga dan pengikut-pengikutnya. Frans Frous diterima oleh Sultan sebagai sahabat yang mengerti akan gejala hati rakyat Buton. Menurut keterangan La Mane Maramli, Oputa I Koo (Himayatuddin) telah mengislamkan sahabatnya bersama keluarganya atas permintaannya sendiri. Frans Frous sebenarnya adalah seorang buronan kompeni karena sikapnya yang merongrong kebijaksanaan pemerintah Belanda. Hal ini diketahui oleh Sultan Himayatuddin. Secara diam-diam Sultan melindungi Frans Frous. Bahkan memberikan bantuan seperlunya.

Tercatat dalam sejarah Sulawesi Tenggara, peristiwa Frans Frous yang melarikan diri dari pihak Belanda, bertahan di pulau KabaEna dan mendirikan benteng pertahanan di sana.⁴⁾

Pada tahun 1752, sebuah kapal dagang Belanda "Rusten Werk" datang berlabuh di pelabuhan Bau-Bau. Frans Frous bersama pengikutnya datang ke Bau-Bau dan memaksa Nakoda untuk menyerahkan semua barang berharga di kapal termasuk uang yang ada. Pada peristiwa itu beberapa orang penduduk membantu Frans. Karena Nakoda kapal Rusten

Werk tidak mau memenuhi permintaan Frans, maka Nakoda dan beberapa awak kapal yang melawan dibunuhnya dan kemudian mengambil semua barang dan uang di kapal itu. Beberapa awak kapal yang tidak terbunuh ditawan. Ada juga beberapa orang yang lolos melarikandiri ke Ujung Pandang. Kapal Rusten Werk ditenggelamkan ke dasar laut pada bulan Juli 1752 dan terkenal dengan peristiwa Juli 1752)

Peristiwa tersebut dianggap Sultan Himayatuddin sebagai persoalan intern sesama bangsa Belanda, sekalipun tindakan Frans Frous ini didukung oleh Sultan. Bila dilihat dari isi perjanjian yang ada antara Buton dan Kompeni, maka seharusnya Sultan mencegah peristiwa berdarah itu. Sultan harus membantu Belanda dan mengutuk perbuatan Frans bersama pengikutnya. Akan tetapi ternyata Sultan berpura-pura tidak mengetahui. Kemarahannya Belanda meluap-luap. Koba Ena diserang Belanda. Frans Frous dan beberapa pengikutnya terbunuh. Sebaliknya beberapa pimpinan pasukan VOC terbunuh dalam perlawanan Frans Frous di Koba Ena pada September 1752. Sultan Himayatuddin dituduh bersekongkol dengan Frans.

b. Wujud Perlawanan

Sebelum peristiwa Frans Frous, terjadi suatu peristiwa di sekitar tahun 1626 yaitu sebuah kapal dagang Belanda (kapal Poleon) kandas di Wawonii yang pada saat itu masuk wilayah kekuasaan Su'tan Buton. Atas perintah Sultan Buton, kapal tersebut dirampok oleh anak negeri. Perlawanan kecil terjadi dan beberapa anak buah kapal mati terbunuh. Sejak itu kepercayaan Belanda terhadap Sultan mulai berkurang. Pemerintah Belanda berangsur merubah sikap lembutnya dalam persahabatan dengan Sultan. Akan tetapi dalam pertanggungjawaban Sultan, dikatakan bahwa peristiwa itu dilakukan oleh kelompok bajak laut yang datang dari Ternate dan kepulauan Banggai.

Terjadinya peristiwa bulan Juli dan bulan September 1752 di Koba Ena antara pasukan VOC dan Frans Frous, lebih meyakinkan Belanda bahwa Sultan Buton tidak lagi mematuhi janjinya.

Sultan Himayatuddin memastikan bahwa Belanda akan menuntut balas atas segala kerugiannya. Sasaran kemarahan Kompeni Belanda tentu ditujukan kepada Sultan. Pulau Buton pasti mereka serang.

Untuk menghadapi tantangan ini, Sultan Himayatuddin memerintahkan kepada seluruh aparat kerajaan untuk bersiap-siap menghadapi serangan Belanda. Benteng-benteng pertahanan yang ada di daerah termasuk benteng pertahanan di seluruh Kadie (Wilayah) harus diperkuat. Di sebelah Tenggara benteng Kraton Buton sekitar 6 km, di atas puncak bukit Wakausua didirikan sebuah benteng pertahanan baru sebagai basis pertahanan akhir nanti bila pertahanan di Kraton tidak memungkinkan lagi.

Kepada seluruh rakyat diperintahkan mempersiapkan senjata selengkapnya dan dibawa di mana mereka pergi. Bagi yang memiliki senjata api harus selalu menyiapkan mesiu dan peluru.

Di samping kesiap-siagaan rakyat, pihak Sara (Penasehat Kerajaan) akan mempergunakan suatu taktik dengan memperkecil kesalah pengertian pihak Kompeni dalam bentuk perundingan. Disadari bahwa kemampuan rakyat dalam menghadapi persenjataan Belanda yang modern kurang meyakinkan.

Untuk keselamatan Kerajaan, Sultan Himayatuddin yang telah dicurigai Kompeni Belanda diturunkan dari takhtanya dan digantikan oleh iparnya Hamim Sangia Iwlowa, putera Sultan Durul Alam Almarhum. Siasat penggantian Sultan ini disampaikan segera kepada Kompeni Belanda dan untuk diketahui, siasat ini hanyalah untuk mengelabui mata Kompeni. Sultan Hamim melanjutkan kebijaksanaan politik Himayatuddin. Ini terbukti bahwa Himayatuddin tetap memberikan petunjuk-petunjuk kepada Sultan penggantinya.

Meskipun demikian, pihak Belanda mengetahui dengan pasti keterlibatan Himayatuddin dan Sultan Hamim dalam peristiwa perlawanan Frans Frous di Koba Ena. Sultan

Hamim dipaksakan Belanda untuk membayar ganti rugi atas peristiwa Frans berupa emas dan perak serta sejumlah budak dalam waktu yang sangat singkat.

Tuntutan Belanda ini cukup berat bagi Kerajaan Buton, namun untuk keselamatan kerajaan dan seluruh masyarakat, Sultan Hamim terpaksa mengakuinya.

c. Jalannya Perlawanan

Realisasi penebusan utang Buton kepada Kompeni rupanya tidak sesuai dengan keinginan pihak Belanda. Budak-budak yang diserahkan Sultan sebagai tebusan diangsur lama dan terdiri dari orang-orang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hal ini dipandang oleh kompeni sebagai suatu penghinaan. Oleh sebab itu VOC memerintahkan pasukan Angkatan Lautnya menyiapkan penyerangan ke Kerajaan Buton.

Sebelum mengadakan ekspansi militer ke Buton, Kompeni Belanda telah menyusun taktik/strategi penyerangannya. Gubernur Jenderal VOC mengirimkan petugas rahasia ke Buton, dengan surat penyampaian kepada Sultan bahwa dalam rangka pelayaran mereka ke Maluku kapal Belanda akan singgah berlabuh di pelabuhan Buton untuk mengambil persiapan air dalam pelayaran mereka. Kepada Sultan dimohonkan keizinannya untuk maksud tersebut.

Pada tanggal 23 Februari 1755, tibalah dua buah kapal Belanda di pelabuhan Buton yang memuat marinir VOC yang akan menyerang Kerajaan Buton. Untuk meyakinkan rasa persahabatan Kompeni maka sebagaimana biasanya, Kompeni Belanda mengirimkan bingkisan hadiah untuk Sultan sebagai tanda persahabatan mereka. Seorang di antara pasukan VOC diutus naik Kraton menyampaikan bingkisan hadiah untuk Sultan, sambil mengamati keadaan di dalam dan di sekitar kraton. Dari hasil pengamatannya, diketahui bahwa rakyat Buton telah siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul. Jalan-jalan yang menghubungkan kota Bau-Bau dengan Kraton telah penuh dengan rintangan. Mereka tahu pula

bahwa penjagaan di Kraton hanya terdiri dari senjata tajam dan beberapa pucuk senjata api. Keadaan ini memaksakan para pasukan harus bekerja keras dan hati-hati. Penyerbuan Kraton direncanakan dengan memperhatikan situasi sekitarnya. Pada tanggal 24 Februari 1755 di malam pekat buta, pasukan Belanda mulai merayap menuju kaki benteng. Untuk langsung memanjat dinding benteng di waktu malam hari adalah sangat berbahaya, karena pasukan Belanda belum mengetahui medannya. Penyerangan ini dilakukan pada waktu subuh sekitar pukul 03.00 melalui posisi utara benteng dengan jalan membagi dua kekuatannya yaitu sebagian menyerbu dari Lawana Lanto dan sebagian dari Lawana Labunta. Pada pagi buta itu setelah pintu gerbang dibuka oleh petugas pengawal benteng, pasukan Belanda yang sudah disiap di muka pintu segera menyerbu masuk ke dalam benteng kraton Buton.

Petugas jaga yang hanya menggunakan senjata tajam dan masih belum sadar akan keadaan sekitarnya dengan mudah ditaklukkan ditaklukkan tanpa perlawanan yang berarti.

Pasukan Belanda merayap menuju istana Sultan. Ketika pasukan sudah berada di sekitar istana, penduduk kraton baru menyadari akan situasi bahwa suasana perang telah melanda kraton. Dari rumah seorang pejabat kerajaan terdengar tembakan ke arah musuh sebagai tanda perlawanan dimulai. Para pejabat kerajaan termasuk pejabat-pejabat tingginya segera berlarian menuju istana untuk mempertahankan istana dan keselamatan Sultan dari bahaya yang menimpa. Tembakan terjadi di muka istana, sedang di sekitarnya terjadi adu keris dan tombak dengan senjata.

Di dalam istana terjadi pertarungan berdarah. Sapati, Kapita Laut, para menteri besar dan Bonto mengamuk dengan keris. Tak ada lagi pertimbangan, keseimbangan persenjataan. Di hati rakyat hanya ada dua petikan hidup atau mati. Sultan Hamim sendiri telah mengambil bahagian di saat pasukan kompeni memasuki istananya. Beberapa orangpasukan Belanda gugur di dalam pertarungan itu.

Karena salah satu rencana Kompeni untuk menangkap hidup atau mati Himayatuddin, maka disana perlawanan tidak

seimbang. Banyak pasukan Belanda yang mati di ujung keris Himayatuddin dan pengawal-pengawalnya, sebagian pasukan Belanda menyerbu pendopo istana Sultan Makdzul Himayatuddin. Terjadilah perlawanan yang sengit antara pasukan Belanda dengan Himayatuddin dan pengawalnya yang perkasa. Kesempatan itu digunakan Sultan Hamim untuk segera mundur menyelamatkan keluarganya dari maut yang merenggut.

Menurut orang-orang tua, pada saat itu Himayatuddin telah mempertunjukkan keperkasaannya. Sekali ia mengayunkan kerisnya dua tiga orang pasukan Belanda jatuh tersungkur di atas tanah. Perhatian musuh tertuju ke istana Himayatuddin. Meskipun Sultan Hamim dan beberapa orang keluarganya dapat diselamatkan oleh pasukan, namun beberapa orang pembesar kerajaan seperti, Kapita Laut dan Menteri Besar Kerajaan Buton gugur bersama beberapa kesatria dalam mempertahankan kehormatan bangsanya.

Beberapa orang pengawal istana yang berusaha menyelamatkan keluarga istana yang telah terkurung musuh terpaksa menjadi korban peluru pasukan Belanda.

Sultan Hamim dan keluarganya diungsikan di sebuah benteng Wakaesua yang telah disiapkan rakyat sebagai tempat perlindungan. Setelah keluarga Himayatuddin dapat diungsikan keluar kraton, dan Himayatuddin berhasil menewaskan/memukul mundur musuh-musuhnya, iapun segera menyusul Sultan ke Wakaesua.

Pasukan pengawal kraton ditarik mundur untuk sementara dan berkonsolidasi di benteng Wakaesua. Tindakan ini dilakukan atas pertimbangan Sultan, mengingat telah banyaknya pejabat kerajaan yang gugur dalam pertempuran itu. Dua orang keluarga Himayatuddin ikut tertawan musuh, yaitu puterinya Waode Wakato dan cucunya bernama Waode Kamili yang sementara dalam buaian.

Pasukan Belanda tidak berani lagi melanjutkan pertempuran ke Wakaesua karena mereka tidak mengetahui situasi medan, apalagi di pihak merekalah banyak yang gugur.

Pemimpin pasukan Belanda memerintahkan untuk membawa jenazah pasukan-pasukan Belanda yang telah gugur ke kapal untuk kemudian dipulangkan ke Ujung Pandang.

Karena ekspansi militer Belanda ini tidak berhasil menaklukkan Kerajaan Buton, dan untuk membawa jenazah pasukan Belanda yang telah menjadi korban dalam pertempuran itu, maka pada tanggal 25 Februari 1755 armada Angkatan Laut Belanda bertolak meninggalkan Buton kembali ke Ujung Pandang.

Sejak itulah hubungan persahabatan antara Kompeni Belanda dengan Buton terputus. Meskipun Belanda tetap berusaha mengembalikan kepercayaan Sultan terhadap Kompeni, namun masyarakat Buton yang telah terluka hatinya tidak lagi bersedia untuk bersekutu dengan Belanda yang mereka anggap kafir jahanam itu.

d. Akibat Perlawanan

Secara politis, timbulnya perlawanan rakyat Buton terhadap Kompeni Belanda merupakan jawaban hati rakyat yang merasa terluka akan tindak laku Kompeni di Indonesia. Sedang segi psikologis, perlawanan Himayatuddin pada tahun 1755 itu telah berhasil menyalakan semangat patriotik di dalam dada seluruh rakyat Buton. Sampai sekarang Himayatuddin tetap ditempatkan sebagai pahlawan dan pelopor perjuangan kemerdekaan khususnya di Daerah Buton.

Semangat anti Kompeni Belanda tetap menggelora dalam dadanya dan menolak kerjasama dengan Belanda sampai pada akhir kekuasaannya pada tahun 1763. Oleh sebab itu maka setelah dua orang Sultan berkuasa, Himayatuddin diangkat kembali oleh rakyat untuk menstabilkan keadaan politik di Kerajaan Buton yang selama itu sangat memburuk.

Orang-orang tua di Daerah Buton mengatakan; setelah Sultan Hamim wafat pada tahun 1759, terjadilah persaingan politik di kalangan para pejabat dalam kerajaan Buton.⁶⁾

Para pejabat berambisi untuk menduduki takhta kesultanan. Kapita Laut Kentu Koda berusaha menggantikan ke-

dudukan Sultan Hamim almarhum dengan dukungan rakyat, namun akhirnya gagal oleh karena mendapatkan tantangan keras dari kaum bangsawan lainnya. Karena kegagalannya Kentu Koda meninggalkan Buton dan pergi ke Muna. Di sana ia berhasil menggalang rakyat dan diangkat menjadi raja dengan gelar Lakina Wuna Kolaki, yang dilantik menjadi Sultan Buton ialah La Mani Sangia Tobe-Tobe dengan nama Sultan Rafiuddin pada tahun 1759.

Kehidupan rakyat yang memburuk akibat perlawanan mereka terhadap Kompeni Belanda semakin bertambah setelah Kontu Koda menyatakan daerahnya terlepas dari kerajaan Buton. Ancaman Kompeni terhadap Kerajaan Buton menambah kecemasan penduduk negeri. Untuk memulihkan keadaan ini Sultan Makdzul Himayatuddin diangkat kembali menjadi Sultan Buton XXIII pada tahun 1760.

B. PERLAWANAN RAKYAT BUTON TERHADAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. PERLAWANAN LA ODE BOHA

a. Latar Belakang Perlawanan

Sejak permulaan abad ke-XVIII kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara mulai terancam oleh politik imperialisme Belanda para Raja-raja dan pahlawan-pahlawan daerah berusaha mempertahankan kedaulatan rakyatnya. Akhirnya kerajaan-kerajaan terlibat dalam peperangan melawan imperialisme. Raja yang kalah dalam perang terpaksa tunduk perintah Belanda. Pengaturan pemerintah diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kekuasaan raja-raja hanya merupakan pengemban kebijaksanaan politik imperialis Belanda di Indonesia. Raja-raja yang telah dicopot kekuasaannya hanyalah dijadikan sebagai tameng dalam menghadapi gelombang perlawanan rakyatnya sendiri. Kedudukan raja laksana boneka yang tiada mampu berdiri sendiri di atas wilayah kekuasaannya. Mereka terpaksa harus menerima dan mengakui kedaulatan Belanda atas wilayahnya, sebab sebagian dari kekuatan mereka tergantung pada Pemerintah

Hindia Belanda. Apalagi kalau kedudukan raja itu merupakan hadiah dari Pemerintah Belanda, maka secara politis raja itu harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuan yang telah mengangkatnya. Tidak kurang raja yang terpaksa mengorbankan rakyat dan daerahnya demi keselamatan hidup dan kekuasaannya.

Raja sama raja diadu dan di atas kehancuran mereka Belanda menegakkan kekuasaannya. Politik *Divide et impera* merupakan salah satu senjata yang ampuh dalam mengobrak-abrik kesatuan dan persatuan mereka. Usaha Belanda menjalin kerja sama dengan raja-raja di Indonesia, hanya merupakan suatu taktik dalam mempelajari kelemahan pada raja yang berkuasa, perjanjian persahabatan antara raja dan Pemerintah Belanda dibuat dengan tujuan mengambil peluang yang baik untuk maksud penguasaannya. Setiap keresahan dalam masyarakat pribumi dijadikan awal penanaman kekuasaan Belanda.

Di Kerajaan Buton, dengan mangkatnya Sultan Muh. Umar Maimuddin pada tahun 1904, suhu politik dalam kerajaan menunjukkan grafik yang tinggi. Keadaan itu merupakan kesempatan yang baik bagi Belanda untuk meniupkan politik *divide et impera*. Meskipun Sultan Muh. Umar telah mengikat janji dengan Pemerintah Belanda, namun pada masa kekuasaannya Belanda masih ragu mencetuskan ide politiknya, sebab Sultan Muh. Umar terkenal sebagai salah seorang raja perkasa yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Korte Verklaring yang telah ditandatangani bersama oleh Sultan Muh. Umar dengan Pemerintah Belanda pada tahun 1887 berisi pernyataan bahwa wilayah Kerajaan Buton adalah bagian dari wilayah kekuasaan Pemerintah Belanda. Muh. Umar sebagai Sultan Buton diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga kerajaannya serta menjalankan pemerintahan atas kuasa Pemerintah Belanda.

Dengan mangkatnya Sultan Muh. Umar pada tahun 1904, maka dilantiklah Muh. Asikin Adil Rahiym sebagai Sultan yang baru menggantikan almarhum Sultan Muh. Umar.

Situasi politik dalam negeri semakin memuncak, sebab para bangsawan Buton berambisi untuk menduduki takhta kesultanan. Api pertentangan senantiasa dikobarkan oleh Pemerintah Belanda melalui politiknya. Pencalonan Sultan Muh. Asikin Adil Rahim mendapat tantangan yang keras dari Achmad Maktubu yang dikenal dengan gelar Yarona Bola (bekas Raja Bola), yaitu sebuah desa di Kerajaan Buton yang dikepalai oleh seorang bangsawan Belanda mendukung Achmad Maktubu, karena Belanda tahu bahwa Asikin mempunyai jiwa keras dan mungkin menentang Belanda.

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-undang Dasar Kerajaan Buton (Murtabat Tujuh), pengangkatan Sultan harus dipilih dari ketiga golongan kaum bangsawan yaitu kaum Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha.

Muh. Asikin berasal dari golongan bangsawan Tapi-Tapi, sedang penantanginya Achmad Maktubu berasal dari golongan bangsawan Kumbewaha. Muh. Umar berasal dari golongan Tanailandu, sedang 3 orang Sultan sebelumnya berasal dari golongan bangsawan Tapi-Tapi. Kenaikan Muh. Asikin sebagai Sultan Buton adalah merupakan Sultan IV dari golongan Tapi-Tapi di antara 33 orang Sultan Buton yang telah berlaku. Jadi kenaikan Sultan Muh. Asikin ini telah memperuncing pertentangan antara golongan pendukungnya dengan golongan saingannya.

Setelah pelantikan Sultan Muh. Asikin pada awal tahun 1906, maka beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan April 1906, datanglah Residen Belanda Brugmans di Buton dengan pasukan-pasukannya untuk menguasai Kerajaan Buton.

Atas mufakat pembesar-pembesar kerajaan, Sultan Muh. Asikin menyatakan tidak bersedia menandatangani perjanjian lama antara Sultan dengan Belanda, yang oleh Muh. Asikin dianggap lebih yang demikian ini.

Karena sikap Sultan ini, maka Brugmans mengadakan tekanan politik dan tekanan militer sekaligus. Sementara perundingan itu berlangsung dalam istana Sultan (di Desa

Lamangga sekarang), pasukan marinir Belanda telah mengepung istana tersebut. Brugmans menegaskan bahwa apabila Sultan Muh. Asikin tidak bersedia menandatangani perjanjian baru itu, maka pihak Belanda akan mencalonkan Sultan baru yang akan bersedia membuat perjanjian baru dengan Belanda. Calon dimaksud ialah Achmad Maktubu yang sementara itu merupakan saingan berat bagi Muh. Asikin.

Akhirnya Korte Verkelaring ditandatangani juga oleh Sultan Muh. Asikin pada tanggal 8 April 1906 di atas kapal de Ruyter yang sementara itu berlabuh di pelabuhan Buton.

Orang-orang meriwayatkan bahwa sebelum penandatanganan perjanjian itu, Muh. Asikin berkata dengan penuh emosi;

"Kasaina mia maputi ane inda kuparabelakapea iaku tanasiy kasimpo mo asoroi pasi." (Celaknya orang putih, nanti setelah saya menjadi parabela (pemimpin) di negeri ini, barulah menabrak karang).

Dengan keluhan-keluhan Sultan ini, maka seorang menteri besarnya yaitu Mafaa berkata sebagai berikut :

"Soa tekeno randana aeta dampo mini abaru olinci".

(Biarlah tuanku Sultan membubuhkan tanda tanganmu, kelak nanti ekor akan membelit).

Ini berarti bahwa mereka hanya dengan terpaksa menandatangani perjanjian itu, namun kelak mereka akan mengingkarinya.

Setelah penandatanganan perjanjian itu, Belanda secara yuridis formilnya resmi menguasai wilayah Kerajaan Buton, Brugmans kembali ke Ujung Pandang dengan membawa hasil yang gemilang.

Akan tetapi beberapa hari kemudian, Muh. Asikin menyatakan bahwa Kerajaan Buton tidak terikat samasekali dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya secara terpaksa.

Sebagai akibat dari pernyataan ini, maka pada tanggal 26 April 1906, Brugmans datang kembali ke Buton dengan

kapal de Ruyter beserta pasukannya yang lebih besar jumlahnya.

Sekali lagi Brugmans memaksakan Sultan Muh. Asikin untuk mentaati isi perjanjian 8 April 1906. Kali ini Brugmans mengancam Sultan dengan menyatakan bahwa pihak Belanda telah siap menyerang.

Karena persiapan perlawanan Buton selama itu belum matang, maka Sultan Muh. Asikin terpaksa menerima kembali perjanjian 8 April 1906 itu dengan maksud meluangkan waktu persiapan mereka. Falsafah ekor akan membelit sudah merupakan suatu amanah yang sewaktu-waktu akan menjadi kenyataan.

Sebagian masyarakat Buton yang kurang mengerti akan maksud yang terkandung dalam hati Sultan ini menganggap bahwa Sultan Muh. Asikin telah mengkhianati kerajaan karena menyerahkan Buton ke tangan imperialisme Belanda. Akan tetapi pihak bangsawan Tapi-Tapi justru lebih memperkuat tekad perjuangannya untuk memelopori suatu gerakan menentang Belanda di Buton.

Mereka secara diam-diam menyusun kekuatan pasukan kerajaan serta memantapkan rencana perlawanan terhadap Belanda. Karena gerakan bawah tanah ini bertujuan untuk mengusir Belanda dari wilayah Kerajaan Buton, maka akhirnya golongan-golongan bangsawan lainpun turut memberikan dukungannya. Rakyat Buton bertekad hidup atau mati bersama Sultan.

Mereka semua menyadari bahwa masalah Buton bukanlah masalah Muh. Asikin pribadi, tetapi menyangkut keseluruhan masyarakat Buton yang senasib dan sepenanggungan. Maka terbentuklah suatu kesatuan dalam perjuangan membela tanah air mereka.

Pimpinan gerakan ini ialah La Ode Boha. Dengan mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh pejuang seperti; La Ode Amane, La Ode Penda, La Ode Hadi, Ma Zai, La Ode Mane Bulaega, La Ode Kode, La Ode Sijai, serta seluruh lapisan masyarakat Buton, maka semangat perjuangan mereka menjadi besar.

Menurut La Ode Rifai (Lakina Wangentu) yaitu putera dari La Ode Mane Bulege, sesungguhnya peristiwa itu mendapatkan restu dari Sultan Muh. Asikin. Hanya sayangnya saat meletusnya perlawanan itu, Sultan Muh. Asikin telah mangkat sebulan lebih dahulu, meninggalkan tekadnya yang membaja. Pada saat itu timbul kevakuman dalam pemerintahan.

Dalam bulan Juli 1911 Pemerintah Belanda di Bau-Bau mengeluarkan suatu keputusan pemungutan pajak bagi setiap kepala keluarga. Kesempatan ini dipergunakan oleh para pejuang untuk bangkit menentang Belanda.

b. Wujud Perlawanan

Dari hasil pengamatan rahasia yang dilakukan oleh petugas-petugas khusus pasukan penentang Belanda, diputuskan bahwa cara-cara diplomasi tidaklah membawakan hasil yang memungkinkan. Belanda untuk meninggalkan Buton. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh ialah menghadapinya dengan kekuatan senjata.

Menurut pertimbangan para pimpinan perjuangan, apapun yang akan terjadi kekuasaan Belanda harus dikikis habis dari permukaan tanah Buton. Perbedaan kekuatan senjata bukan masalah bagi seorang pejuang yang patriotik. Hidup di bawah kaki penjajah adalah merupakan penyelewengan terhadap falsafah perjuangan nenek moyang "Inda-Indamo Karo Somanalipu"⁷) yang berarti; Biarlah diri pribadi menjadi korban, asal untuk kepentingan negeri.

c. Jalannya Perlawanan

Dalam bulan Juli 1911, pemungutan pajak per kepala keluarga mulai berlaku di Buton sementara kehidupan rakyat dalam keadaan krisis. Pemungutan pajak dilakukan secara paksa dan kekerasan sehingga masyarakat menganggapnya sebagai suatu ancaman dalam kehidupan mereka.

Keadaan yang demikian itu mendorong pasukan La Ode Boha untuk cepat-cepat bergerak. Karena pemimpin gerakan

ini adalah La Ode Boha yang berasal dari Kampung Bungi, maka direncanakan gerakan pemberontakan itu dimulai di Waruruma (dekat Bungi), yaitu sekitar 6 km dari kota Bau-Bau.⁸)

Bertepatan pada hari pasar Kaesabu (pasar minggu) di mana hari itu telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai hari pemungutan pajak, maka hari itu juga direncanakan sebagai hari pergolakan rakyat. Sehari sebelum peristiwa itu terjadi, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1911, La Ode Boha bersama pemimpin-pemimpin lainnya telah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Waruruma untuk hadir bersama-sama di tempat pemungutan pajak. Ditegaskan pula, bahwa mereka harus mempersiapkan senjata karena perlawanan segera akan dimulai.

Keesokan harinya, minggu tanggal 10 Agustus 1911, masyarakat Waruruma telah berkumpul di pasar, sementara itu petugas pajak telah pula hadir. Namanya sudah tidak diketahui. Kedatangan petugas pajak ini tidak dikawal oleh tentara Belanda, karena pihak Belanda tidak mengetahui sama sekali adanya rencana pemberontakan rakyat di kampung itu.

Penaksiran pajak mulai dilaksanakan dengan penagihan sekaligus. Satu per satu penanggung pajak dipanggil oleh petugas, namun tidak seorang pun yang melaksanakan pembayaran. Para penanggung pajak yang tidak membayar pajaknya itu dikumpulkan di satu tempat. Di sana mereka dijemur dan dipersiapkan untuk dibawa ke Bau-Bau.

Setelah tiba giliran La Ode Boha untuk dimintai uang pajak, dengan suara yang latang ia mengatakan; Kami tidak mengenal pajak. Seluruh penduduk Waruruma tidak bersedia membayar pajak. Seketika itu juga terjadilah pertengkaran yang sengit antara petugas pajak dengan La Ode Boha. Pernyataan La Ode Boha mendapat sambutan hangat dari seluruh hadirin.

Dengan diam-diam petugas pajak mengirimkan kurir ke Bau-Bau untuk memberitakan peristiwa yang sedang

terjadi di Waruruma. Karena peristiwa tersebut sudah merupakan awal dari pemberontakan, maka para petugas pajak memohon bantuan militer untuk mengamankannya. Sementara itu para petugas pajak berusaha pula meloloskan diri dari serbuan rakyat yang telah meluap-luap kemarahannya.

Beberapa saat kemudian, muncullah sebuah motor laut Belanda yang memuat pasukan militer Belanda di bawah pimpinan Tuan Controleur sendiri. Dari jauh motor laut itu telah memuntahkan peluru-peluru ke arah darat di mana orang-orang pasar sedang berkumpul. Pasukan Belanda menduga bahwa orang-orang yang sedang berpasar itu adalah kelompok-kelompok pemberontak yang sedang bersiap-siap menantikan kedatangan mereka. Karena itu pasukan Belanda memberikan tembakan peringatan. Pasar menjadi bubar dan orang-orang berlari mencari perlindungan.

Melihat keadaan massa yang sudah tidak terkendali lagi, La Ode Boha segera berlari menuju pantai menyambut kedatangan pasukan Belanda dengan keris terhunus. Sasaran peluru ditujukan kepadanya, namun tidak sebutirpun yang dapat mengenai tubuhnya.

Dendam dan amarah La Ode Boha semakin memuncak, lalu ia terjun ke laut menuju motor yang ditumpangi pasukan Belanda. Melihat keberanian dan kesaktian yang dimiliki La Ode Boha ini, pasukan Belanda menjadi kagum dan tercengang semuanya. Mereka jadi panik karena La Ode Boha sudah hampir menjangkau motor. Konon menurut ceritera orang tua-tua, Controleur segera menembakan sebutir peluru emas ke arah La Ode Boha dan tepat mengenai dahinya. La Ode Boha terkapar di atas permukaan laut sementara pasukan-pasukan Belanda terjun ke darat.

Perlawanan diteruskan oleh kawan-kawan La Ode Boha, namun perlawanan itu tidak berarti sebab pasukan Belanda menembaki mereka dari jarak jauh. Beberapa orang penduduk jatuh korban mempertahankan kehormatannya. Pemimpin-pemimpin pemberontak seperti La Ode Pendaan,

La Ode Amane dan Maa Zai ditangkap oleh pasukan Belanda dan dikirim ke Bau-Bau sebagai tawanan perang.

Sebagian rakyat Waruruma melarikan diri ke pegunungan. Jenazah La Ode Boha diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. La Ode Amane dan kawan-kawannya yang tertangkap meringkuk dalam tahanan sambil menunggu vonis yang dijatuhkan kepada mereka.

d. Akibat Perlawanan

Peristiwa di Waruruma merupakan suatu jawaban rakyat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Belanda. Rakyat Buton berbangga atas pengorbanan pahlawan-pahlawan mereka yang justeru gugur mempertahankan falsafat hidup nenek moyang mereka. Di hati masyarakat Buton tertanam dendam kebencian terhadap Imperialisme Belanda.

Sebaliknya di pihak Belanda mereka bangga pula atas kemenangan pasukan-pasukannya. Mereka dapat meyakinkan masyarakat akan kekuasaan mereka yang didukung dengan kekuatan militer mereka.

Peristiwa Waruruma dan peristiwa-peristiwa sebelumnya dijadikan contoh penyelesaian persoalan dalam masyarakat jajahannya. Pemerintah Belanda lebih memperketat kewaspadannya. Peraturan-peraturan dilakukan dengan kekerasan. Rakyat ditindas agar tidak berdaya.

La Ode Amane, La Ode Pedanca dan Maa Zai dibuang ke pulau Jawa selama waktu yang tidak diketahui. Beberapa tahun kemudian La Ode Pedanca dibebaskan dari penjara dan kembali ke Bau-Bau, sedang La Ode Amane dan Maa Zai tidak terdengar beritanya lagi.

Sebagian rakyat di desa-desa tidak lagi kembali ke kampung halamannya, karena tidak sanggup membayar pajak yang terlampau berat. Kehidupan rakyat dilanda kemiskinan dan kemelaratan.

2. PERLAWANAN SANGIA NILEMBA (SANGIA DOWO) TERHADAP TENTARA BELANDA DI MORONENE (1910 – 1912)

Moronene adalah salah satu kecamatan di Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara, yang secara administratif berada dalam wilayah pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Buton.

Dahulunya, Moronene merupakan suatu kerajaan besar yang berdiri sendiri di bawah pemerintah seorang raja (Sangia).

Menurut yang dituturkan dalam Kada (sebuah epos kepahlawanan Moronene), pusat Kerajaan Moronene terletak di tengah-tengah daratan Moronene. Di sebelah selatannya di bagian pantai, dilindungi oleh dua buah pegunungan sehingga sukar dijangkau oleh musuh yang datang dari luar.

Di suatu saat yang menyedihkan yang entah apa sebabnya, yaitu di sekitar abad ke-XIV kerajaan besar ini terpecah menjadi tiga kerajaan kecil yaitu :

- a. Kerajaan Rumbia ibu kotanya Taubonto,
- b. Kerajaan Polea ibu kotanya Toburi,
- c. Kerajaan Kotua ibu kotanya Tangkeno.

Meskipun secara lahirnya Kerajaan Moronene telah terpecah ke dalam tiga kerajaan kecil, namun dalam politik luarnya tetap satu wadah yaitu Kerajaan Moronene yang berpusat di Keuwia atau dalam bahasa daerah Moronene disebut Tisa Rahi di Taubonto.⁷⁾

Kerajaan ini sejak dahulu telah menjadi intaian musuh terutama dari kawanan bajak laut dari Ternate yang terkenal dengan nama Tobelo, namun mereka itu tidak pernah berhasil menguasai kerajaan tersebut oleh karena mendapatkan tantangan yang kuat dari pasukan kerajaan Moronene. Salah satu bukti sejarah dari peristiwa itu ialah adanya Labuan Tobelo di wilayah tersebut.

Pada tahun 1875 lahirlah seorang putera yang kelak memimpin rakyat dalam perjuangan menentang Belanda. Dia adalah Sangia Dowo putera Raja Polea di Toburi, yang setelah

meninggalnya diberi gelar kehormatan Sangia Nilemba (Raja yang diusung.⁸)

Beliau mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Eke yang kemudian ikut memelopori perjuangan mengusir Belanda.⁹)

Beliau lahir di saat-saat memuncaknya pertikaian politik di Kerajaan Moronene. Masing-masing penguasa daerah sebagai pimpinan kerajaan-kerajaan kecil dalam tubuh Kerajaan Moronene saling bentrok. Orang-orang luar dapat mengetahui dengan jelas kelemahan politik Kerajaan Moronene di saat itu. Terlebih-lebih bagi pemerintah Belanda yang telah lama mengintai kerajaan itu, senantiasa menantikan waktu yang baik untuk menguasainya.

Pada tahun 1906 Sangia Dowo diangkat menjadi raja Polea di Toburi. Melihat situasi tanah air yang selama itu sedang terancam oleh Imperialisme Belanda, ia berusaha mempersatukan kembali kekuatan dalam wilayah Kerajaan Moronene. Dengan falsafah "Kita harus bersatu karena asal kita satu," Sangia Dowo dapat berhasil menjalin kesatuan dari ketiga kerajaan kecil yang saling cekcok itu.

Sementara itu Kerajaan Bone dan Kerajaan Buton sudah dalam kekuasaan Belanda. Kini tiba gilirannya Kerajaan Moronene, Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga, akan menjadi sasaran penguasaan Belanda.

a. Latar Belakang Perlawanan

Sebelum pemerintahan Sangia Dowo pada tahun 1906, telah diadakan suatu perjanjian rahasia dengan pihak Belanda yang ditandatangani bersama oleh Sangia Ngkinale di pihak Moronene dan Pendeta GC Storm atas nama Pemerintah Belanda. Perjanjian kerja sama tersebut sangat dirahasiakan oleh Sangia Ngkinale, karena jelas tidak akan didukung oleh penguasa-penguasa daerah lainnya. Akibatnya, Pemerintah Belanda menganggap Sangia (Raja) Moronene telah mengingkari isi perjanjian mereka. Bahkan menduga Sangia Dowo sebagai pelopor pemberontak di Kerajaan itu.

Sebelum Pemerintah Belanda mengirimkan ekspansi militernya ke Moronene, Pemerintah Belanda telah memberikan perhatian kepada Sangia Dowo, agar ia segera melaksanakan isi perjanjian yang sudah disetujui oleh raja Moronene sebelumnya.

Akan tetapi Sangia Dowo dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mengenal adanya perjanjian itu. Bahkan tidak bersedia samasekali menerima campur tangan Pemerintah Belanda atas pemerintahannya.

Untuk meyakinkan kehendak Pemerintah Belanda itu, dikirimlah ekspansi militer Belanda ke Moronene dengan tujuan membujuk atau memaksa Sangia Dowo untuk menerima kehadiran pemerintahan Imperialisme Belanda di daerahnya.

b. Wujud Perlawanan

Kehadiran pasukan Belanda di Moronene tidak disambut dengan baik oleh raja dan masyarakat setempat. Usaha Belanda membujuk Sangia Dowo untuk mengadakan hubungan kerja sama juga tidak mendapat sambutan dari raja dan penguasa-penguasa daerah lainnya.

Akhirnya taktik penguasaan Belanda melalui perundingan menemui jalan buntu. Maka kembalilah perutusan Belanda dengan penuh kekesalan.

Sangia Dowo yang sementara itu menjadi raja menyusun kekuatan pasukan kerajaan dan mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan tentara Belanda.

Pasukan kerajaan diperkuat oleh beberapa orang Tamalaki (Kepala pasukan yang terkenal) yaitu :

1. Mbohogo (Sangia Tepole lebo).
2. I Ule (Dalako I Wolio).
3. Inggani.

c. Jalannya Perlawanan

Sejak tahun 1910 telah terjadi perlawanan antara Kerajaan Moronene dengan Pemerintah Belanda. Akan tetapi

perlawanan selama itu berbentuk perang urat saraf/diplomatik. Kegagalan usaha melalui perundingan merubah bentuk perlawanan menjadi perang fisik (dengan kekerasan).

Pada bulan Maret 1911, datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten De Jonge. Mereka mendarat di labu-A dekat kampung Baru. Mereka langsung bergerak menuju Toburi ibu kota Kerajaan Polea. Sampai di Toburi pasukan Belanda segera mendarat. Akan tetapi sebelum mereka mengadakan penyerbuan, gerak pasukan Belanda telah diketahui. Seorang laki-laki tua telah berlari menuju Istana Raja dan mengabarkan keadaan yang dilihatnya kepada sang Raja.

Sangia Dowo sebagai raja dan sebagai Panglima Perang segera memerintahkan pemimpin-pemimpin pasukannya untuk mengadakan perlawanan. Maka terjadilah peperangan yang sengit antara pasukan Polea dengan pasukan Belanda.

Pasukan kerajaan menembaki pasukan-pasukan Belanda dengan meriam dan senapan yang mereka peroleh dari Portugis. Di samping itu tempik sorak pasukan Polea yang membelah angkasa telah membuat kepanikan pasukan-pasukan Belanda. Karena pasukan Belanda tidak mengetahui medan, maka atas perintah Kapten De Jonge, pasukan Belanda mengundurkan diri dan membuat kemah/kubu pertahanan di pinggir kali La Ea.

Di sanapun mereka selalu dihujani dengan peluru, sehingga Kapten De Jonge terpaksa merubah taktik perangnya. De Jonge secara diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan tembakan balasan mereka sekalipun mereka masih ditembaki musuh.

Tipu muslihat ini rupanya dapat menolong mereka untuk sementara waktu, sambil De Jonge menyusun siasat yang baru.

Sangia Dowo sebagai pimpinan pasukan Kerajaan Polea menganggap bahwa tentara Belanda sudah mundur meninggalkan kubu pertahanannya karena balasan tembakan sudah tidak terdengar lagi.

Dalam suasana yang demikian itu De Jonge, melanjutkan terus siasatnya yaitu mengutus seorang juru bahasanya datang menghadap raja untuk minta berdamai dan berunding. Untuk perundingan tersebut pihak Belanda meminta agar diselenggarakan di luar kota yaitu di Labu-A.

Permintaan De Jonge ini diterima baik oleh Sangia Dowo karena tempat yang ditawarkan itu masih termasuk wilayah Kerajaan Polea. Sangia Dowo dengan dikawal oleh 17 orang tamalaki (ksatria) pilihan, berangkat menuju Labu-A untuk berunding. Demikian pula Kapten De Jonge dengan dikawal oleh beberapa orang anak buahnya menuju ke tempat perundingan, sementara pasukan Belanda lainnya berangkat ke BoEpinang menunggu selesainya perundingan itu.

Selama 18 hari mereka berunding, Kapten De Jonge memperlihatkan keramahan dan kejujurannya. Sebagai seorang raja yang kesatria, Sangia Dowo mempercayai pri-laku De Jonge yang munafik itu.

Pada waktu perundingan sudah beberapa hari berlangsung, di suatu perjamuan makan bersama, De Jonge memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk membubuhi racun dalam makanan Sangia Dowo. Tanpa curiga sedikitpun, Sangia Dowo memakan hidangan yang telah disiapkan baginya. Seketika itu juga raja Polea itu kehilangan keseimbangan. Ia menyadari bahwa ia telah diracun oleh Belanda yang munafik itu. Sebelum raja menghembuskan napasnya yang penghabisan, beliau masih sempat mengucapkan sesuatu pernyataan sifat patriotiknya "Mati adalah soal biasa, tetapi munafik itu hukumnya dosa. Mati adalah pilihan seorang pahlawan yang mencintai tanah airnya." Meskipun aku telah mati karena tipu muslihatmu, namun jiwaku tetap hidup dan melawan bangsamu."

Perundingan bubar sebelum waktunya. Rakyat berkabung mendendam sukma. Para pemimpin pasukan lainnya bertekad bulat untuk meneruskan perjuangan pahlawan yang mereka kagumi itu. Jenazahnya diusung pulang ke istana peraduannya dan dimakamkan secara

adat kebesaran kerajaannya. kepadanya diberi gelar Sangia Nilemba yang berarti Raja yang diusung.

Perlawanannya diteruskan oleh Panglima perangnya yang bernama Mbohogo dan I Ule. Mereka melakukan perang gerilya di hutan-hutan. Tentara Belanda yang bermarkas di kota merasa sangat terancam. Tugas patroli ke kampung-kampung tidak dapat mereka laksanakan, sebab terkadang pasukan patroli Belanda diserbu dari belakang sehingga korban tak dapat dihindai.

Sayang sekali di suatu peristiwa di pinggir kota Toburi di akhir tahun 1912, di kala pasukan Polea yang dipimpin oleh Mbohogo menyerbu pasukan operasi Belanda, Mbohogo terjebak dalam perangkap musuh. Mbohogo ditawan pasukan Belanda kemudian dibuang ke Nusakambangan. Beliau mengakhiri sejarah hidupnya di atas tiang gantungan.

Selang beberapa hari lamanya, I Ule pun berhasil dijebak oleh tentara Belanda. Ia dikirim ke Bau-Bau sebagai tawanan perang. Di sana pun I Ule mengalami nasib yang sama. Ia mati di tiang gantungan. kepadanya diberi gelar Dalako I Wolio. Maka berakhirlah perlawanan Sangia Dowo dengan kemenangan di pihak Belanda.

d. Akibat Perlawanan

Akibat perlawanan rakyat Moronene di Toburi, beberapa pemimpin rakyat menjadi korban. Belanda berhasil menguasai pemerintahan di daerah itu dan mendirikan Pemerintah Hindia Belanda. Raja-raja yang diangkat adalah atas keputusan Pemerintah Belanda. Kedudukan raja atas wilayah kekuasaannya, hanya merupakan boneka yang setiap gerak lakunya diatur oleh Belanda.

Sejak itu kehidupan rakyat menjadi melarat. Bekerja keras untuk kepentingan Belanda.

3. PERLAWANAN MAATALAGI

a. Latar Belakang Perlawanan

Setelah Pemerintah Belanda berhasil menguasai Kerajaan Buton dan merasa kedudukannya telah kuat. Buton dibagi-bagi menjadi distrik-distrik. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Kepala Distrik.

Sebagai wilayah kerajaan, maka pengangkatan seorang Kepala Distrik haruslah berdasarkan darah keturunan penguasa Buton. Menurut tradisi Kerajaan Buton, untuk menduduki jabatan Kepala Distrik haruslah dari golongan Kaomu dan Walaka. Pembagian wilayah menjadi distrik-distrik dan pengangkatan personalianya mulai berlaku dalam tahun 1913.

Dalam struktur pemerintahan baru ini seorang Kepala Distrik membawahi beberapa orang Buton (Menteri) dan Lakina (Raja Kecil). Dengan demikian maka kedudukan Kepala Distrik mutlak berada di atas Menteri dan kedudukan Lakina lebih rendah dari Bonto Ogena (Menteri Besar), sedang pada zaman pemerintahan kerajaan Bonto Ogena ini merupakan Kepala Pemerintahan Umum di Kerajaan Buton.

Untuk mendapatkan bentuk dan struktur pemerintahan diberikan status adat dalam kerajaan sehingga Kepala Distrik bentukan Belanda ini identik dengan jabatan adat. Distrik bentukan Belanda ini identik dengan jabatan adat.

Seperti diketahui bahwa wilayah-wilayah Kerajaan Buton yang disebut Kadie dahulunya dikuasai oleh Kaomu dan Walaka tertentu berdasarkan garis keturunannya yang disebut Pulanga.

Pada awal tahun 1914, La Ode Sambira diangkat oleh Belanda menjadi Kepala Distrik Pasar Wajo (wilayah tambang aspal sekarang). Dari puluhan ribu rakyat Pasar Wajo, sekitar 50% disebut orang Laporo (kelompok Laporo) yang dalam status sosialnya termasuk golongan rakyat biasa yang terkenal dengan nama Papara.

Sebagai seorang Kepala Distrik angkatan Belanda yang harus melaksanakan kebijakan Pemerintah Belanda secara konsekwen, maka di dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pemungutan pajak dan kerja rodi ia harus keras dan bertangan besi, karena keberhasilan atau kegagalannya itu sangat menentukan hidupnya.

Cara dan tindakan yang demikian ini sangat bertentangan dengan agama dan adat kebiasaan dalam kerajaan, sehingga rakyat Laporo menganggap tindakan La Ode Sambira itu merupakan pemerasan yang terlampau kejam dan di luar batas-batas kemanusiaan. Mereka senantiasa membandingkan dengan keadaan pemerintahan La Ode Muh. Ali sebelum pemerintahan Belanda yang cukup bijaksana dan memperhatikan nasib rakyatnya.¹⁰⁾

Tindakan La Ode Sambira ini menimbulkan puncak kemarahan rakyat di saat ia memimpin pekerjaan rodi di Pasar Wajo atas perintah dan pengawasan Belanda pada tahun 1915.

Beban pajak yang terlampau tinggi bagi rakyat Laporo yang hanya hidup dengan hasil pertanian dari tanah mereka yang gersang, mendorong orang-orang Laporo untuk lebih baik memberontak dari pada menelan penderitaan.

b. Wujud Perlawanan

Satu-satunya pilihan yang paling baik bagi rakyat Laporo yang merasakan penderitaan tekanan keras atas kehidupan mereka ialah mengadakan pemberontakan. Hal itu sesuai dengan falsafah hidup mereka "Lebih mulia mati berdarah dari pada mati karena kelaparan."

Persepakatan rakyat untuk memberontak ini didukung oleh lawan-lawan politiknya La Ode Sambira, sehingga sasaran pelampiasan dendam penderitaan mereka itu pertamanya akan membunuh Kepala Distrik yang Belandaisme itu.

Tindakan keras harus pula dibalas dengan kekerasan, sehingga orang-orang Laporo yang berwatak keras itu senantiasa menyusun kekuatan serta memantapkan persiapan

mereka untuk menghadapi tindakan keras dari Pemerintah Belanda.

Dalam pertemuan terakhir yang dipimpin oleh Maatalagi di Kampung Gonda telah ditegaskan bahwa perlawanan rakyat tak akan mungkin berhasil dengan cara diplomasi, melainkan harus dengan kekuatan senjata.

Pasar Wajo harus diserang dan La Ode Sambira yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda harus dilenyapkan dari muka bumi.

c. Jalannya Perlawanan

Sesuai rencana semula, maka pada suatu malam dalam tahun 1915, beratus-ratus orang Laporo yang dipimpin oleh Maatalagi ibu kota Distrik Pasar Wajo. Pasukan langsung menuju rumah La Ode Sambira sambil berteriak-teriak memprotes tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

La Ode Sambira dipanggil turun berhadapan dengan rakyat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selama ini yang telah melukai hati rakyat yang diperintahkannya.

Teriakan dan ancaman massa pemberontak senantiasa menimbulkan kepanikan dalam rumah Kepala Distrik itu. La Ode Sambira menjadi takut, gugup dan tak tahu berbuat apa-apa. Untuk melarikan diri sudah tak mungkin lagi sebab rumahnya sudah terkepung rapat. Satu-satunya yang mengingatkan ialah bersembunyi di atas loteng rumahnya.

Karena semangat pemberontakan semakin meluap, maka massa pemberontak yang sudah tidak sabar lagi segera menyerbu masuk ke rumah Kepala Distrik itu. Mereka mencari ke segenap penjuru rumah, namun La Ode Sambira tidak diketemukan. Beberapa orang pemberontak segera naik ke loteng.

La Ode Sambira yang telah menyadari keadaannya yang terancam maut, segera bangkit dari persembunyiannya dan mengadakan perlawanan. Terjadilah perlawanan sengit

antara La Ode Sembira yang mempertahankan hidupnya dengan beberapa orang pemberontak yang menuntut balas dendam kepadanya.

Meskipun Kepala Distrik itu berusaha menyelamatkan nyawanya, namun karena kekuatan yang tidak berimbang maka akhirnya Kepala Distrik La Ode Sambira jatuh terkapar di atas lantai. Kepalanya dipisahkan dari lehernya dan ditancapkan di ujung tombak sambil diiring ke sekeliling kota. Semua harta kekayaannya diambil oleh pemberontak dan dibagikan kepada rakyat banyak.

Sesudah peristiwa itu, Maatalgi dan beberapa orang pelopor pemberontakan lainnya segera mundur dari pasar Wajo dan mengadakan pertahanan di Kotokulona.

Berita tentang peristiwa berdarah itu segera tersiar sampai ke kota Bau-Bau. Diketahui pula bahwa pemberontakan ini dipimpin oleh Maatalagi. Pemerintah Belanda segera mengirimkan pasukannya ke Pasar Wajo untuk menumpas habis kaum pemberontak di sana. Akan tetapi di perkampungan orang-orang Laporo hanya didapatkan wanita-wanita tua dan beberapa anak. Pencarian Maatalagi dan kawan-kawannya dilakukan terus. Akhirnya diketemukan di pinggir kampung Kotokulona. Terjadilah suatu perlawanan kecil yang tiada berarti dari pihak Maatalagi.

Maatalagi dan kawan-kawannya ditangkap dan disusul dengan penangkapan orang-orang Laporo yang telah terlibat langsung dalam pembunuhan Kepala Distrik Pasar Wajo.

d. Akibat Perlawanan

Akibat dari pemberontakan rakyat Laporo yang dipimpin oleh Maatalagi ini, kurang lebih 300 orang Laporo ditawan dan dipekerjakan di Bau-Bau.

Pemimpin-pemimpin pemberontakan itu seperti Maatalagi, Ma Andia, Ma Adulu diborgol oleh Pemerintah Belanda dan dikirim ke Ujung Pandang dengan pengawal ketat. Di sana mereka diadili dan kemudian diteruskan ke Nusakambangan.

BAB III

PERLAWANAN DI DAERAH KENDARI

A. PERLAWANAN KERAJAAN KONAWA.¹⁾

Konawe adalah nama suatu kerajaan, yang wilayahnya sekarang sebagian besar masuk kabupaten Dati II Kendari.

Jauh sebelum kolonialisme Belanda menyerang dan menduduki Kerajaan Konawe, Mokole (Raja) Konawe yang sedang berkuasa pada saat itu bernama Lakidende. Setelah beliau mangkat lalu digelar "Sangia Ngginoburu."²⁾ Mulai saat itu situasi dalam negeri dan Pemerintah Kerajaan Konawe mengalami keadaan yang paling lemah, akibat para anggota Dewan Kerajaan Konawe (Siwole mbatohuu pitu dula batu) yang terdiri dari bangsawan-bangsawan yang juga menjadi Kepala-kepala Pemerintah Daerah/wilayah otonom kerajaan Konawe tidak sependapat tentang siapa calon Mokole (Raja) Konawe atau pengganti almarhum Lakidende (Sangia Ngginoburu). Para anggota Dewan Kerajaan Konawe saling-silang pendapat, sehingga setiap usaha mengadakan sidang Dewan kerajaan Konawe selalu mengalami kegagalan akhirnya mereka kembali ke daerahnya masing-masing mengatur dan menguasai daerahnya sendiri. Walaupun situasi yang melanda kerajaan Konawe sangat tidak menguntungkan, namun para bangsawan sebagai penguasa daerah tetap bersatu dan saling menghargai, sedang ke luar nampak sebagai satu kerajaan yang tetap utuh yaitu kerajaan Konawe yang berpusat di Unaaha (Una). Situasi yang demikian, yaitu ketiadaan pimpinan Kerajaan sangat membahayakan dan mengundang ancaman dari luar. Salah satu anggota Dewan Kerajaan Konawe dari Ranome Eto yaitu Tebau tidak sabar membiarkan kerajaan Konawe tanpa raja telah berusaha ke Unaaha, yaitu di pusat Kerajaan Konawe, untuk melantik dirinya sebagai Mokole (Raja) Konawe. Akan tetapi usaha ini gagal karena para bangsawan yang berkuasa dan rakyat Konawe seluruhnya, tidak mengakui bila bangsawan Ranome Eto (Tebau menjadi Mokole (Raja) Konawe.

Peristiwa kegagalan RanomeEto ini merupakan batu ujian yang mengecewakan, namun tidak menimbulkan permusuhan ke dalam bahkan sesudah peristiwa ini hubungan RanomeEto dengan Pusat Kerajaan segera dipulihkan. Buktinya ialah ketika RanomeEto yang terletak di bahagian pantai diserang pasukan bajak laut Tobelo, segera RanomeEto meminta bantuan dari Pusat Kerajaan Konawe, maka diberangkatkanlah Pakandeate dengan laskar-laskarnya menyerang ekspedisi Tobelo sampai terdesak keluar dari perairan Konawe.

1. Latar belakang perlawanan

Setelah Tebau mangkat, secara diam-diam dan sangat dirahasiakan, pada tahun 1858 puteranya yang bernama La Mangu mengadakan perjanjian dengan pihak Belanda. Ia ingin mendirikan satu Kerajaan yang lepas dari Kerajaan Konawe dengan nama "Kerajaan Laiwoi". Perjanjian ditandatangani oleh La Mangu dan dari pihak Belanda ditandatangani A.A. Vries, atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda.³⁾

Lahirnya Kerajaan Laiwoi (kerajaan baru) yang meliputi daerah RanomeEto ini dirahasiakan kepada para bangsawan dan rakyat Konawe dan berdirinya kerajaan Laiwoi yang dirajai oleh Lamangu pada waktu itu baru merupakan kerajaan di atas kertas karena sesungguhnya kerajaan Laiwoi tidak akan dapat berdiri tanpa bantuan kekuatan tentara Kolonial Belanda, sedang Belanda pada waktu itu tidak mampu memberikan bantuan pasukan untuk mewujudkan kerajaan ini.

Laiwoi yang baru lahir di atas kertas, belum dapat berbuat apa-apa berhubung seluruh kekuatan Belanda dikerahkan pada seluruh wilayah Nusantara. Perjanjian La Mangu dengan pihak Belanda tahun 1858 yang bertujuan untuk mendirikan kerajaan Laiwoi ini telah berlangsung secara rahasia di atas kapal di luar perairan Konawe. La Mangu sebagai raja yang disahkan oleh kolonialisme Belanda untuk kerajaan Laiwoi yang belum mempunyai wilayah kekuasaan, meyakinkan pihak Belanda bahwa untuk dapat mewujudkan kerajaan Laiwoi yang jaya bersama Belanda, haruslah terlebih dahulu menghancurkan kerajaan Konawe dengan kekuatan senjata.

Para bangsawan Konawe beserta seluruh rakyatnya segera bersatu. Setiap usaha yang datanginya dari luar harus diperhitungkan secara matang. Sejarah membuktikan keadaan, bahwa setiap serangan musuh dari luar selalu dihancurkan apalagi kalau ada usaha memecah belah keutuhan kerajaan Konawe. Namun, pihak Belanda telah memberikan jaminan akan membantu penuh kepada La Mangu, asalkan bersabar dan merahasiakan hasil perjanjian tahun 1858 kepada para penguasa kerajaan dan rakyat Konawe. Pihak Belanda tidak mungkin segera mewujudkan kerajaan Laiwoi sebelum kerajaan-kerajaan Gowa, Bone, Luwu dan Buton ditaklukan. Belanda tentu tidak mampu menaklukan sekaligus kerajaan-kerajaan tersebut karena nyata-nyata telah bersatu menentang Belanda. Dengan demikian La Mangu kembali ke RanomeEto berdiam diri sambil merahasiakan apa yang telah dibuatnya dengan pihak Belanda. La Mangu sangat khawatir apabila tindakannya dapat diketahui oleh rakyat dan para bangsawan di Konawe, berhubung rakyat Konawe sesungguhnya sangat menentang kehadiran Bangsa kulit putih (orang-orang barat) yang silih berganti menjajah Nusantara. Sebelum Belanda, tiada satupun bangsa-bangsa barat yang berhasil masuk menancapkan kekuasaannya di kerajaan Konawe, misalnya Portugis yang hanya berhasil mengadakan hubungan dagang dengan cara barter, barang hasil bumi ditukar dengan senjata perang seperti meriam, senapan dan lain-lain.

Sementara itu keadaan dalam negeri Konawe nampak tetap stabil. Para penguasa dan rakyat tidak mengetahui, bahwa La Mangu secara rahasia telah sepakat dengan Belanda mendirikan Kerajaan baru yaitu Kerajaan Laiwoi. Idea La Mangu inilah yang selalu disambut dengan hangat oleh pihak Kolonial Belanda dengan politik adudomba, pecah belah kalau sudah berhasil dipecahkan kemudian dikuasai. La Mangu dengan penuh rahasia membisu seribu bahasa, seolah-olah tiada pernah terjadi apa-apa di wilayah kedaulatan dan kekuasaan kerajaan Konawe, malah tetap berpura-pura dengan penuh toleransi berhubungan baik dengan para bangsawan/penguasa seluruh wilayah Kerajaan Konawe. Ia tidak berani membuka rahasia, tentang Kerajaan Laiwoi dan selalu berusaha tidak akan menimbulkan kecurigaan atas dirinya.

2. Wujud Perlawanan

Sesungguhnya perlawanan Konawe terhadap Imperialisme dan kolonialisme Belanda disebabkan antara lain karena mempertahankan kehidupan yang bebas dan merdeka yang dimiliki sejak beberapa abad lampau. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa pada waktu berhubungan dengan bangsa Portugis, mereka bebas saling tukar menukar barang dengan senjata. Kemarahan dan ketidaksenangan rakyat terhadap bangsa barat ini menjadi memuncak karena terasa bahwa Belanda semakin menginjak-injak kerajaan Konawe dan Belanda telah memecah belah persatuannya untuk kemudian menguasainya. Hal ini terbukti setelah Belanda berhasil mendirikan Negara Boneka "Laiwoi" yang tidak didukung oleh masyarakat dan para bangsawan Konawe. Ketidaksenangan rakyat Konawe ini diwujudkan dalam suatu perlawanan secara menyeluruh terhadap Belanda.

3. Jalannya Perlawanan

Seusai perang Gowa pada tahun 1905, tibalah giliran Kerajaan Bone diserang kolonial Belanda, yang terkenal disebut Perang Bone di bawah pimpinan Petta Ponggawae. Rakyat Bone telah bertempur dengan gagah berani melawan bala tentara Belanda yang mendarat di salah satu bandar Kerajaan Bone yaitu Bajoe. Belanda mengarahkan seluruh kekuatannya dan akhirnya menguasai seluruh wilayah Bone. Setelah usai perang Bone, pihak Belanda mulai mengalihkan matanya ke jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang sangat potensial dengan kekayaan alamnya. Pihak Belanda kembali memeriksa dokumen rahasia berupa perjanjian rahasia dari daerah-daerah di Nusantara. Didapatinya adanya perjanjian tahun 1858, tentang terbentuknya kerajaan Laiwoi dengan persetujuan pihak Belanda, bahwa La Mangu diangkat pihak Belanda menjadi Raja Van Laiwoi. Perjanjian ini merupakan siasat jahat dan busuk Belanda dalam usaha mengadu domba dan memecah belah kemudian menguasai daerah ini (politik divide et impera). Perjanjian ini terjadi di atas kapal Belanda di luar perairan Konawe. Apakah usaha La Mangu selama ± 48 tahun lewat ini?

Kerajaan Konawe sejak jamannya Wekoila telah berdiri megah dan jaya serta menikmati kemerdekaan sampai masuknya Belanda di daerah ini, tetapi Kerajaan Laiwoi memang tidak berakar dalam masyarakat, dan tidak dihayati oleh rakyat Konawe. Untuk mendapatkan data-data positif pihak Belanda mengirim intelijen, guna menghubungi dan mengetahui usaha La Mangu dan persetujuan tahun 1858, yaitu pembentukan kerajaan Laiwoi dan dengan rajanya "La Mangu". Pihak Belanda merasa kesal dan kecewa karena selama itu La Mangu tidak bisa berbuat apa-apa. Perjanjian tinggal perjanjian. Kerajaan Laiwoi ternyata baru merupakan kerajaan di atas kertas saja. Seluruh rakyat Konawe yang terdiri dari daerah Una, Loma, Abuki, Asaki, RanomeEto, Sambara, Pondidaha dan Uepay tidak mengenal dan tidak dahu menahu tentang Kerajaan Laiwoi. Hal itu merupakan suatu problem yang sulit yang akan dihadapi Belanda. Kekuatan Konawe dengan alat-alat persenjataan yang diperoleh dari Portugis sebagai hasil perdagangan sebelum Belanda datang cukup banyak. Oleh karena itu pihak Belanda merubah siasatnya. Kalau pihak Belanda menaklukkan Bone, dengan jalan mengerahkan kekuatan bala tentaranya secara frontal, maka terhadap Konawe Belanda tidak dapat berbuat seperti di Bone.

Belanda mengetahui pasti bahwa bila dengan kekuatan senjata, Konawe akan mengangkat senjata dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Juga Belanda mengetahui pasti bahwa dari kalangan ningrat/bangsawan sampai kepada rakyat biasa sangat benci kehadiran bangsa-bangsa kulit putih (asing/barat) di negerinya. Terpaksa pihak Belanda alih siasat, yaitu dari kekuatan senjata beralih ke siasat merayu. Diplomasi, bujuk rayu, pecah belah, adu domba ini adalah senjata yang lebih ampuh.

Pemerintah Belanda dengan hati-hati melaksanakan rencananya untuk mewujudkan berdirinya kerajaan Laiwoi. Beberapa bangsawan di RanomeEto dan Sambara didekati dan dibujuk untuk mendukung rencana Belanda. Demikian pula Sao-Sao dan Haji Taata telah memihak kepada Belanda. Utusan Belanda pada Sao-Sao dan Haji Taata mengadakan perundingan-perundingan rahasia untuk menyusun siasat yang sangat berhati-hati, lalu kemudian lahirlah perundingan Malowe tahun 1909. Sebelum

perundingan Molawe tahun 1909, telah terjadi siasat busuk Belanda mengadu domba para bangsawan untuk tujuan menguasai dan menjajah rakyat Konawe. Untunglah rakyat kerajaan Konawe sudah mengetahui maksud Belanda yang sebenarnya yaitu akan menjajah Konawe. Rakyat dari seluruh kawasan Konawe lalu menjadi waspada dan mengkonsolidasi diri sambil siap siaga menanti komando. Dalam keadaan itu pada akhirnya diketahui, bahwa Belanda dengan disepakati oleh Sao-Sao telah mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Laiwoi. Timbullah ketegangan-ketegangan antara pihak Konawe dengan pihak Belanda. Di mana-mana rakyat siap menyerang Belanda, bilamana mereka berani menginjakkan kakinya di wilayah pusat kerajaan Konawe.

Seorang bangsawan Konawe yang bernama Watukila (Ponggawa Una) yang amat besar pengaruhnya serta disegani dengan tegas menolak kehadiran Belanda dan menyatakan siap berperang melawan Belanda. Pernyataan Watukila ini mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh kawasan Konawe dan daerah-daerah langsung mengirim utusan kepada Ponggawa Una "Watukila" untuk menyampaikan dukungan serta siap sedia mempertahankan tanah tumpah darah mereka sampai tetesan darah yang terakhir.

Pihak Belanda tidak diam. Belanda mengetahui bahwa rakyat di seluruh Konawe sudah bersatu di bawah pimpinan Ponggawa Una "Watukila". Belanda juga mengetahui pertahanan Watukila yang keadaannya amat tangguh dan tidak mudah dipatahkan. Haji Taata berusaha keras agar terjadi perundingan antara pihak Kerajaan Konawe dan pihak Belanda, demi untuk menghindari pertempuran besar-besaran antara ke dua belah pihak.

Demikianlah dengan usaha Haji Taata terjadilah perundingan Molawe pada tahun 1909, bertempat di bandar Molawe. Utusan Konawe terdiri dari Watukila sebagai pimpinan dan para bangsawan dari Abuki, Asaki, Latoma, Pondidaha, Kasipute, Uepay beserta laskar pengawal pihak Belanda disertai pasukan pengawal satu kompi yang ditempatkan di atas kapal perang Belanda dan didampingi oleh Sao-Sao dan Haji Taata. Isinya perjanjian Molawe itu adalah sangat dirahasiakan oleh pihak Belanda. Watukila pun tidak mengetahui benar apa yang tercantum dalam Tractaat Van Molawe itu. Tetapi yang jelas bahwa pendirian Watu-

kila tetap tidak menerima kedatangan Belanda dan menolak kerja sama dengan Belanda. Sekembali dari Molawe, Watukila dengan cepat meningkatkan pertahanannya. Dipanggilnya Lamboasa dan Langgolo untuk memimpin laskar tempur Konawe. Markas besar ditetapkan di Sanuangambo, tempat kediaman Watukila. Kubu pertahanan yang kuat ditempatkan di Puundombi. Gudang senjata/peralatan perang ditempatkan di Puwilalo.

Atas petunjuk Haji Taata, maka dua orang yang bernama Pombili dan La Rambe harus diasingkan secara halus, karena ke dua tokoh ini tersohor ilmu perangnya. Untuk mengasingkan Pombili dan La Rambe bukan pekerjaan mudah, karena diberitakan bahwa satu batalyon pasukan Belanda dalam sekerjap saja bisa dihancurkannya.

Akhirnya Pombili tertipu oleh usaha Haji Taata dan Sao-Sao. Pada suatu hari di pagi-pagi buta sudah berlabuh sebuah kapal Belanda yang di atasnya terdapat utusan Belanda, Sao-Sao dan Haji Taata. Kemudian Sao-Sao dan Haji Taata mengirim utusan langsung ke rumah Pombili di Molawe dengan permintaan supaya Pombili berkenan ke kapal, karena Sao-Sao dan Haji Taata sedang menunggu di atas kapal dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Tanpa curiga Pombili berkenan datang ke kapal. Di atas kapal beliau langsung disambut dengan kemurahan hati oleh utusan Belanda, Sao-Sao dan Haji Taata. Pada pertemuan di atas kapal. Pombili dibujuk agar mau berangkat ke Makassar dan sekembalinya dari Makassar nanti akan diberi jabatan Kapitan Sanggona.

Dibawalah Pombili saat itu juga ke Makassar dengan kapal laut. Sebenarnya kejadian itu adalah tindakan pengasingan secara halus dari pihak Belanda. Sesudah Pombili diasingkan secara halus, Haji Taata langsung menemui lagi La Rombe, seraya membujuk agar menjauhkan diri dari daratan Konawe untuk menghindari timbulnya peperangan besar dengan Belanda. Dengan tertipunya Pombili dan La Rambe, Watukila merasakan telah kehilangan besar karena keduanya amat menentukan sifat ketangguhan dan kemampuan pertahanan Konawe. Namun demikian Watukila tidak putus asa. Langgolo dan Lamboasa diangkatnya menjadi pemimpin laskar tempur Konawe, sedang

Wulumohitu yang diangkatnya menjadi Kapitan, diperintahkan membuat benteng pertahanan di Amboki dan Samuale bertugas mengamati-musuh di Wawotobi.

Sekali lagi atas permintaan Haji Taata dan Sao-Sao, pihak Belanda mengirim perutusan langsung ke markas pertahanan Watukila di Sanuanggambo untuk meminta kesediaan Watukila berunding dengan pihak Belanda dan menyelesaikan sengketa secara damai. Berangkatlah perutusan Belanda yaitu Ibrahim adik kandung Haji Taata dengan pengawal pasukan Belanda. Sebelum perutusan ke Sanuanggambo, telah mendahului penghubung dari pihak Belanda, yang memberitakan bahwa perjalanan Ibrahim dengan pasukan pengawal adalah bertujuan baik yaitu untuk menemui Ponggawa Una "Watukila". Perutusan tiba di Sanuanggambo, dengan aman dan bermalam di sana. Keesokan harinya perutusan ini kembali dengan selamat tetapi tanpa menghasilkan apa-apa. Pendirian Wakila tidak berubah dan tetap menolak ajakan Belanda untuk berdamai. Suatu kepastian bahwa peperangan tak dapat dihindarkan, ditambah pula bahwa pihak Belanda sudah tidak sabar lagi. Segala usaha pihak Belanda dengan dibantu penuh oleh Sao-Sao dan Haji Taata untuk menempuh jalan diplomasi yang penuh tipu daya, untuk melunakkan Watukila ternyata sia-sia belaka. Senjata harus berbicara, demikian pendirian akhir pihak Belanda.

Segala usaha pihak Belanda melunakkan Watukila ternyata gagal, akhirnya pihak Belanda mulai merencanakan akan mengerahkan pasukannya menyerang secara frontal (terbuka) langsung menusuk jantung kubu pertahanan laskar Konawe di Puundombi Tongauna. Rencana penyerangan pasukan Belanda, telah diterima laporannya oleh Watukila, bahkan setiap gerak-gerik musuh tidak lolos dari pengamatannya. Segala persenjataan yang dimiliki antara lain meriam, senapang, tombak, parang, golok, tombak berkait dan lain-lain sudah disiapkan di Puwilalo dan dari Puwilalo semua laskar berangkat ke kubu pertahanan Puundombi.

Susunan organisasi laskar tempur Konawe adalah sbb:

Pemimpin tertinggi	: Watukila
Panglima tempur	: Langgolo

Wakilnya : Lamboasa
Pasukan meriam dipimpin : Sindaliwu
Laskar-laskar utama : Kokodi, Matasala, Lataniambo,
Merembang, Tekoha, Pagala,
Lattubangi Lelengano, Weribundu,
KombomeEto, Bomba, La Marata
dll.

Laskar-laskar tempur di Puundombi ribuan banyaknya dengan berbondong-bondong siap menangkis serangan pihak Belanda. Pertahanan Cadangan :

1. Walumohitu di Amboki,
2. Samuale di Wawotobi, semuanya siap bertempur, bahkan seluruh kawasan Konawe rakyatnya siap bertempur melawan musuh/Belanda.

Pertempuran di bentang Puundombi.

Hari pertama penyerangan Belanda pada tahun 1908 sudah tiba. Nampak bahwa pasukan-pasukan Belanda lengkap dengan persenjataannya yang lebih baik, jika dibandingkan dengan Konawe. Belanda dipimpin oleh Kapten Trevers, sedang pihak Konawe dipimpin oleh Langgolo dan dibantu wakilnya Lamboasa dengan 3 kesatuan laskar yang berkedudukan di kubu pertahanan Puundombi. Pasukan meriam dipimpin oleh Sindaliwu, ditempatkan di Sanuawuta ± 700 M dari Puundombi yang bertugas sebagai pasukan penghancur iring-iringan musuh. Watukila sebagai pimpinan tertinggi perang Konawe, tetap di markas pertahanan Sanuanggambo, ± 1½ Km dari Puundombi.

Sehari sebelum pasukan Kapten Trevers memerangi jantung pertahanan Konawe, seorang penghubung Belanda bernama Hampoo Seng (tenaga sewaan dari pihak Belanda) telah dibunuh di Puday, yaitu suatu desa di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari (terletak 58 km dari kota Kendari). Kemudian kepalanya dipenggal dan pada hari itu juga kepala Ham Poo Seng/penghubung Belanda langsung dibawa ke markas pertahanan Laskar Konawe di Sanuanggambo sebagai bukti, bahwa pasukan Belanda dalam perjalanan untuk menyerang pertahanan Konawe di

Puundombi. Laskar-laskar Konawe yang sedang bertahan di Puundombi menyambut korban pasukan penghubung Belanda dengan sorak sorai kegirangan.

Keesokan harinya pasukan Belanda menyusup menuju sasaran dan pada pagi buta telah melewati desa Anggotoa - Wunduongohi. Pasukan Belanda tidak mengetahui bahwa pasukan meriam Konawe ditempatkan di Sanuawuta. Pasukan-pasukan Belanda membuat formasi dengan gerakan hati-hati dan lambat dengan senjatanya siap ditembakkan maju setapak mendekati jantung pertahanan laskar Konawe. Route perjalanan pasukan Belanda secara kebetulan tepat melewati mulut meriam Sindaliwu yang sudah siap memuntahkan peluru.

Dengan tidak berpikir panjang pasukan Belanda maju terus, merasa tanpa hambatan, memasuki lingkaran sasaran tembak meriam pertahanan Konawe.

Dengan tidak menyia-nyiakan waktu pasukan-pasukan meriam Konawe mulai membuka serangan pertama terhadap iring-iringan pasukan musuh. Peluru-peluru meriam tepat mengenai sasaran ke lambung barisan pasukan musuh, menyebabkan pihak pasukan muruh banyak mengalami korban. Pasukan-pasukan musuh segera membalas serangan meriam laskar Konawe, sehingga pertempuran yang gencar pun terjadilah. Meriam-meriam dari pihak Konawe pun memuntahkan lagi pelurunya ke sasaran laga. Pilrak Belanda berusaha menangkis serangan meriam ini, tetapi akhirnya pasukan Belanda terpaksa mundur dan mengadakan konsolidasi setelah pertempuran memakan waktu sehari penuh.

Dalam pertempuran pertama kedua belah pihak menderita banyak korban.

Setelah konsolidasi pasukannya yang kocar-kacir pada pertempuran pertama, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Travers pun mulai membuka serangan pengepungan baru terhadap pasukan meriam Konawe.

Terjadilah gerakan maju pasukan Belanda mengepung dengan ketat dan Sindaliwu pun berusaha meloloskan meriam-meriam yang hampir terkepung dan sambil mundur meninggalkan medan, akhirnya pasukan Konawe dapat lolos dari kepungan musuh.

Korban ke dua belah pihak makin banyak berjatuhan. Pasukan meriam mundur karena kedudukan tadi meskipun strategis untuk senjata berat seperti meriam, namun sangat berbahaya karena medannya rata. Keselamatan senjata berat/meriam-meriam dengan medan yang rata tentu mudah dikepung, apalagi laskar-laskar Konawe tidak terlatih dan tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang perang. Yang mereka miliki hanya tekad bulat, yaitu lebih baik mati berkalah tanah daripada hidup dikuasai Belanda.

Kapten Travers segera mengumpulkan kembali pasukannya dan melanjutkan serangannya ke jantung pertahanan Konawe dan Puundombi. Laskar-laskar tempur Konawe di Puundombi tinggal menunggu detik-detik berkobarnya pertempuran. Dengan tidak membuang-buang waktu pasukan Kapten Trevers mulai bergerak maju lagi. Serangan kali ini langsung ke jantung pertahanan Konawe. Kubu pertahanan Puundombi yang dibangun berupa benteng di atas tanah galian dan terletak di tengah-tengah-tengah pepohonan yang lebat serta terlindung dari panas matahari. Di sekitar benteng pertahanan terhampar luas lahan padang rumput (alang-alang). Dengan demikian kedudukan kubu pertahanan Puundombi adalah suatu medan terbuka.

Hubungan markas besar Sanuanggambo dengan laskar tempur di Puundombi tetap lancar, sehingga setiap yang terjadi di medan pertempuran, markas besar selalu dapat mengetahui dan Watukila sebagai pimpinan tertinggi laskar tempur Konawe tetap berada di markas menerima laporan-laporan tentang jalannya pertempuran dan keadaan musuh. Di samping itu pula memberikan instruksi-instruksi kepada pimpinan pertempuran Puundombi dan pertahanan lain. Sementara itu bala bantuan kepada Watukila terus mengalir baik berupa bahan makanan, maupun tenaga pasukan dan lain-lain.

Pasukan Trevers dengan semangat tempur yang tinggi maju dengan gagah perkasa. Pasukan-pasukan Travers yang berseragam hitam pakai kelewang, dilengkapi dengan senjata granat, muncul di depan kubu pertahanan Konawe memenuhi lahan padang alang-alang. Komando penyerbuan ke kubu sayup-sayup terdengar dengan bunyi pluit yang panjang. Itulah komando pasukan Belanda menyerbu ke kubu pertahanan. Pasukan-pasukan Belanda

yang berseragam hitam nampak laksana semut hitam menyerbu kubu pertahanan Puundombi.

Sementara itu Langgolo dengan laskarnya memberikan perlawanan yang tidak mengenal menyerah. Laskar-laskar Konawe yang disiapkan di luar kubu, setelah pasukan Belanda menyerbu kubu, laskar-laskar ini segera menyerang dari belakang pasukan Belanda. Laskar-laskar Konawe dengan gagah berani, bertempur tanpa reserve. Kedua belah pihak saling menyerang dan kejar mengejar, bertempur satu lawan satu. Ke dua belah pihak nampaknya tidak ada yang mau mundur. Korban manusia di kedua belah pihak makin banyak yang berjatuh; sambil pertempuran berkobar terus, masing-masing pihak tidak mengenal lelah dan lapar. Pertempuran baru berupa memburu satu persatu terjadilah di medan terbuka yang laus. Ke dua pasukan bertempur tak mengenal lapar/dahaga. Semangat perlawanan laskar Konawe meluap laksana luapan air bah sungai KonaweEha di musim banjir. Kapten Travers rupanya salah perhitungan; diramalkannya bahwa dalam tempo 15 menit dengan kekuatan pasukan yang besar, markas Puundombi bisa direbut olehnya. Kenyataan dari pada ramalan Kapten Travers itu meleset.

Kapten Travers yang sudah cukup banyak mengalami pertempuran di Nusantara kembali mengakui bahwa perlawanan laskar Konawe cukup gigih dan memayahkan. Pengalamannya di berbagai daerah di Nusantara, Travers harus mengakui bahwa belum mengalami pertempuran semacam yang dialami di Puundombi; medan terbuka luas dengan padang rumput, kubu lawan hanya galian tanah setinggi $\frac{1}{2}$ m namun dipertahankan dengan gigih. Ke dua pasukan terlibat dalam pertempuran, tidak bedanya sebagai ke dua kesebelasan yang berjuang untuk memenangkan pertandingan. Masing-masing saling berganti mengejar, laksana sedang memperebutkan bola di lapangan hijau. Demikian jalannya pertempuran di medan perang Konawe di Puundombi melawan pasukan-pasukan kolonial Belanda, yang lamanya hampir sehari penuh.

Ke dua belah pihak pasukan yang bertempur, tidak saja lelah, lapar dan dahaga, malah peluru sama-sama hampir kehabisan. Oleh

sebab itu terjadilah saling memukul dengan laras senjata api, kelewang dengan parang, sambil kejar mengejar di medan terbuka. Pertempuran Puundombi yang penuh heroik dan sifat kesaktria, telah menghiasi lembaran perjuangan rakyat Konawe melawan kolonialisme-imperialisme Belanda.

Menjelang sore hari, panglima tempur laskar Konawe "Langgolo" tertembak, tepat mengenai tulang pahanya ketika sedang mengejar lawannya. Langgolo jatuh tersungkur, kemudian ia bangun berlutut setengah duduk, sambil memegang senjatanya. Kapten Trevers lalu memerintahkan agar ia menyerah, namun Langgolo menolak menyerah dan akhirnya ditembak sampai mati di tempat.

Langgolo telah ditembak mati di medan pertempuran demi untuk kemerdekaan tanah kelahirannya. Serentetan tembakan peluru dari pasukan Kapten Trevers mengakhiri perjuangan Langgolo sebagai panglima laskar tempur Konawe di Puundombi. Langgolo jatuh tersungkur mencium tanah tumpah darahnya.

Berita gugurnya Langgolo di medan tempur Puundombi, segera tiba di markas besar Sanuanggambo. Pimpinan tertinggi laskar Konawe memerintahkan kepada Lamboasa mengganti Langgolo yang telah gugur di medan perang untuk mengundurkan laskarnya di Bungguosu dan bertahan di sana.

Mengingat pertahanan Puundombi telah direbut pihak Belanda, maka markas besar dipindahkan di Tanea, kurang lebih 4 km ke jurusan utara dari Sanuanggambo. Pasukan-pasukan Belanda semakin bertambah banyak. Lamboasa yang telah menerima jabatan pimpinan baru sebagai panglima laskar tempur Konawe membuat kubu perlawanan di Bungguosu. Pasukan Belanda mengejar terus laskar-laskar perlawanan Konawe, dan akhirnya giliran Lamboasa yang bertahan di Bungguosu telah tiba, Lamboasa ditembak mati, lalu ditanam ke dalam lubang di Palarahi dalam keadaan tegak lurus terbalik, yakni kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Begitu kejam perlakuan penjajah terhadap Lamboasa, sehingga menimbulkan dendam secara meluas di kalangan patriot lainnya.

Setelah seluruh pelosok kerajaan Konawe berhasil dijelajahi,

pasukan Belanda menegaskan bahwa tidak ada perlawanan yang berarti kecuali pertempuran Puundombi yang menyebabkan pasukan Belanda menjadi kewalahan. Andaikata Langgolo tidak gugur pasti pasukan Belanda akan tetap terpukul muncur. Tetapi karena Langgolo telah gugur, langkah selanjutnya Watukila perintahkan laskarnya menghutun, menghindari pasukan Belanda. Watukila sendiri meninggalkan Tanea dan berdiam di rumah seupunya yang terletak antara Tinobu dan Ulu Anggotoa.

Meskipun pihak Belanda telah menguasai seluruh daerah Pusat Konawe, namun atas prakarsa Haji Taata dan Sao-Sao, pihak Belanda masih mengirim perutusan kepada Watukila agar bersedia berdamai dan kembali ke Tanea. Jaminan keamanan dirinya bersama laskarnya, ditanggung oleh pihak Belanda asal tidak melawan lagi. Tawaran Belanda ini tidak segera diterimanya. Akhirnya Haji Taata menemuinya di tempat yang sudah ditentukan dan barulah Watukila bersedia kembali ke Tanea.

Akan tetapi apa yang terjadi setelah kembali ke Tanea? Watukila/Panglima Una sebagai Pimpinan tertinggi laskar Konawe bersama para pengikutnya langsung ditawan. Ribuan laskar yang ditawan di Tanea dan selanjutnya sebagian tawanan diangkut ke Makassar (sekarang Ujung Pandang) lalu dipenjarakan.

Watukila sebagai pimpinan tertinggi perlawanan Konawe karena melawan Belanda dan kerajaan Laiwoi, harus menerima hadiah penjara di Makassar bersama-sama laskar lainnya dari Konawe. Mereka berjuang dan berperang mempertahankan tanah tumpah darah mereka yang tercinta. Mereka adalah pahlawan-pahlawan tanah air yang dengan kesatria berperang tak mengenal maut melawan kolonial Belanda yang hendak menguasai tanah tumpah darah mereka. Mereka mengangkat senjata mempertaruhkan jiwa raganya demi untuk kemerdekaan tanah tumpah darah mereka. Nilai perlawanan Watukila ini pada hakekatnya tidak berbeda dengan nilai perlawanan para pahlawan: Iman Bonjol, Teuku Umar, Dipenogoro, Hasanuddin dan Patimura. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang cinta kepada tanah kelahiran mereka yang kemudian setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 mereka-mereka ini diakui sebagai pahlawan nasional. Demikianlah para laskar Konawe yang berperang melawan Belanda, ditawan

kemudian dengan kapal diangkut ke Makassar lalu dipenjarakan. Di antara laskar Konawe yang dipenjarakan di luar Sulawesi ialah Weribundu seorang serikandi Konawe yang dipenjarakan di Jawa dan Matasala di Sawahlunto.

Laskar-laskar Konawe yang ditawan dan dipenjarakan di Makassar sebagai berikut :

1. Karaeng Watukila sebagai pimpinan tertinggi perang Konawe.
2. Kokodi.
3. Matasala dipindahkan dari Jawa ke Sawahlunto.
4. Sindaliwu.
5. La Marata.
6. Samuale.
7. Bomba.
8. Latumbangi.
9. Weribundu dipindahkan dari Makassar ke Jawa.
10. Pagala.
11. Lelengano.
12. Merambangi.

Tertawannya Panggawa Una "Watukila" bersama laskar-laskarnya menurut anggapan Belanda bahwa berakhirlah perlawanan di Konawe dan kerajaan Konawe telah tenggelam bersama sejarahnya. Berdirilah Kerajaan Laiwoi ciptaan Belanda dan "Sao-Sao" yang telah berjasa kepada Belanda diangkat oleh Belanda menjadi raja Laiwoi menggantikan "LA MANGU".

Sementara itu "Watukila" dan kawan-kawannya tetap mengalami hukuman di Makassar. Penduduk Makassar banyak mengenal beliau sebagai bangsawan pajuang dari kerajaan Konawe, sehingga "Watukila" digelar oleh penduduk Makassar "Karaeng Watukila". Gelar karaeng, bagi orang Makassar hanya golongan keturunan raja/bangsawan yang boleh menyandanginya. Demikianlah sewaktu Karaeng Watulika kembali dari pembuangannya di Makassar penduduk Konawe tetap menyandangkan gelar Karaeng sampai beliau mangkat. Seusai perang Konawe melawan kolonial Belanda, pihak Belanda segera menyusun/menegakkan kekuasaan kerajaan Laiwoi dengan ibu kota Kendari. Kepada mereka yang tidak mengakui dan tunduk kepada penguasa kerajaan Laiwoi dan

Belanda, diancam akan ditangkap dan dipenjarakan, jika perlu hukuman tembak mati. Rakyat Konawe terpaksa menerima kehadiran Belanda dan kerajaan Laiwoi dengan secara dingin. Pihak Belanda mengetahui hal ini dan berusaha menumpas setiap usaha yang berlawanan dengan keinginan dan kepentingan kolonial Belanda. Pihak Belanda tetap waspada karena sewaktu-waktu pemberontakan rakyat bisa timbul. Ketika Karaeng "Watukila" kembali dari pembuangannya bersama tawanan-tawanan dalam perang Konawe tahun 1910, pihak kolonial lebih meningkatkan kewaspadaan.

Pihak Belanda tetap khawatir terhadap Karaeng "Watukila" karena itu pihak Belanda senantiasa mencurigainya. Sewaktu-waktu ia dapat menghilang, terlepas dari tahanan dan menghimpun kekuatan untuk melawan. Belanda berusaha menjinakkan Karaeng "Watukila" agar mau kerja sama dengan pihak Belanda tetapi kenyataannya Karaeng "Watukila" tetap menolak uluran tangan Belanda. Untuk mengukuhkan pengangkatan Sao-Sao menjadi Raja Laiwoi, Belanda telah mengatur siasat perkawinan politik yaitu Karaeng "Watukila" dikawinkan dengan putri pertama Sao-Sao yang bernama Wasela. Perkawinan ini tidak membawa keredaan politik dalam negeri, bahkan eksesnya lebih meluas ke tempat-tempat yang lain misalnya di bagian selatan Konawe.

Perlawanan kerajaan Konawe tidak saja terjadi di pusat kerajaan di Una (Tongauna) tetapi terjadi pula di daerah-daerah antara lain di Manumehewu, di Palangga, di Wawowonua Baito dan di Wuu Ura/Motaha.

Di Manumohewu di suatu tempat yang disebut Windo, telah dipersiapkan pertahanan untuk melawan terhadap Belanda. Pasukan yang jumlahnya relatif kecil dipimpin oleh seorang tamalaki (perwira) yang bernama "Lapadi" dan dibantu oleh puterinya.

Didirikanlah sebuah benteng batu yang berbentuk empat persegi dengan panjang sisi kurang lebih 15 meter. Sekitar 1 km, dari benteng pertahanan ditempatkan suatu pos pertahanan pertama yang akan menyergap iring-iringan musuh, agar memberi kesempatan bagi pertahanan utama untuk menyiapkan diri menghadapi serangan.

Pada tahun 1908 patroli marsose Belanda yang dipimpin oleh seorang Kapten dan rombongan Controleur diserang oleh pasukan Lapadi bertempat di Windo. Serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba menyebabkan beberapa orang marsose Belanda menjadi korban. Belanda mempersiapkan tenaga penyerang yang jumlahnya lebih besar, lalu melancarkan serangan-serangan ke kubu pertahanan Windo. Pasukan Lapadi berjuang dengan gigih, menangkis setiap serangan Belanda. Perlawanan Lapadi berlangsung sampai tahun 1910. Oleh karena siasat busuk seorang juru bahasa Belanda yang bernama La Ende, Lapadi tertipu dan terkepung pada bulan Desember 1910 di Ngapamandati, akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Kendari. Dari penjara Lapadi berhasil meloloskan diri lalu kembali menyusun barisan perlawanan. Pada suatu saat di tahun 1911 kubu pertahanan Lapadi dapat ditembus oleh marsose. Pasukannya yang bertahan hanya satu regu bersama puteri Lapadi yang bernama Aliyina. Serbuah musuh demikian hebatnya namun isi benteng bertahan mati-matian di dalamnya sampai gugur semuanya. Pada benteng tempat bertahan dan gugur itulah pasukan Lapadi dan pembantunya Aliyina dikuburkan secara massal. Lapadi sendiri bertualangan ke gunung-gunung dan akhirnya meninggal pada tahun 1914 karena sakit, lalu dimakamkan di kampung Manumohewu.

Di Palangga, seorang pemberani bernama Lamangga, menentang kehadiran Belanda. Dia mempersiapkan diri akan membunuh Controleur yang akantiba di kampung kediamannya; senjatanya yang terdiri dari taawu (parang panjang) dan tombak diasah setajam-tajamnya. Persiapan Lamangga sempat diketahui oleh Polingay seorang bangsawan di tempat itu. Dengan siasat tipu muslihat, akhirnya Lamangga dibunuh oleh suruhan Polingay. Sebagai penghargaan Belanda, atas jasa Polingay membunuh Lamangga, Polingay diangkat menjadi Kepala Distrik Palangga. Peristiwa terbunuhnya Lamangga terjadi dalam tahun 1911. 4)

Selanjutnya di Wawowonua dekat Baito, terdapat pula suatu pertahanan menentang kehadiran Belanda di Konawe Selatan. "Polonui" itulah nama pimpinan gerakan perlawanan di Wawowonua, memilih puncak sebuah gunung sebagai kubu pertahanannya. Lereng gunung dibersihkan dari pohon-pohon, lalu dipersiapkan

batang-batang kayu yang besar-besar dari puncak gunung untuk digulinkan ke bawah. Satu-satunya jalanan yang dibukakan untuk mendaki gunung pertahanan itu.

Pada tahun 1914 tibalah pasukan marsose Belanda untuk menaklukan Polonui. Segera mereka mendaki gunung melalui jalan yang sudah dibukakan. Setelah seluruh pasukan berada di lereng gunung, dilepaskanlah batang-batang kayu yang terikat di puncak gunung, menggulung dan menghancurkan pasukan yang sementara mendaki. Korban Belanda tidak sedikit, tetapi pada serangan berikutnya Polonui sudah menghilang, dan Belanda kembali ke Kendari tanpa korban apa-apa. Sejak itu Belanda beranggapan bahwa Polonui sudah meninggal. Tetapi ternyata kemudian Polonui masih mengasingkan diri di hutan-hutan dan nanti pada tahun 1916 beliau meninggal karena sakit. Setelah dianggap oleh Belanda bahwa perlawanan tak mungkin lagi timbul diadakanlah perundingan dengan bangsawan-bangsawan yang tidak menentang, lalu ditanda tanganilah Lange Verklaring pada tahun 1917. Pada pihak Belanda diwakili G.G. Van Reil, Assistent T.B. Houdhar, Controleur Kapten Leger dan pihak Laiwoi, Sao-S o Latombili, Tunduala, Rakawula. Tetapi namun demikian pada tahun 1918 timbul pula gerakan perlawanan Laulewulu bertempat di Wuu Ura dekat Motaha sekarang. Perlawanan tersebut segera dapat ditumpas oleh marsose Belanda atas petunjuk Haji Taata (TUA HADI).

Semua perlawanan yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas merupakan rangkaian perlawanan kerajaan Konawe terhadap Hindia Belanda dan kerajaan bonekanya "kerajaan Laiwoi".

Situasi politik tetap membara laksana api dalam sekam. Kecintaan rakyat terhadap Konawe tetap berkobar dalam jiwa rakyat meskipun kolonial Belanda telah menghancurkan kerajaan Konawe dan mendirikan kerajaan Laiwoi di atas puing-puing reruntuhan kerajaan Konawe. Konawe telah ratusan tahun berdiri megah, baik defacto maupun de yure atas wilayahnya, baik ke dalam maupun ke luar. Dengan kemenangan pihak Belanda dalam perang Konawe tahun 1918, Kerajaan Konawe berakhir riwayatnya. Pemerintah kolonial melarang menyebut Konawe secara umum dan memamerkan adat Konawe, adalah menjadi tabu untuk rakyat.

Pada umumnya rakyat menyebut Konawe secara bisik-bisik sebab dilarang Belanda. Begitulah politik kolonial untuk memadamkan semangat perjuangan rakyat Konawe.

Untuk mengukuhkan kedudukan kolonial Belanda di Konawe Belanda memandang pengangkatan Sao-Sao, sebagai Raja Laiwoi, sama sekali tidak mendapat dukungan rakyat terutama dari Una, Abuki, Asaki, Lambuya, Pondidaha dan sebagian besar rakyat Sambara, dan Latoma. Pihak Belanda membuat siasat jahat lagi. Diundanglah para bangsawan bekas kerajaan Konawe mengadakan pertemuan besar untuk menetapkan siapa yang menduduki tahta kerajaan Laiwoi pada hal Sao-Sao sudah diangkat pemerintah kolonial Belanda menjadi raja Laiwoi.

Sekali lagi kolonial Belanda menipu rakyat. Berkumpullah para bangsawan bekas kerajaan Konawe di Kendari. Tepat pukul 09.00 pagi, Controleur Van Laiwui membuka pertemuan tetapi kemudian pertemuan dischors karena utusan Una, Karaeng "Watukila" belum tiba dan rupanya masih dalam perjalanan. Tepat pukul 10.00 Karaeng "Watukila" tiba di ruangan pertemuan besar, lalu pertemuan dibuka kembali. Dalam pertemuan ini Haji Taata telah menjalankan peranannya, mengadakan pendekatan agar para utusan menjatuhkan suara kepada Sao-Sao untuk ditunjuk menjadi raja Laiwoi. Inilah siasat Belanda yang menyakitkan hati para peserta rapat.

Dalam pertemuan ini timbul ketegangan terhadap pengarahannya pihak Belanda agar Sao-Sao menjadi raja Laiwoi bahkan ditentang habis-habisan oleh para utusan. Penentang utama ialah utusan bangsawan dari Abuki yang bernama Lapobende. Lapobende mendapat dukungan mutlak dari para utusan untuk mencalonkan Karaeng "Watukila" menduduki tahta kerajaan sesuai pewarisan Kerajaan Konawe (Silsilah). Para utusan menolak Sao-Sao menjadi Raja. Suasana pertemuan tambah tegang namun pihak Belanda harus mempertahankan sikap yaitu Sao-Sao yang disepakati menjadi raja. Karaeng "Watukila" membisu dalam pertemuan karena beliau tahu, bahwa ia tidak disenangi Belanda. Melihat suasana pertemuan besar ini semakin gawat, lalu pertemuan ditutup dan dilanjutkan pada malam harinya. Sebelum pertemuan

besar dilanjutkan pukul 19.00 nampak pihak Belanda amat gelisah mencari jalan. Untuk mengusulkan Sao-Sao tidak mungkin diterima oleh pendukung-pendukung Karaeng "Watukila" yang dipelopori oleh Lapobende dari Abuki. Belanda mengambil kesimpulan, bahwa Lapobende harus disingkirkan dalam pertemuan. Sekali lagi Belanda memamerkan kejahatan kolonialnya. Lapobende utusan bangsawan dari Abuki diberi minuman beracun. Pertemuan akan dilanjutkan mulai pukul 19.00. Sebelum pertemuan dibuka, para utusan yang hadir dalam ruangan disuguhi kopi susu dengan macam-macam kue, biskuit dll.

Tuan Controleur pura-pura senang dan mempersilahkan minum suguhan kopi. Apa yang terjadi sebagai tragedi politik kolonial Belanda? Kopi susu untuk Lapobende dicampur racun. Ketika Lapobende mengangkat gelas minum yang berisi kopisusu bercampur racun, Controleur pura-pura ke WC untuk buang air kecil. Tiba-tiba suasana pertemuan menjadi ribut, gegar dan panik. Seusai Lapobende meneguk kopi susu, beliau terus jatuh tersungkur di bawah meja pertemuan. Dari mulutnya keluar air liur membusah dan seketika itu juga menghembuskan napas terakhir. Pertemuan besar para bangsawan Konawe bubar tanpa kelanjutan dan ditutup untuk selama-lamanya. ⁵⁾

Almarhum Lapobende bangsawan dari Abukti kembali ke rahmatullah dalam pembunuhan yang bersifat pengecut dari pihak kolonial Belanda. Almarhum Lapobende mati diracun karena mempertahankan kebenaran. Beliau dimakamkan di Sadoha Kendari. Kematian almarhum Lapobende telah menggempatkan seluruh negeri. Seluruh rakyat Konawe berduka cita atas musibah yang menimpa diri Lapobende.

Pihak Belanda kembali memperketak kewaspadannya. Pasukan-parukan Belanda melakukan patroli terus-menerus demi menjaga keamanan. Kerja paska dijalankan untuk membuka jalan raya baru. Ini terjadi tahun 1916 sampai tahun 1917. Perkampungan lama terutama rakyat-rakat Tongauna dipindahkan (resettle) agar mudah pengawasannya.

Pombili yang juga sudah kembali dari pengasingan di Makassar senantiasa memperlihatkan sikap tidak senangnya kepada Belanda. Bahkan Pombili banyak kali datang bermalam di rumah

Karaeng "Watukila". Belanda menaruh curiga karena bisa timbul pemberontakan lagi. Pombili tidak boleh lama-lama di Konawe. Siasat bulus, harus dicari alasan tepat untuk menangkap. Suatu waktu Pombili dilapur kepada Belanda bahwa ia berusaha memperisterikan anaknya. Apa benar laporan ini? Tidak benar, akan tetapi laporan, benar-atau tidak, pemerintah Belanda sudah ada alasan untuk menghukumnya. Polisi dikerahkan untuk menangkap Pombili, tetapi tak berhasil. Beliau disegani dan ditakuti segenap penduduk Konawe. Pemerintah Belanda mengerahkan tentara kolonialnya menangkap, kalau tidak dapat ditembak mati.

Pasukan berangkat untuk menangkap Pombili tetapi ia menolak ke Kendari. Akhirnya psukan dua pleton ril ternyata bertindak melakukan tembakan mitraleur, memberondong ke tubuh Pombili. Setelahhabis peluru satu peti, ternyata Pombili masih senyum manis. Pombili menyuruh pasukan pulang kembali ke asrama di Kendari. Usaha menangkap dan membunuh Pombili gagal sama sekali, namun Belanda tidak kehabisan akal. Sementara itu Sao-Sao telah meninggal dan digantikan puteranya "Tekaka" menjadi Raja Laiwoi pada tahun 1928. ⁶⁾ Dari raja Tekaka juga berpendapat, bahwa Pombili harus disingkirkan dari Konawe.

Tindakan-tindakan Pombili tidak mentaati peraturan-peraturan/ Undang-undang Belanda/Laiwoi. Dengan melalui siasat busuk Belanda, dilaporkan lagi bahwa Pombili mengulangi perbuatannya yang pernah dituduhkan. P rsepakatan para bangsawan/tokoh-tokoh adat membujuk Pombili agar mau ke Makassar, kemudian dipindahkan ke Nusakambangan, Bengkulu, Kalimantan, terakhir di Tanah Merah Irian Jaya. Karena Pombili berjasa dalam tahanan yaitu sering menyelamatkan penduduk dari ancaman bahaya antara lain dari serangan harimau, akhirnya Belanda membebaskan dan kembali ke Konawe. Pombili hidup merdeka, bebas dari segala ikatan kolonial. Nah, bagaimana dengan raja Tekaka? Perlu diketahui bahwa tradisi adat Tolaki, bahwa setiap raja yang baru harus dinobatkan (dilantik) di Unaaha secara resmi dengan upacara kebesaran adat. Selama Sao-Sao menjadi raja Laiwoi tidak pernah dinobatkan secara resmi dengan upacara kebesaran adat. Demikian pula Tekaka yang menggantikan ayahnya menjadi raja Laiwoi dua tahun lamanya setelah Karaeng

Watukila mangkat (tahun 1935) barulah penobatan raja Tekaka dengan resmi dalam upacara kebesaran adat Tolaki di Unaaha pada tahun 1937.

Pada tahun 1950 Kerajaan Laiwoi yang dirajai oleh Tekaka diubah menjadi Swapraja Laiwoi. Swapraja Laiwoi akhirnya menjadi Kabupaten Kendari dengan Kepala Daerahnya yang pertama Drs. Abdullah Silondae berdasarkan UU. No.28/1959, ⁷⁾ terhitung mulai tanggal 2 Maret 1960.

4. Akibat Perlawanan

Sebagai akibat perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Konawe terhadap Belanda, Watukila dan kawan-kawan, menanggung derita dibuang/dipenjarakan di Jawa, Makassar (Ujung Pandang) Sawahlunto. Di samping itu Belanda pun semakin kokoh kedudukannya, lalu Kerajaan Laiwoi buatan Belanda sebagai pengganti kerajaan Konawe harus menandatangani Korke Verlarung pada tahun 1917 yang berarti tunduk kepada kekuasaan Belanda dan sebagai konsekwensinya semakin sulitlah kemungkinan bagi rakyat untuk melancarkan serangan-serangan baru terhadap kolonialisme Belanda.

Di bidang pemerintah daerah kerajaan Laiwoi pun dibagi atas beberapa district dan onderdistrict. Rakyat sudah harus memiliki kartu penduduk, rakyat sudah harus membayar pajak kepala di samping harus kerja rodi pada setiap distrik untuk kepentingan Belanda. Diangkatlah pegawai-pegawai kantor, juru blasting dan pegawai-perawati lainnya, sesuai dengan kebutuhan penjajahan Belanda. ⁸⁾

B. PERLAWANAN TERHADAP NICA

Setelah terasa bahwa kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II semakin dekat, mulailah diadakan persiapan-persiapan menghadapi keadaan yang akan tiba. Latihan-latihan Seinendan yang diadakan oleh Jepang, hasilnya dipersiapkan untuk keperluan nasional. Memang sebelum tiba peneyrahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, seorang Toketai Jepang yang bertugas di Nowotobi yang bernama "Ninomiya Heiso", pernah memberitakan bahwa di Jawa sudah ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Setelah Jepang kalah dan disusul dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebulan kemudian yaitu pada tanggal 17 September 1945 pemerintah Kolaka yang dipimpin oleh Andi Kasim mengumumkan bahwa Kolaka adalah wilayah Republik Indonesia dan segeralah dibentuk kelayakan yang disebut PKR (Pembela Keamanan Rakyat).

PKR Kolaka dengan cepat mengadakan latihan-latihan militer. Pemerintah dikendalikan oleh golongan pemuda yang menyebut dirinya Pemuda Republik Indonesia (PRI). PRI Kolaka mulai mengembangkan pengaruhnya ke daerah-daerah termasuk daerah Kendari yang masih dalam masa peralihan dari kekuasaan Jepang ke tangan raja dan bangsawan setempat.

Dalam bulan Oktober 1945, telah tiba delegasi PRI di beberapa tempat di daerah Kendari dengan tugas menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam delegasi itu kebetulan ikut serta seorang tokoh pemuda/keturunan bangsawan Konawe, yaitu Supu Jusuf yang saat itu bertugas di Kolaka sebagai Assistent Inlands Besturr (AIB). Dengan persetujuan Lasandara (Raja II Kendari) dikibarkanlah bendera Merah Putih di Wawotobi dan sesudahnya dilangsungkanlah pertemuan dan terbentuklah gerakan pemuda di Wawotobi yang dinamakan Sinar Pemuda Konawe. Tokoh-tokohnya ialah M.Djamil Muhsin, M.Assadiq, Saido Djohansyah, Hamsah dan kawan-kawan lainnya.⁹⁾

Setelah selesai, delegasi melanjutkan perjalanan ke kota Kendari. Di Kendari delegasi mengadakan konsultasi dengan Raja I Kendari "Tekaka" tetapi raja masih agak ragu untuk menyengetujui pengibaran bendera Merah Putih di Kendari. Walaupun demikian para tokoh pemuda Kendari yang dipelopori oleh Makmun Dg Mattiro (dari Pamong Praja Kendari) memprakarsai pertemuan antara para pemuda Kendari dengan delegasi PRI Kolaka dan akhirnya diputuskan pengibaran bendera Merah Putih harus dilaksanakan. Dengan keputusan itu maka pada hari itu juga bendera Merah Putih dikibarkan di depan rumah Lasandara di Sodaha Kendari. Tokoh-tokoh pemuda Kendari yang menjadi peserta pertemuan dan mengambil keputusan menaikkan bendera Merah Putih di Kendari adalah :

- Makmun Dg Mattiro;
- M. Junus Tanukila;
- Danuhasan;
- Ismalin Dg Mantijiwi;
- Manaseng S. Hasan;
- Rahmat;
- Arsyad Thayeb;
- Badillah.

Dalam bulan Oktober 1945 itu juga, pemuda-pemuda Andoolo yang tokoh-tokohnya terdiri dari: M. Ali SilondaE, Abdullah SilaondaE, Aburaera SilondaE, Jakup SilondaE berhasil menaikan bendera Merah Putih dan menyatakan bahwa Andoolo dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan menggabung ke Kolaka. Diadakanlah langkah-langkah yang dipandang perlu segera ditangani. Segera dilakukan kegiatan latihan-latihan pemuda di Andoolo. Selaku komandan pelatih ditunjuk Saiman, bekas sersan KNIL. Terbentuklah pasukan PKR di Andoolo yang merupakan salah satu Bataion PKR dari Resimen PKR Kolaka.

Pada awal Nopember 1945 tentara Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia mendarat di Kendari. Turut menbonceng tentara Sekutu beberapa personil NICA Belanda dengan pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Wolhoff adalah bekas Controleur Belanda di Kendari yang menyingkir ke Australia selama pendudukan Jepang.

Kedatangan tentara Australia di Kendari disambut oleh Raja Laiwoi "Tekaka" dalam suatu upacara bendera di palabuhan Kendari. Bendera Austalia dinaikkan berdampingan dengan bendera Belanda.

Supu Jusuf dari PRI Kolaka, kebetulan sempat mengikuti peristiwa tersebut, tetapi dalam upacara itu ia mengenakan/ menyematkan lencana Merah Putih pada picinya dan keadaan itu sempat dilihat oleh tentara Sekutu dan NICA. Selesai upacara Supu Jusuf dicari oleh penguasa untuk dimintai pertanggungjawabannya tentang penggunaan lambang Merah Putih itu. Mendengar berita bahwa ia sudah dicari oleh penguasa, maka pada malam hatinya ia meninggalkan kota Kendari denan tujuan meloloskan diri menuju Punggaluku dan terus ke Totobulu.

DiTorobulu, Supu Jusuf menumpang perahu kembali ke Kolaka melalui BoEpinang.

Selama Supu Jusuf bolak-balik Kolaka–Kendari menjalankan propaganda, ia selalu didampingi oleh Mahaseng S. Hasan. Pada saat Supu Jusuf mengikuti upacara penerimaan Sekutu/NICA di Kendari, pemuda Mahaseng S.Hasan berada di sampingnya. Tetapi pada saat Supu Jusuf meloloskandiri dari perangkap NICA di Kendari, tak sampai hatilah Supu Jusuf untuk membawa Mahaseng S.Hasan terpisah dari orang tuanya yang sangat sayang kepadanya. Supu Jusuf sudah menyadari bahwa betapa sulitnya untuk mempertemukan Mahaseng S.Hasan dengan orang tuanya karena Kendari sudah dikuasai musuh.

Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia segera memulihkan kekuasaan Belanda di Kendari. Bendera Belanda sudah tentu berkiblat setiap hari.

Dengan perasaan antipati yang sudah mendalam di dada pemuda Mahaseng S.Hasan terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda, maka pada suatu pagi, Mahaseng S.Hasan memanjati tiang bendera Belanda, lalu merobek warna biru sehingga tinggalan warna Merah Putih yang berkibaran di atas tiang. Disamping itu pada malam hari ia menempelkan lambang Merah Putih di dinding-dinding dalam kota. Setelah diketahui oleh NICA akan kejadian itu, dilakukanlah penangkapan di malam hari dan kini Mahaseng S.Hasan menjadi tawanan NICA. Ia disiksa dengan pukulan bertubi-tubi sampai menderita kerusakan badan lalu jatuh sakit. Dengan penyakitnya itu maka beberapa waktu kemudian pemuda Mahaseng S.Hasan meninggal dunia dan dimakamkan di Kendari. 10)

Beberapa lama kemudian, pada tanggal 4 Februari 1946 ekspedisi PKR Kolaka memasuki Wawotobi dan menawan 3 orang tokoh bangsawan Konawe, yaitu "Laposudo" Kepala Onder-district Lambuya, "Muhammadati" Juru tulis Kepala Onder-district Lambuya dan "Mahadini" putera Kepala Distrik Konawe. Dengan kejadian ini menyebabkan tentara NICA melancarkan operasi dua jurusan. Jurusan pertama menuju Kolaka melalui Rate-Rate dan jurusan ke dua menuju Kolaka melalui Andoolo. Pada

tanggal 5 Februari 1945, secara serentak NICA melancarkan serangan di Rate-Rate dan di Andoolo. Di Rate-Rate bertahan pasukan PKR yang pernah memasuki Wawotobi, sedangkan di Andoolo hanya dipertahankan oleh pasukan PKR setempat. Pertempuran terjadi di siang elang. Oleh karena persenjataan tidak seimbang maka perlawanan PKR dapat dipatahkan oleh NICA baik di Rate-Rate maupundi Andoolo. Dari perlawanan Rate-Rate telah berakibat dibumihanguskannya negeri Rate-Rate, sementara itu perlawanan Andoolo berakibat gugurnya Saiman, Koamdan Pelatih PKR Andoolo dan ditawannya pemimpin-pemimpin PKR, yang terdiri dari Nuhung SilondaE, Abdullah SilondaE, AbruaEra SilondaE, Saradia, Jakub SilondaE dan lain-lain. Kecuali yang tidak tertawan pada saat itu ialah M.Ali SilondaE berhubung sementara dalam perjalanan ke Kolaka. Tetapi beberapa hari kemudian ia tertangkap di Rate-Rate dalam perjalanan ke Kolaka. Para pemuda Andoolo yang ditawan NICA akhirnya diasingkan dan dihukum di Makassar.

BAB. IV

PERLAWANAN DI DAERAH MUNA

A. PERLAWANAN TERHADAP V.O.C. DAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Latar belakang perlawanan

Pada zaman dahulu Muna adalah suatu kerajaan merdeka dari kekuasaan asing. Mulai pada pertengahan abad ke 17 kerajaan Muna berada di bawah pengaruh kesultanan Buton. Kini bekas kerajaan Muna telah menjelma menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Raha.

Menurut ceritanya, bahwa nama "Muna" bersumber dari istilah "Kontu Kowuna" yang berarti batu berbunga. Hal itu mungkin karena pulau Muna atau Wuna terdiri dari karang-karang yang indah, laksana bunga tampaknya.¹⁾ Wuna artinya bunga. Tetapi oleh orang Ternate yang sering berkunjung ke Muna menyebutnya Pantiano, sebagaimana tersebut dalam perjanjian Ternate dengan Buton yang terjadi pada tahun 1664. Lain halnya dengan orang Bugis-Makasaar yang menamakan Muna dengan Pancana sedang orang Muna sendiri menyebutnya Wuna.

Muna sebagai daerah tingkat II jika dilihat dari letak astronominya membentang dari utara ke selatan antara $4^{\circ}24'$ LS dan dari barat ke timur antara $122^{\circ}3'$ BT– $123^{\circ}3'$ BT, dengan batas-batasnya :

- pada sebelah utara dengan Selat Tiworo dan daratan Kabupaten Kendari;
- pada sebelah timur dengan Laut Banda;
- pada sebelah selatan dengan daerah Kabupaten Buton;
- pada sebelah barat dengan Selat Speelman.

Kabupaten Dati II Muna meliputi bagian utara pulau Muna

dan ditambah dengan bagian utara pulau Buton. Luas arealnya 4.887, 25 Km² 2).

Menurut ceritera sejarah bahwa penduduk pertama pulau Muna, datang dari kerajaan Luwu yaitu anak Raja Luwu sendiri. 3)

Diceritakan bahwa Sawerigading dalam suatu pelayarannya telah berlayar melalui perairan Muna. Karena air surut perahu Sawerigading kandas di sekitar Bahutara yaitu di suatu tempat tidak jauh dari kota Wuna bekas ibu kota kerajaan Muna dahulu. 4) Entah bagaimana sehingga Sawerigading dan pengikutnya sejumlah 40 orang lalu menghuni pulau karang itu. Setelah beberapa lama kemudian mereka kembali ke Luwu menjemput keluarga mereka, lalu balik ke Muna menghuni pulau karang itu. Mereka memilih tempat tinggal di Melai atau Wamelai yang dipimpin oleh seorang sesepuh yang digelar Mieno Wamelai. Mie: orang; no: nya (bahasa Muna).

Jumlah mereka kian lama kian berkembang lalu didirikannya perkampungan pertama yang diberi nama Tongkuno. Pemimpin kampung itu digelar Kamokula artinya orang tua kampung.

Penduduk berkembang terus dan kampung-kampung menjadi bertambah akhirnya berjumlah delapan kampung. Empat kampung dikepalai oleh Mieno yaitu Kaura, Kancitala, Lembo dan Ondoke, sedangkan yang empat kampung dikepalai oleh Kamokula, yaitu Tongkuno, Barangka, Wapepi dan Lindo. Pimpinan umum dari ke delapan kampung itu adalah Kamokula Tongkuno. Demikianlah kampung-kampung itu mengembangkan dirinya akhirnya menjadi suatu masyarakat kerajaan.

Sekitar tahun 1300 – 1400 M, muncullah raja Muna legendaris yang digelar Beteno ne Tombula (keluar dari bambu) sebagai Raja I di Muna. Beteno ne Tombula kawin dengan Sangke Palangga yang biasa dinamai Tandeabe.

Beteno ne Tombula, Raja I Muna mempunyai hubungan erat dengan keluarga raja-raja di Buton, Konawe, Mekongga utamanya dengan Luwu karena sebagai daerah asal.

Beteno ne Tombula sebagai cacak bakal raja-raja Muna dari keturunannya kelak muncullah "Sugimanuru" yang kemudian

menjadi Raja VI Muna. Di masa pemerintahannya kerajaan Muna mengalami perkembangan pesat. Struktur masyarakat dibagi atas tiga golongan yaitu golongan Kaumu, Walaka dan Anangkolaki. Golongan Kaumu merupakan golongan teratas yang berhak menduduki jabatan Raja Muna dan jabatan-jabatan tinggi dalam kerajaan berdasarkan hukum adat. Golongan ini diberikan gelar La Ode bagi pria dan Wa Ode bagi wanita. Gelar tersebut ditempatkan di depan nama diri yang bersangkutan. Golongan Walaka adalah golongan yang memegang jabatan pemelihara adat. Golongan inilah yang berhak memilih dan mengangkat Raja Muna. Golongan ketiga yaitu golongan Angkolaki merupakan golongan rakyat banyak pendukung kerajaan.

Sugimanuru sempat memperluas hubungan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan Buton, Konawe, Toburi dan lain sebagainya, bahkan berhasil pula mengawini dua orang puteri Raja Konawe yaitu Weandala dan Wealanda (Mbulanda), lalu lahir beberapa orang bersaudara di antaranya Haluoleo, Melamba dan Puteo. Haluoleo lebih dikenal lagi dengan gelarnya Lakilaponto.

Sugimanuru sebagai Raja VI Muna mangkat pada tahun 1525. Untuk pengganti beliau sebagai Raja Muna diangkatlah puteranya yang bernama Lakilaponto alias Haluoleo.

Dalam masa pemerintahan Lakilaponto kerajaan Muna mengalami perkembangan lebih luas lagi sampai memiliki wilayah yang meliputi 20 negeri. Banyak peristiwa penting yang terjadi akhirnya menaikkan kemasyhuran namanya. Beliau berhasil mengalahkan Kapitan Banggai yang sangat ditakuti yang dinamakan orang, si Labolontio yang bergerak menguasai pesisir pantai dan pulau-pulau di Sulawesi Tenggara pada awal abad ke 16. Beliau berhasil pula mengawini puteri Raja IV Buton dan pada akhirnya setelah raja mangkat Lakilaponto merangkap jabatan sebagai Raja Buton di samping sebagai Raja Muna. Pada saat itu masuklah agama Islam di Buton lalu beliau gelar Sultan Buton yang memerintah tahun 1538 – 1584 M. Setelah kedudukannya kokoh sebagai Sultan Buton, jabatan Raja Muna dialihkan ke tangan adiknya yang bernama Laposasu.

Laposasu memimpin kerajaan Muna dan berhasil mem-

bangun kota Muna di Tongkuno. Setelah Laposasu mangkat, berturut-turut memerintah sebagai Raja Muna ialah Rampeisarumba dan Titakono. Yang terakhir ini memerintah sekitar tahun 1600 M. Pada zaman pemerintahan Titakono banyak pula terjadi perubahan antara lain penyempurnaan struktur pemerintahan yang terjadi sekitar tahun 1610 – 1615. Setelah Titakono mangkat La Ode Saaduddin naik takhta kerajaan Wuna. Kelengkapan jabatan kerajaan disempurnakan lagi dan wilayah kerajaan dikembangkan dengan pemekaran kampung-kampung baru. Sesudah La Ode Saaduddin diangkatlah La Ode Kaindea sebagai Raja XI di Muna dengan gelar Sangia Langkariri.

Dalam masa pemerintahan La Ode Kaindea telah ramai kunjungan kapal-kapal Perserikatan Dagang Belandan atau V.O.C. ke Maluku dengan tujuan membeli rempah-rempah. Dalam pelayaran ke Maluku, kapal-kapal V.O.C, selalu singgah di Buton dan Muna, bukan saja untuk sekedar mengasoh dan mengambil bekal/air minum, tetapi juga untuk berdagang. Buton dan Muna pada saat itu cukup tersedia dengan barang dagangan berupa pala di samping pula Wuna sebagai penghasil kayu jati. Belanda sangat tertarik untuk membeli bahan baku dari Buton dan Muna. Tetapi sayang sekali bagi V.O.C, karena La Ode Kaindea tidak menerima Belanda (V.O.C) untuk memasuki kerajaan Muna. Sebaliknya Buton, pada tahun 1613 dalam bulan Agustus telah tiba Pieter Both di sana dan sekaligus mengadakan perjanjian persahabatan antara Buton dengan V.O.C. Belanda. Dari peristiwa inilah yang menjadi pokok pangkal pertentangan antara Buton dengan Muna. La Ode Kaindea sebagai Raja Muna bertegas tidak bersedia menerima Belanda, namun Buton membuka tangan menerima Belanda berhubung Buton sedang berhadapan dengan hegemoni kerajaan Goa yang tidak senang melihat peranan Buton di bagian timur nusantara.

Ketegangan antara Muna dan Buton semakin meruncing, setelah La Ode Kaindea ke Buton untuk melaksanakan perkawinannya dengan Wa Ode Sope putri Baluwu namun dibatalkan oleh La Ode Kaindea lalu beralih kawin dengan Wa Ode Wakelu putri Sapati Kapolangka. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan Sultan Buton dan La Ode Kaindea dianggap sebagai musuhnya.

Kadaan itu turut ditentang oleh Belanda (V.O.C) dan Ternate yang menjadi sekutu Buton dalam perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1652 De Flaming datang ke Buton bersama Sultan Mandarsyah dari Ternate. Segera dilakukan tindakan dengan penangkapan La Ode Kaindea di Polubuhan Lohia (Ghai).

La Ode Kaindea dengan gelar Sangia Langkariri dibawa Buton, kemudian beliau diasingkan di Ternate selama tiga tahun. Selama La Ode Kaindea diasingkan di Ternate, kendali pemerintahan kerajaan Muna dipegang oleh isterinya yaitu Wa Ode Wakelu. Berkat kemampuan berdiplomasi Wa Ode Wakelu terhadap Buton dan V.O.C. Belanda, menyebabkan suaminya dapat dikembalikan ke Muna, setelah tiga tahun hidup di perasingan.

Rasa benci dan dendam kesumat terhadap V.O.C. dan Buton, tidak pernah hilang dalam dada La Ode Kaindea, oleh sebab itu secara diam-diam beliau menjalin hubungan dengan Raja Gowa menyerang Buton yang bekerja sama dengan Aru Pakala dan Belanda. Peperangan tersebut telah mengantarkan Gowa yang dibantu Muna, ke sudut kekalhan pada tahun 1667, yang ditandai dengan perjanjian Bongaya, yang berlangsung tanggal 10 Nopember 1667. Kemenangan V.O.C. Belanda terhadap Gowa, berarti pula menenangkan Buton dalam sengketanya dengan Muna dan hilangnya hegemoni Gowa terhadap pulau-pulau yang menghasilkan rempah-rempah di kepulauan Maluku.

Dalam perang manaklukan Gowa, Buton turut dibantu oleh pasukan-pasukan Konawe yang dipimpin Kapita Lau Sambara yang bernama "Haribau" dan Ternate yang dipimpin "Kaicil Sibori Amsterdam".

Walaupun Gowa yang menjadi sekutu Muna telah dinyatakan sebagai negara yang kalah perang, namun Muna tetap berkeras hati tidak akan menerima kehadiran V.O.C. Belanda di negerinya. Perjanjian Bongaya (1667) yang memuat nama Muna atau Pancana, tidak dianggap sebagai suatu ikatan bagi Muna. Pendek kata, bahwa baik dalam perjanjian Ternate (1664), maupun dalam perjanjian Bongaya (1667), Muna tau Pancana dimasukkan dalam isi perjanjian, hal tersebut bukan persoalan lagi La Ode Kaindea,

bahkan beliau tetap berkeras kepala. Atas dasar itu, maka setelah perang Gowa selesai, dengan suatu pasukan gabungan, Belanda menyerang serta menaklukkan Muna dan Tiworo pada tahun 1668.

La Ode Kaindea dikalahkan tetapi tidak diturunkan dari takhta, sekalipun hanya berupa simbol belaka. Untuk menjalankan pemerintahan harus didampingi oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Sultan Buton. Dalam hubungan itu diangkatlah La Ode Muhammad Idris seorang Kapita Lao dari Buton dalam jabatan itu. Beliau diberikan gelar Sarano Kaindea artinya Pelaksana Pemerintahan Raja La Ode Kainde.

Tidak lama kemudian raja La Ode Kaindea meninggal dunia. Yang akan menggantikannya ialah putera mahkota yang bernama La Ode Tugho. Sebelum beliau meninggal telah dinasihatkan kepada anaknya yaitu dengan kembali mengawini Wa Ode Sope bekas tunangan yang tidak jadi dikawininya dan telah pula menyebabkan sengketa Buton – Muna menjadi memuncak yang berkesudahan dengan campur tangan bangsa asing.

La Ode Tugho mematuhi nasihat ayahnya dan hasilnya sangat baik. Hubungan Buton dengan Muna segera pulih kembali dan La Ode Tugho naik takhta tanpa hambatan dari Buton, malahan La Ode Muhammad Idris ditarik kembali ke Buton. Jadi kedaulatan Raja Muna kembali pulih di tangan Taja La Ode Tugho.

Di masa pemerintahan Raja La Ode Tugho, agama Islam masuk di kerajaan Muna dengan perantaraan seorang mubaligh yang bernama Saidi Raba (Said Arab?).

La Ode Tugho masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Pemerintahannya dijalankan menurut hukum dan syariat Islam.

Beberapa lama kemudian pemerintahan La Ode Tugho berakhir dan digantikan oleh La Ode Husain yang sangat taat menjalankan syariat Islam. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam V.O.C. karena beragama Kristen, menjadi kebencian La Ode Husain. Mereka dianggap lawan, sehingga segala langkah dan tindak laku orang-orang Belanda dipandang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kebebasan V.O.C. Belanda berdagang di

Muna dengan sendirinya terganggu oleh sikap panatisme raja dan masyarakat Muna. Walaupun demikian di satu pihak Belanda adalah sekutu Buton, sedang di pihak lain Buton adalah penyantun kerajaan Muna. Setiap pengangkatan raja Muna harus disetujui Buton dan dengan sendirinya terikut peranan Belanda. Hal tersebut telah terbukti dengan pengangkatan La Ode Akhmad menjadi raja Muna adalah hasil campur tangan Buton dan Belanda terhadap keputusan Dewan Kerajaan Muna untuk menetapkan raja. Hal semacam itu sudah tentu tidak menyenangkan hati raja dan masyarakat Muna.

Pada tahun 1710, La Ode Kontukoda berangkat ke Gowa mencari hubungan kerja sama dengan kerajaan Gowa untuk melawan kekuasaan V.O.C. Belanda, tetapi usahanya tidak berhasil berhubungan Raja Gowa, Sultan Ismail La Pareppa To Soppewali sementara berperang melawan ayahnya sendiri, "La Patau" raja Bone. Dalam perang Gowa – Bone kali ini Belanda menggunakan lagi kesempatan membantu Bone dengan mengadakan blokade sepanjang pantai Gowa, disusul dengan tibanya kontingen pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Infantri Palack.

Sejak saat itu Muna semakin tertekan oleh kekuasaan Belanda. Secara terang-terangan Belanda mencampuri segala urusan pemerintahan kerajaan Muna, walaupun resminya kehadiran Belanda di Muna nanti terwujud pada tahun 1906.

Pada tahun 1910 Belanda menghapuskan Dewan Kerajaan Muna. Wilayah GhoEra dijelmakan menjadi distrik lalu muncullah Distrik Tongkuno, Lawa dan Katobu.⁶⁾

Mulai saat itu kerajaan Muna menjadi Onderafdeeling Muna dan tergabung dalam wilayah Afdeelling Buton en Laiwui dengan ibukotanya Bau-Bau, sedang Onder Afdeelling Muna ibukotanya Raha.

Kekuasaan raja Muna dibatasi sekedar sebagai alat penjajah Pemerintah Belanda dalam menerapkan perintah kepada rakyat dan masyarakat Muna, dengan memperoleh uang kehormatan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda sangat membutuhkan uang untuk membiayai Nederland dan tanah Jajahannya. Oleh sebab itu diberlakukanlah bermacam-macam pungutan berupa pajak dan kerja dinas yang sangat menekan dan memberati kehidupan rakyat. Untuk menaklukkan hati dan perasaan rakyat, maka sebagai hasil politik etis didatangkanlah para Pendeta dan Pastor di Muna sambil menyebarkan faham dan ajaran agama Kristen juga Missi dan Zending membuka sekolah-sekolah seperti di Raha dan Waale-ale. Agama Islam dan para pemukanya tidak mendapat perhatian sama sekali, menyebabkan keresahan di kalangan rakyat Muna yang telah lama memeluk Islam secara fanatik.

Ketidaksenangan rakyat Muna terhadap Pemerintahan Hindia Belanda menjadi memuncak di sekitar tahun 1914/1915. Pada saat itu berkembang istilah-istilah yang bersifat profokatif di kalangan masyarakat misalnya :

- LOEKTIA, maksudnya Lawan Orang Eropah kalau tidak adil;
- KANEKO, maksudnya Kas Nederland Kosong.

Demikian kebencian rakyat terhadap Belanda mengalami proses yang agak panjang dan pada suatu ketika memecah dalam tindakan-tindakan pembangkangan yang nyata.

Salah seorang bangsawan Muna yang bernama La Ode Pulu sangat tidak menerima baik tindakan dan perlakuan Belanda terhadap rakyat Muna. Secara terang-terangan ia menyatakan ketidasesenangannya, dan tidak gentar menghadapi setiap kemungkinan dari tindakan jahat Belanda. Sikapnya itu diketahui oleh Belanda. Pemerintah mendatangkan sepasukan tentaranya di Pasilao yaitu tempat kediaman La Ode Pulu lalu menembaknya, namun La Ode Pulu tidak mengalami akibat tembakan, kecuali ia sempat membunuh beberapa orang musuhnya. Konon diberitakan bahwa La Ode Pulu memiliki ilmu kebal anti besi dan peluru. Untuk mematahkan perlawanan La Ode Pulu, dicarilah cara dan siasat untuk mengepung dan menangkap hidu-hidup atau membunuhnya dengan tembakan peluru emas? ⁷⁾

Menurut cerita beberapa orang-orang tua di Muna, bahwa pada akhirnya La Ode Pulu berhasil dibunuh dengan siksaan pada tahun 1915 ⁸⁾. Dengan peristiwa tersebut sakit hati

rakyat semakin meluas dan keadaan itu cukup dipahami Pemerintah Belanda.

Untuk melunakkan hati rakyat Muna di lakukanlah oleh pemeriksa suatu tindakan mengimbangi dukungan pemerintah Belanda terhadap usaha Missi dan Zending sebagai salah satu realisasi politik etis, yaitu dengan mengizinkan Perkumpulan Muhammadiyah untuk mendirikan Sekolah Muhammadiyah di Raha. Sekolah Muhammadiyah didirikan pada tahun 1933 yang dipimpin oleh La Kare, tetapi sekolah tersebut hanya berusia dua tahun. Pada tahun 1935 sekolah ditutup dan La Kare ditangkap Belanda dengan tuduhan bahwa La Kare menyelahgunakan surat izin membuka sekolah yang dijadikan wadah pembibitan tenaga-tenaga anti Pemerintah Hindia Belanda. Karena Belanda menghawatirkan kerusuhan yang bisa timbul dari perasaan nasionalis yang tumbuh di kalangan masyarakat Muna yang terbukti telah berulang kali memusuhi Belanda, maka sejak tahun 1930 tidak ada lagi pengangkatan aparat pimpinan kerjaan Muna. Untuk keperluan pemerintah Belanda di Muna, penanganannya langsung diselenggarakan oleh Sultan Buton.

2. Wujud perlawanan.

Usaha V.O.C. untuk menaklukan anak negeri dengan siasat mengadu domba kemudian menguasai atau yang dikenal dengan politik *divide et impera* memang telah lama diketahui dan disadari oleh La Ode Kaindea. Oleh sebab itu beliau tidak mengizinkan kehadiran V.O.C. Belanda di wilayah kerajaan Muna.

Perbedaan pendapat antara Buton dan Muna karena ditiup-tiup oleh Belanda lalu berkembang menjadi pertentangan dan permusuhan yang melibatkan beberapa kerajaan dalam suatu peperangan terbuka, merupakan suatu peristiwa yang lazim terjadi sebagai buah siasat Belanda untuk melemahkan kekuatan raja-raja di Indonesia.

Setelah perjanjian Ternate pada tahun 1664 dan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 sebagai suatu pertandaan kemenangan Belanda terhadap kekuatan anak negeri, maka dengan kekuatan gabungan, pasukan Belanda menyerang dan menaklukan La Ode

Kaindea/Raja Muna yang tetap berkeras kepala terhadap kekuasaan V.O.C. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1618. Perlawanan La Ode Kaindea adalah bermotifkan kepentingan nasional.

Pengganti La Ode Kaindea adalah La Ode Tugho yang di dalam zamannya memerintah kerajaan Muna, lalu masuk agama Islam dan diterima menjadi agama penduduk kerajaan. Paham dan ajaran Islam mendalam di hati rakyat bahkan tumbuh fanatisme terhadap agama Islam yang telah membentuk jiwa rakyat dan raja Muna, La Ode Husain, yang kemudian menjadi raja setelah La Ode Tugho mangkat.

Dengan bermotifkan agama Islam, La Ode Husain menentang terhadap setiap langkah kebijaksanaan dan tindak laku orang-orang Belanda, namun tidak mampu untuk melawan secara fisik karena kekuatan senjata tidak seimbang.

Jiwa nasionalisme dan semangat keislaman yang tumbuh subur di dada rakyat Muna telah memberikan warna kebencian yang berkepanjangan terhadap Belanda. Dengan secara perorangan La Ode Pulu telah membuktikan ketidak senangannya terhadap kekuasaan Belanda. Ia mengadakan perlawanan pada tahun 1914/1915 sampai ia meninggal akibat disiksa secara kejam oleh Belanda. Perlawanan berikutnya terjadi pada tahun 1935 yang didalangi seorang pemuda Islam Muhammadiyah yang bernama La Kare. Perlawanan tidak secara fisik akan tetapi dalam bentuk penanaman kesadaran nasional melalui pendidikan keagamaan.

Cara membangkitkan kesadaran nasional melalui pendidikan dianggap sangat berbahaya bagi keutuhan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga La Kare pemimpin Sekolah Muhammadiyah dituduh sebagai propagandis yang akhirnya ditangkap dan sekolahnya ditutup.

3. Jalannya perlawanan.

La Ode Kaindea dengan gelar Sangia Langkariri sebagai Raja Muna tidak mengizinkan V.O.C. Belanda untuk memasuki wilayahnya. Ia menyadari sepenuhnya akibat yang akan terjadi bagi kepentingan rakyatnya, apabila ia menerima kedatangan

orang Belanda ke negerinya. Sikapnya itu diterima Belanda sebagai penghinaan terhadap Kompeni dan tidak menyenangkan bagi Sultan Buton yang telah menandatangani perjanjian bersahabat dengan Belanda. Dengan demikian La Ode Kaindea terpaksa bertentangan dan bertolak belakang dengan Buton, hal mana merupakan peluang baik bagi Belanda untuk menghukum raja Muna.

Pertentangan antara Buton dan Muna kemudian menjadi ketegangan yang sangat meruncing, setelah La Ode Kindea membatalkan perkawinannya dengan Wa Ode Sope puteri Sapati Baluwu yang direstui Sultan Buton, lalu mengawinkan Wa Ode Wakelu yang tidak direstui Sultan. Sultan Buton merasa dipermalukan oleh Muna dan merupakan suatu hal yang dianggap tidak wajar. Dengan kejadian itu Sultan Buton meminta bantuan dari sahabatnya yaitu Belanda agar dapat menyingkirkan La Ode Kaindea.

Pada tahun 1652 ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh De Flaming tiba di Buton bersama dengan Sultan Ternate Mandarsyah. Segeralah direncanakan siasat untuk mengasingkan La Ode Kainde. Siasat tersebut tidak diketahui oleh La Ode Kaindea, sehingga beliau berkenan menerima penjemputan berkunjung ke Buton. Ternyata setelah La Ode Kaindea berada di atas kapal, pelayaran langsung ditujukan ke Ternate. Di sanalah La Ode Kaindea diasingkan sebagai hukumannya dari Buton dan V.O.C. Belanda. Dalam peristiwa pengasingan La Ode Kaindea itu pelabuhan Lohia (Ghai) menjadi tempat bersejarah, karena dari sinilah raja Muna tersebut dijemput dan dibawa ke Ternate.

Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1655, La Ode Kaindea dikembalikan ke Muna sebagai hasil kemampuan isterinya (Wa Ode Wakelu) berdiplomasi terhadap Sultan Buton dan pihak Kompeni (V.O.C.). Setibanya di Muna, La Ode Kaindea kembali memangku jabatannya dan menjalankan pemerintahan kerajaan Muna, yang selama beliau diperasingan telah dijalankan oleh permaisuri Wa Ode Wakelu.

Oleh karena rasa dendamnya sangat mendalam terhadap Kompeni Belanda dan Buton, maka setelah ia memangku jabatan-

nya selaku Raja Muna, diusahakanlah secara diam-diam menjalin hubungan kerja sama antara Muna dengan Gowa untuk menyerang Buton yang pada saat itu bersekutu dengan Aru Palaka dan Kompeni Belanda. Di samping Aru Palaka dan Kompeni Belanda yang bersekutu dengan Buton juga turut memihak Buton dengan memberikan bantuan pasukan ialah kerajaan Konawe dan Ternate. Pasukan bantuan dari Konawe dipimpin oleh Kapita Lau Sambara "Haribau" dan Panglima Kerajaan Konawe "Pakandeate" sedang pasukan Ternate dipimpin oleh "Kaicil Sibori Amsterdam".⁹⁾

Dalam pertempuran di perairan Buton di sekitar pulau Makassar, pasukan Gowa dan Muna mengalami kekalahan yang ditandai oleh kehancuran armada Gowa dan diakhiri dengan suatu perjanjian yang disebut *Tractaat van Bongaya* atau Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tanggal 10 Nopember 1667. Isinya antara lain berbunyi :

Pasal 16

Sultan (amksudnya Sultan Gowa) melepaskan segala haknya atas Buton.

Pasal 17

Sultan harus melepaskan hak-haknya atas pulau-pulau Sula dan pulau-pulau yang termasuk kekuasaan Ternate seperti Selayar, Muna dan seluruh daerah di pesisir timur Sulawesi, yaitu mulai dari sana sampai Manado, pulau Banggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak antara Mandar dan Manado seperti Lambangi, Kaidipan, Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang dan Kaili.¹⁰⁾

Dengan isi Perjanjian Bongaya itu La Ode Kaindea/raja Muna tidak merasa terikat di dalamnya, bahkan terdapat kecenderungan masih berkeras kepala terhadap kekuasaan Buton dan Kompeni Belanda. Oleh sebab itu dengan suatu pasukan gabungan, Kompeni melancarkan serangan terhadap Muna dan Tiworo yang akhirnya takluk pada tahun 1668.

Pada tahun 1710 La Ode Kontukoda dari Muna berangkat lagi ke Gowa untuk mencari hubungan kerja sama dengan kerajaan Gowa guna menghadapi V.O.C. Usaha tersebut rupanya tidak berhasil, berhubung Sultan Gowa "Ismail La Pareppa To Soppewa-

li” sementara sibuk berperang melawan ayahnya ”La Patau” Raja Bone.

Pada tahun 1914, La Ode Pulu yang membenci tindakan Pemerintah Hindia Belanda di Muna kembali ditembaki oleh pasukan Belanda di Pasilao. La Ode Pulu berhasil membunuh beberapa orang tentara Belanda, sebaliknya dia tidak mengalami cedera sedikitpun. Menurut yang diberitakan oleh orang-orang tua di Muna, bahwa La Ode Pulu seorang yang kebal terhadap besi ataupun peluru. Setelah Belanda berhasil mengepung dan menangkapnya beliau disiksa dan dipukuli dengan batang jarak sampai meninggal dunia pada tahun 1915. 11)

Karena rakyat Muna semakin menampakkan ketidaksenangannya terhadap Pemerintah Belanda yang mendukung pengembangan paham dan ajaran Kristen, sedangkan agama Islam seolah-olah diterlantarkan, maka pada tahun 1933 timbullah keizinan Pemerintah Belanda bagi Perkumpulan Muhammadiyah untuk boleh mendirikan Sekolah Mhammadiyah. La Kare sebagai Pemimpin pergerakan Muhammadiyah sekaligus selaku pimpinan sekolah telah memanfaatkan kesempatan membangkitkan rasa kesadaran beragama Islam di samping kesadaran nasional yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu pada tahun 1935 La Kare ditangkap Belanda dan sekolah Muhammadiyah di Raha ditutup oleh pemerintah.

4. Akibat perlawanan.

Kekalahan Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1667 turut diderita oleh Raja Muna La Ode Kaindea. Apalagi dengan penaklukan langsung kerajaan Muna dan Tiworo yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1668 telah menyebabkan La Ode Kaindea tidak lagi berkuasa penuh sebagai raja Muna, tetapi harus didampingi oleh La Ode Muhammad Idris dari Buton yang bertindak selaku Sarano Kaindea atau Pelaksana Pemerintahan Kaindea. Sebelumnya itu pada tahun 1652 sampai tahun 1655 La Ode Kaindea telah mengalami pengasingan di Pulau Ternate.

Usaha La Ode Kontukoda untuk mengajak Gowa memerangi Kompeni Belanda pada tahun 1710, telah mengakibatkan secara

terang-terangan Belanda mencampuri urusan pemerintahan di kerajaan Muna.

Perlawanan yang dilancarkan oleh La Ode Pulu pada tahun 1914–1915 mengakibatkan tindakan pemerasan penajajah semakin ketat. Rakyat dipaksa bekerja pada onderneming-onderneming Pemerintah antara lain di Perkebunan kelapa di Pulau Toba dan pemeliharaan serta pengembangan hutan jati di Raha.

Tindakan La Kare menentang pemerintahan Belanda melalui da'wah dan propaganda yang bersifat nasionalis menyebabkan ia diasingkan di Selayar pada tahun 1934–1936; di Bulukumba pada tahun 1936–1940 dan sekolah Muhammadiyah di Raha ditutup oleh Pemerintah. 12)

Sejak tahun 1930 tidak ada lagi pengangkatan raja Muna dan urusan pemerintah bumi putera ditangani langsung oleh Sultan Buton dari Bau-Bau.

B. PERLAWANAN TERHADAP NICA (NETHERLAND INDIAC CIVIL ADMINISTRATION)

Perlawanan tersebut merupakan perang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

1. Latar belakang perlawanan

Belanda menduduki daerah Muna sejak tahun 1906 dan berlangsung sampai dengan kedatangan Jepang pada awal tahun 1942. Selama waktu yang relatif singkat itu pemerintah Belanda telah banyak menimbulkan kesukaran hidup di kalangan penduduk. Berbagai macam peraturan pajak telah diturunkan dan harus dipatuhi oleh rakyat, belum lagi beban tugas lainnya seperti kerja dinas atau *heeredienst* yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Muna.

Heeredienst dan pinonton bagi Kepala Kampung dan Kepala Distrik meminta tenaga dan waktu yang cukup berarti bagi rakyat untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Hasil bumi kurang terolah dan hasil pertanian tidak mencukupi, namun di pihak lain pajak kepala dan retribusi diatur sangat tinggi.

Di onderneming-onderneming pemerintah terjadi perlakuan yang tidak adil antara pegawai bangsa pribumi dengan pegawai bangsa kulit putih. Taraf hidup pribumi sangat menyedihkan, bahkan pernah timbul istilah bahwa hidup orang pribumi adalah sebengkol. 13)

Penderitaan hidup saat itu ditandai oleh kemerosotan ekonomi dunia sebagai akibat Perang Dunia I yang pada waktu itu dikenal dengan istilah zaman "Malaise".

Krisis ekonomi dunia itu juga terasa di daerah Muna. Dalam keadaan sesulit itu, tumbuhlah keinginan untuk bebas merdeka di kalangan pemuda, karena disadari bahwa hanya dengan kemerdekaan akan membawakan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah penjajah telah dimanfaatkan oleh para pemuda untuk menuntut dan menimba ilmu pengetahuan bagi kebutuhan masa depan yang penuh dengan harapan.

Di samping itu para pemuda menyadari sepenuhnya bahwa persatuan dalam perkumpulan yang berbau kebangsaan sangat besar artinya bagi pembentukan masa depan yang bebas merdeka dari penindasan bangsa asing. Atas dasar pemikiran itulah yang telah mendorong bagi para pemuda di daerah Muna memasuki organisasi-organisasi seperti PSII dan Muhammadiyah pada awal tahun 1932. Sementara itu tiba-tiba keadaan berubah secara drastis karena pecahnya Perang Asia Timur Raya pada tanggal 8 Desember 1941 yang menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan penduduk dari tangan Pemerintah Hindia Belanda ke tangan Pemerintah Militer Jepang.

Tentara Jepang tiba di Raha pada tanggal 22 September 1942 dan mengambil alih segala kekuasaan di Muna. Keadaan pemerintahan dan keperintahan diatur sedemikian rupa, namun tidak jauh berbeda dengan keadaan dengan keadaan di zaman kekuasaan Hindia Belanda.

Struktur pemerintahan tetap sama, kecuali terjadi perubahan istilah penamaan, misalnya Onderafdeeling disebut Bunken; distrik disebut Gun, dan kampung disebut Son. Jadi Sonco artinya Kepala Kampung dan Gunco adalah Kepala Distrik.

Yang paling menonjol dan terasa pahit dalam sistim pemerintahan Jepang adalah kekerasan dalam pelaksanaan kekuasaan militernya. 14)

Rakyat mengalami perlakuan kejam dan lebih pahit dibanding dengan pemerintahan Hindia Belanda, sehingga rakyat takut sekali terhadap Jepang. Dengan tanpa daya, rakyat dikerahkan bekerja keras tanpa imbalan ataupun pemeliharaan kesehatan sedikitpun. Rakyat dikerahkan dengan kerja paksa mendirikan kubu-kubu pertahanan termasuk pembuatan lapangan terbang darurat yang disebut Lapangan Kosambi.

Pertanian rakyat tidak terurus lagi tetapi rakyat diwajibkan membantu mengadakan bahan makanan bagi keperluan perang dan untuk kemenangan Jepang.

Berbagai larangan dan kewajiban yang dipikulkan oleh Jepang ke atas pundak rakyat, yang kesemuanya untuk kepentingan dan keperluan perang Jepang.

Rakyat hampir tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja bagi kepentingan hidupnya.

Karena hukuman yang berat dan kejam, maka rakyat tidak dapat melawan, mereka terpaksa menurut, walaupun badan tersiksa dan tidak jarang pula jiwa menjadi korban.

Jepang yang diharapkan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Belanda, malah sebaliknya menjadikan rakyat amat menderita dan sebagai budak perang. Semboyan; Nippon-Indonesia sama-sama kian hari kian hilang dari ucapan para pemimpin Jepang.

Gambaran situasi masyarakat pada saat itu sebagai berikut :

a. Keadaan Sosial Ekonomi;

Jepang yang sementara menghadapi Perang Dunia II, membawa suasana yang memprihatinkan pada daerah yang dikuasainya.

Pada zaman Jepang di Sulawesi Tenggara perdagangan dapat dikatakan lumpuh. Bahan-bahan kebutuhan hidup yang didatangkan dari luar dapat dikatakan hilang dari pasaran. Inflasi meningkat, nilai uang tidak ada. Barang-barang yang dibutuhkan hampir tidak ditemukan di pasar, walaupun ingin dibayar tinggi.

Yang menyolok sekali adalah bahan pakaian, sampai ada rakyat yang memakai karung atau karoro.¹⁵⁾

Produksi bahan makanan merosot, semua hasil pertanian/produksi bahan makanan diperuntukan bagi keperluan **perang**. Onderneming kelapa peninggalan pemerintah Hindia Belanda di Toba, pengolahan kayu jati semuanya diambil alih Jepang. Lahirlah kemerosotan ekonomi yang selalu dibarengi dengan kemerosotan moral. Akibat kesukaran hidup, banyak rakyat yang seolah-olah hidup menghambakan dirinya kepada Jepang untuk sekedar mendapatkan sesuap nasi.

Dalam keadaan ekonomi sedemikian itu, Jepang telah menimbulkan kebejatan moral. Para kaki tangan Jepang mengumpulkan wanita dari kampung-kampung dan diperlakukan sebagai penghibur tentara Jepang yang disebut "yanjo". Kesulitan hidup dan ketakutan masyarakat menyebabkan keluarga mengorbankan anak-anak gadisnya.

b. Keadaan sosial budaya

Di zaman Jepang, pendidikan mendapat perhatian sekeadarnya. Di semua kampung terdapat Sekolah Rendah 3 Tahun yang disebut Futsu U kogakko dan Vervolgschool yang berkelas V dijadikan berkelas VI dan disebut Jokyu Kogakko. Jokyu Kogakko hanya terdapat di Raha yaitu ditempat kedudukan Bunken Kanrikan.

Kurikulum pendidikan hampir sama dengan kurikulum di zaman Hindia Belanda, kecuali itu ditambahkan mata pelajaran bahasa dan huruf Jepang dalam aksara Katakana, Hiragana dan Kanji. Pelajaran seni-suara berupa lagu-lagu Mars Perang dan lagu-lagu Jepang nampaknya sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum sekolah dimulai, murid-murid diwajibkan senam pagi yang disebut

taiso yang terdiri dari Dai Ici, Dai Ni dan Dai San (Seri I, Seri II dan Seri III). Pelajaran berceritera yang mengisahkan tentang keperwiraan dan ketangkasan dari tokoh legendaris Jepang banyak diterapkan. Sensei (guru) memperoleh penghormatan yang wajar. Pemuda-pemuda digembleng semangatnya dengan latihan-latihan berbaris. Senibudaya rakyat mendapat tantangan berat, dengan penerapan seni budaya Jepang melalui sekolah-sekolah.

c. A g a m a

Agama Kristen mengalami kemunduran karena pendeta dan pastor yang berkulit putih ditangkap dan ditahan Jepang. Agama Kristen mengalami intimidasi dan pemeluknya dilarang melakukan kebaktian. ¹⁶⁾

Sebaliknya, terhadap agama dan pemuka Islam, Jepang agak bersifat lunak. Mungkin diyakininya bahwa penganut Islam tentu memusuhi Belanda karena perbedaan agama.

d. Pengaruh Perang Asia Timur Raya

Dengan Perang Asia Timur Raya yang meletus pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menghadapi Perang Dunia II yang telah lebih dahulu meledak pada bulan Mei 1939 di Eropa.

Untuk mengembangkan pengaruh Jepang agar memperoleh dukungan menghadapi musuh-musuhnya, dikumandangkanlah semboyan-semboyan yang dapat menawan hati rakyat. Semboyan-semboyan itu misalnya :

- 1). Semboyan Tiga A: Nippon pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelindung Asia.
- 2). Nippon—Indonesia sama-samane, dan
- 3). Nippon adalah Saudara Tua di Asia.

Rakyat Muna juga mengenal semboyan-semboyan itu. Tujuan tiada lain, kecuali untuk membangkitkan semangat rakyat membantu Jepang memenangkan perang melawan Sekutu. Pemuda dan raga kuat dimanfaatkan untuk keperluan perang. Di seluruh kampung digerakkan potensi pemuda melalui kegiatan baris-

berbaris dengan senjata sepotong bambu yang tidak boleh diruncing, kemudian bergotong-royong dalam usaha pertanian bahan makanan bagi tentara Jepang. Organisasi yang mewadahi gerakan pemuda itu disebut Seinendan. Semboyan "beras adalah bom" dikumandangkan ke seluruh negeri.

Pemuda yang sehat dan berbakat militer dijadikan Heiho yaitu Pasukan Pembantu Tentara Jepang yang ikut bertempur. Pemuda Muna yang menjadi Heiho antara lain Abdul Hamid Langkosono, La Ditoe, Alifin Tjoa. Semuanya ditujukan terhadap usaha memenangkan perang, oleh sebab itu pengerahan tenaga massa sangat diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, secara bergilir rakyat dipaksa mengerjakan pembuatan basis-basis pertahanan lapangan terbang Kosambi dan pengolahan aspal di Banabungi serta pengolahan nikel Pomalaa. Tenaga kerja paksa tersebut disebut romusha. Bagaimanapun juga bantuan rakyat terhadap Jepang, kemajuan serangan Sekutu tidak dapat dibendung.

Menjelang berakhir Perang Asia Timur Raya, telah jelas bahwa mau atau tidak mau, Jepang harus melepaskan daerah-daerah yang didudukinya. Mereka jengkel dan ngeri untuk menerima kekalahan di pelupuk mata rakyat Indonesia. Berusahalah mereka menutupi perlakuan kejamnya terhadap rakyat dengan jalan nenanam budi terhadap masyarakat. Dikumpulkanlah para pemuda yang tergabung ke dalam Heiho, dan Seinendan sambil dilatih dan dipersiapkan untuk menerima kemerdekaan dari Jepang. Dalam masa sekejap, sikap Jepang terhadap penduduk berubah menjadi baik. Rupanya mereka berhati-hati dari cetusan balas dendam dan sakit hati rakyat. Lagu Indonesia Raya dianjurkan untuk dinyanyikan di sekolah-sekolah. Merah Putih diperkenalkan untuk menjadi bendera Indonesia bila telah merdeka, tetapi kapan Indonesia merdeka tidak pernah dibicarakan oleh Jepang.

Pada tanggal 8 April 1944 di dalam suatu Upacara memperingati pecahnya Perang Asia Timur Raya bertempat di salah satu SR di Lombe (Distrik Gu) bendera Merah Putih telah dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru atau bendera Jepang. 17)

Penyerahan Hirohito (Kaizar Jepang) kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, mengakhiri kekuasaan Jepang di Muna; pemerintah Sipil diserahkan kepada La Ode Ipa. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 orang-orang Jepang yang berada di Muna menyampaikan bahwa Muna sudah menjadi wilayah Republik Indonesia Merdeka, tetapi La Ode Tipa sebagai pimpinan pemerintahan masih sangat ragu-ragu. Beliau masih menunggu perkembangan di Jawa, karenamaklumlah komunikasi dengan Jawa pada saat itu terputus sama sekali. Berita proklamasipun tidak didengar secara langsung tetapi hanya melalui bisik-bisik dari mulut Jepang.

Australia sebagai wakil Sekutu mendarat di Makassar dalam bulan September 1945, dengan tugas untuk menerima penyerahan Jepang dan mengembalikan ke negerinya serta menjaga keamanan di Indonesia khususnya di bagian timur. Sempat didengar berita, bahwa dibelakang tentara Australia terdapat personal-personal Belanda. Hal tersebut menimbulkan kesangsian di kalangan pemuda. Segeralah diadakan perundingan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan hasilnya adalah terbentuknya suatu kekuatan pemuda Muna yang disebut Barisan 20, yang terdiri dari anggota-anggotanya yang berjumlah 20 orang pemuda yang cinta dan sanggup mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Anggota-anggota Barisan 20 tersebut tersebar dariseluruh pelosok wilayah Bunken Muna.

Pemuda-pemuda yang membentuk dan menjadi anggota Barisan 20 adalah :

- a.) Idrus Effendy (La Ode Muh. Idrus Effendy)
- b.) TaEda Achmad
- c.) La Tobulu
- d.) La Ditoe
- e.) La Sipala
- f.) La Ode Ado
- g.) Sujadi
- h.) Tato Sumarto
- i.) La Ode Abdul Gani
- j.) La Ogo
- k.) La Ode Baadia

- l.) La Tasi
- m.) La Kariala
- n.) La Ode Toego
- o.) La Ode Ndiri
- p.) La Ode Pasali
- q.) La Adi
- r.) La Satari
- s.) La Ode Insa
- t.) La Ode Kota.

Pemuda-pemuda dalam Barisan 20 yakin, bahwa penjajah yang ingin balik kembali melangsungkan pemerasannya, pasti akan dapat dilawan asalkan persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat khususnya kaum pemuda dapat digalang dan digalakkan secara efektif. Untuk itulah Barisan 20, mengirimkan utusan mencari hubungan dengan pemuda-pemuda revolusioner yang berjuang di Kendari, Kólaka, Makassar dan Jawa.

Dengan TKR di Surabaya telah diperoleh kontak melalui anggotanya Abdul Hamid Langkosono yang memang telah mengusahakan hubungan kerja sama dengan daerah-daerah luar Jawa.

Barisan 20 inilah yang merupakan modal dasar masyarakat Muna mengadakan perlawanan terhadap imperialis Belanda yang berusaha kembali berkuasa di Indonesia ini.

2. Wujud perlawanan

Barisan 20 yang dilengkapi dengan susunan staf dan kesatuan-kesatuan tempurnya akhirnya dijelmakan menjadi suatu batalyon yang disebut Batalyon Sadar lengkap dengan kompi-kompinya.

Akhir September 1945 tibalah Australia di Kendari dan diikuti oleh personal-personal NICA yang dipimpin oleh Wolhoff, bekas Controleur Belanda di Kendari. Maksud kedatangan NICA ialah akan mengembalikan penjajahan Belanda atas daerah ini sebagaimana halnya sebelum perang dahulu. Pada awal tahun 1946 personalia NICA tibalah di Raha atas pimpinan Wolhoff. Kedatangan NICA di Raha segera ditentang oleh barisan pemuda dengan sistim perang gerilya. Semua tempat-tempat kedudukan NICA dibumihanguskan. Berulang kali penyeragaman dilakukan oleh pasu-

kan Batalyon Sadar di samping dengan penyebaran pamflet-pamflet menuntut pembubaran Boneka NICA yaitu Negara Indonesia Timur yang telah merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Perlawanan yang bermotifkan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa walaupun secara kecil-kecilan dan dengan sistim gerilya telah cukup memusingkan aparat NICA di daerah Muna.

3. Jalannya perlawanan.

Mendahului terjadinya kontak-kontak senjata antara pemuda Muna dengan NICA, telah dikirim beberapa orang utusan mencari hubungan dengan pemuda-pemuda di luar daerah Muna. Sebuah perahu dari Wawonii milik juragan Binongko yang bernama "La Abu Isa" pada tanggal 5 September 1945 telah singgah di pelabuhan Kendari dan menerima 9 orang penumpang dan seorang bangsa Belanda bekas tawanan Jepang. Pelayarannya melalui Labuan Tobelo dan Lapsilao di Tampo. Dari sana La Ode Muh. Idrus menumpang dengan tujuan Surabaya. Setiba di Surabaya seluruh isi perahu dicurigai sebagai kaki tangan NICA, lalu mereka ditahan termasuk La Ode Muh. Idrus. Seminggu dalam tahanan La Ode Muh. Idrus ditemukan oleh Abdul Hamid Langkosono, Anggota TKR Surabaya putera kelahiran Muna. Setelah diketahui identitas sebenarnya oleh Pimpinan TKR Surabaya, La Ode Muh. Idrus dibebaskan dari tahanan lalu diberikan sebuah karabun Jepang dan dilatih sebagai pasukan TKR, sedang suasana Surabaya semakin tegang dan di sana-sini terjadi kontak senjata dengan musuh. Dalam keadaan yang penuh ketegangan itu La Ode Muh. Idrus berusaha terus mengumpulkan informasi tentang perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara. Pada bulan April 1946, beliau berhasil menemui tokoh-tokoh TKR antara lain dengan Worouw, Sutrisno, J. Tambato, Hasan Rala, Mafrouw Tunge dan Hamzah Tuppu Komandan Divisi I Lawang Jawa Timur. Setelah diperoleh sejumlah penjelasan dari pada tokoh dan Komandan Angkatan Laut Jawa Timur di Surabaya, kembalilah La Ode Muh. Idrus bersama La Ditoe dengan penumpang perahu "Bunga Melati" yang bertolak dari Panarukan. Dengan perahu tersebut La Ode Muh. Idrus dan La Ditoe mendarat

di pulau Salemo Sulawesi Selatan yang kemudian sempat mengikuti Konperensi Pasekko di Makassar. Setelah itu mereka langsung kembali ke Raha dengan menumpang perahu bernama "Sinar Bangkala" dari Balanipa Sinjai.

Dalam perjalanan pulang La Ode Muh. Idrus berhasil memperoleh bantuan senjata api melalui pembicaraannya dengan Tadjuddin Noor yang pada saat itu menjadi anggota Parlemen NIT. Bantuan senjata dimaksud terdiri dari 5 pucuk karabyn Jepang dan 10 buah granat yang dikirim secara rahasia dengan perahu "Sinar Bangkala" atas kelihayan juragannya yang bernama "Wahe Dg Mappeare" mendaratlah perahunya di Lapolisilao-Tampo dan diterima oleh Taeda Achmad. Setelah senjata diterima dengan selamat disusunlah formasi kompi dan strategi penugasan sebagai berikut :

- a) Kompi Staf bermarkas di Katobu dipimpin oleh La Ode Muh. Idrus dibantu oleh TaEda Achmad dan La Dotoe;
- b) Kompi I bermarkas di Lapolisilao, dipimpin Abd. Manik dan dibantu oleh La Ode Ndiri;
- c) Kompi II bermarkas di hutan Komungo (Katobu Utara), dipimpin Alifin Tjao dan dibantu oleh Abd. Gani M. dan La Pasali;
- d) Kompi III bermarkas di Katilombu (Katobu Selatan) dipimpin Karaelo dan dibantu oleh La Ode Bariu dan La Udo;
- e) Kompi IV bermarkas di Motewe-Langkolome (Wakarumba), dipimpin La Ode Nasiri dan dibantu oleh Bundukila;
- f) Kompi V bermarkas di Boneromba (Kulisusu), dipimpin La Ode Ganiru dan dibantu oleh La Ode Alihi dan La Ogo.

Pada pertengahan tahun 1947 diutuslah La Karaila menuju Kolaka untuk mencari hubungan kerja sama dengan PKR. Kolaka namun karena kota Kolaka telah diduduki NICA sehingga La Karaila tertangkap di sana. Penguasaan Muna semakin diintensifkan oleh NICA dengan penekanan terhadap gerakan pemuda Muna.

Pada bulan Oktober 1947 terjadilah serangan terpadu dari semua kekuatan pasukan. NICA menyebutnya "Muna Affair" dengan kesudahan gugurnya La Salepa salah seorang dari anggota Batalyon Sadar.

Pada tanggal 5 Oktober 1948 diadakanlah suatu rapat gabungan di kompleks Pakuburan Poniki yang merumuskan rencana penyerbuan ke markas NICA. Tetapi sayang sekali isi rapat tersebut sempat diketahui oleh NICA lalu dilakukan penangkapan terhadap 14 orang anggota Batalyon Sadar.

Jauh sebelum peristiwa penangkapan tokoh-tokoh pemuda Muna yang tergabung di dalam Batalyon Sadar, telah pula dilakukan demonstrasi dan penyebaran famplet-famplet menuntut pembubaran NIT dengan memakai nama samaran "Sitti Goldaria".

Sampai pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, di Raha telah berkuasa NICA dengan pengawal kekuasaannya yang terdiri dari tentara KNIL dan Polisi Kilat (Polisi Landschaap). Dalam mengakhiri peranan NICA di Muna telah dilaksanakan gerakan melucuti senjata dari aparat kekuasaan NICA oleh Abd. Hamid Langkosono atas dasar surat Perintah Lettu Husen Sosidi, Komandan Ekspedisi ALRI Pangkalan VII Surabaya.

4. Akibat perlawanan

Walaupun perlawanan terhadap NICA yang dilakukan oleh pemuda Muna merupakan perlawanan yang tidak terbuka secara frontal, tetapi dampaknya wajar diperhitungkan oleh bangsa dan negara di saat-saat kita mengisi kemerdekaan sekarang ini. Pengorbanan moral dan material tidak sedikit demi kemerdekaan Tanah Air Indonesia.

Di satu pihak kita menghitung-hitung jumlah kawan yang gugur dalam pertempuran, di lain pihak ternyata bahwa pemuda-pemuda Muna telah mampu memberikan andil bagi kehormatan bangsa dan negara yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Pemuda-pemuda Muna telah membuktikan kepatriotannya dan kesetiannya terhadap kemerdekaan bangsa dan Tanah Air. Mereka telah rela ditangkap dan disiksa demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai perjuangan mereka tidak kecil dibanding dengan perjuangan pemuda-pemuda Indonesia di lain daerah. Oleh karena itu dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia, wilayah Muna telah diangkat maratabatnya dari daerah Kewedanan menjadi Kabupa-

ten Daerah Tingkat II yang diisi dengan berbagai pembangunan material dan spiritual. Para pemuda yang telah memelopori perjuangan melawan penjajah Belanda dengan kekuasaan NICA, pada umumnya telah menikmati hasil perjuangan mereka, baik sebagai pemimpin formal maupun non-formal dan baik sebagai pengusaha maupun sebagai penguasa. Kecuali bagi mereka yang gugur dan atau yang telah mendahului kita, semoga jasa mereka akan dipersembahkan dan diperoleh ganjaran di hari baan Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V PERLAWANAN DI DAERAH KOLAKA

A. PERLAWANAN TERHADAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Latar belakang perlawanan

Sejak abad ke-13 di daerah Kolaka terdapat sebuah kerajaan yang disebut Mekongga. Menurut silsilah raja-raja Mekongga, raja-raja yang memerintah di sana berasal dari dinasti LARUMBALANGI (Larumpalangi) termasuk keluarga Sawerigading. Dengan demikian jelas bahwa raja-raja Mekongga mempunyai pertikaian darah dengan raja-raja Luwu dan Bone di Sulawesi Selatan. Penduduk kerajaan Mekongga itu menyebut diri sebagai suku bangsa Tolaki. Di samping dengan kerajaan Luwu dan Bone, mempunyai pula hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan raja-raja di Konawe. Dari wilayah yang terbatas luasnya, kemudian berkembang dan pada akhirnya kerajaan Mekongga mempunyai areal yang menempati bagian barat jazirah tenggara P. Sulawesi dengan memiliki batas-batas sebagai berikut :

- pada sebelah utara berbatas dengan wilayah kerajaan Luwu
- pada sebelah timur berbatas dengan wilayah kerajaan Konawe
- pada sebelah selatan berbatas dengan wilayah kerajaan Toburi/Moronene yang kemudian menjadi wilayah kesultanan Buton; dan
- pada sebelah barat berbatas dengan Teluk Bone.

Wilayah kerajaan Luwu di jaman lampau, sekarang merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu. Demikian pula halnya wilayah kerajaan Konawe dan wilayah kesultanan Buton, kini merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, se-

dangkan kerajaan Mekongga sendiri, sekarang ini disebut Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Sebagai suatu kerajaan, Mekongga mencapai puncak kejayaannya kira-kira pada abad ke 17. Pada saat itu memerintah seorang raja yang bernama LADUMA dengan gelar Bokeo. Raja inilah yang pertama menerima agama Islam menjadi agama penduduk di seluruh wilayah kerajaan Mekongga. Pada jaman pemerintahan Bokeo LADUMA di Mekongga terjadilah sengketa antara Goa dengan Bone yang kemudian berkembang menjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Dalam peperangan antara Goa dengan Bone, Belanda (VOC) membantu Bone. Turut memihak Bone antara lain Sultan Buton dan raja Konawe, sedangkan Datu Luwu memihak Goa. Oleh sebab itu Datu Luwu yang bernama Alimuddin memerangi Belanda yang pada akhirnya tertawan dan diasingkan ke Buton pada tahun 1665. Karena Raja (Datu) Luwu sudah diasingkan, formasi raja diisi oleh Patunru yaitu sepupu Datu Alimuddin. Setelah perang Goa berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya pada tahun 1667, Datu Alimuddin dibebaskan lalu kembali ke Luwu, tetapi kedudukannya telah dikuasai oleh Patunru sebagai Datu. Terjadilah perang saudara di mana kerajaan Mekongga terpaksa angkat senjata melawan Datu Alimuddin karena membela Datu Patunru yang menyingkir dan meminta bantuan Bokeo LADUMA, raja Mekongga. Dalam peperangan itu Datu Alimuddin tewas, dan menyebabkan tentara Luwu kalang kabut, akhirnya cerai-berai. Sedangkan bendera perang Luwu dirampas oleh tentara Mekongga. Bendera tersebut berwarna merah putih bertuliskan huruf Arab dengan kalimat tauhid.

Dengan kemenangan tentara Mekongga terhadap tentara Datu Alimuddin yang ditandai dengan tewasnya raja dan jatuhnya bendera perang Luwu ke tangan raja Mekongga, maka Patunru kembalilah ke Luwu melanjutkan pemerintahannya selaku Datu Luwu yang bebas dari saingan. Dengan sendirinya persahabatan Luwu dengan Mekongga menjadi lebih erat. Penghubung atau perantara dalam persahabatan

itu, ditempatkanlah seorang pejabat di Lelewawo dalam wilayah Mekongga dengan gelar Mokole dalam bahasa Tolaki atau Mincara Ngapa dalam bahasa Bugis Luwu. Menurut kesepakatan antara Luwu dengan Mekongga bahwa Mincara Ngapa atau Mokole Kondeeha di Lelewawo bertugas mengatur hubungan Luwu – Mekongga. Bukan saja dengan kerajaan Luwu tetapi dengan kerajaan-kerajaan tetangga lainnya, seperti Moronene, Konawe, Wolio dan Muna, juga dikembangkan persahabatan dan kerja sama dengan prinsip hidup berdampingan secara damai. Persahabatan dengan kerajaan Bone tidak pula disepikan, sehingga di saat kerajaan-kerajaan tetangga terganggu oleh imperialis, Mekongga turut merasakan suka-dukanya, terutama dengan penderitaan masyarakat kerajaan Luwu. Hal itu terbukti pada saat perlawanan Bone dan Luwu terhadap Belanda di awal abad ke-20, di mana para patriot Mekongga turut melawan Belanda. Menurut Laporam-ba alias Daeng Mangngati, bahwa pada saat Bone diserang Belanda di tahun 1905 seorang Ksatria Mekongga yang bernama Pombili turut mendampingi Petta Ponggawae mempertahankan Bone Tengah dengan nama gelar Petta Anregurrunna Anak Arunge.²) Ia diberi nama itu berhubung dengan ilmu kekebalan dan mistik lainnya yang diajarkannya di kalangan bangsawan Bone. Setelah Bone dikalahkan Belanda Pombili sempat meloloskan diri kembali ke Mekongga dan mengadakan persiapan-persiapan melawan Belanda bersama dengan Haji Hasan dan Opu Todjabi dari Luwu. Apa yang dipersiapkan akhirnya menjadi kenyataan. Pada gerakan perlawanan rakyat Luwu yang dipimpin Haji Hasan dan Opu Todjabi sejak tahun 1906, Mekongga turut menjadi arena pertempuran di mana Pombili beserta rakyat Mekongga bekerja sama Haji Hasan dan Opu Todjabi mengadakan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda.

2. Wujud perlawanan

Pasukan Haji Hasan, Todjabi dan Pombili jumlahnya kecil saja, sehingga sulit mengadakan perang terbuka melawan Belanda. Wujud perlawanannya adalah perang gerilya

dengan taktik menghadang dan menyergap musuh kemudian menghilang ke hutan-hutan petualangan. Pada saat musuh dalam keadaan lengah tiba-tiba muncul dan menyergap. Gerakan perlawanan terjadi di beberapa tempat, bukan saja di daerah Kolaka (Mekongga), tetapi kadang-kadang muncul dan menyergap di daerah Wajo, kadang-kadang muncul dan menghadang di daerah Luwu. Markas besar Haji Hasan ditempatkan di Lasusua. Markas itu merupakan suatu basis pertahanan yang dilindungi oleh sebuah barisan gunung batu yang terjal ke laut yang sampai kini terkenal namanya "Gunung Todjabi" Pombili menetapkan garis pertahanannya dari Mangolo (7 km di sebelah utara kota Kolaka) ke Sabilambo sampai Laikamborasaa.³⁾

3. Jalannya perlawanan

Di dalam bulan Ramadhan pada tahun 1907, tatkala Haji Hasan beristirahat di Wawo sambil menjalankan ibadah puasa, Belanda memusatkan perhatiannya untuk melumpuhkan dan menangkap Haji Hasan. Belanda memastikan bahwa dalam keadaan berpuasa Haji Hasan akan kurang bersemangat mengadakan aksi perlawanan. Belanda mengerahkan sekitar 300 orang pasukan dengan cara sangat rahasia untuk mengepung Haji Hasan di kampung Wawo. Belanda tetap yakin bahwa rencana dan siasat penyerangan itu tidak diketahui oleh Haji Hasan oleh sebab itu Belanda berharap, Haji Hasan akan tertawan pada saat itu. Namun, apa yang diduga Belanda ternyata tidaklah demikian. Rencana penyerangan Belanda sempat diketahui oleh salah seorang pengikut Haji Hasan menyebabkan usaha secara rahasia dari orang Belanda menjadi bukan rahasia bagi Haji Hasan. Segera dicari siasat untuk mematahkan rencana penyerangan terhadap dirinya.

Di dekat Wawo disebuah daratan pantai yang berpasir putih di samping sebuah tanjung. Haji Hasan menunggu pasukan Belanda dengan taktik penyergapan secara tiba-tiba. Pasukannya menempatkan diri pada tempat-tempat terlindung dan siap sergap. Ketika rombongan pasukan Belanda

lewat, dengan tiba-tiba Haji Hasan bersama pasukannya keluar dari persembunyiannya sambil melakukan penyerangan terhadap Belanda. Pasukan Haji Hasan bersenjata keris, tombak dan taawu (parang panjang). Karena penyerangan secara mendadak pihak Belanda menjadi panik sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk membalas serangan, menyebabkan timbulnya korban jiwa yang cukup banyak dan yang masih hidup lari meninggalkan medan pertempuran.⁴⁾

Belanda merasa malu akibat kerugian yang diderita dari penyerangan Haji Hasan. Diuturlah cara pengepungan yang ketat sehingga Haji Hasan terpaksa hidup berkelana sambil mengatur siasat. Jika terancam di daerah Kolaka ia berpindah ke daerah Luwu demikian pula seterusnya siasat melepaskan diri dari kepungan Belanda, sambil mengatur siasat gerilya. Beberapa kali Haji Hasan terjebak dalam kepungan Belanda namun masih sempat meloloskan diri. Pada suatu pengepungan Belanda di sekitar kampung Lasusua, pasukan Haji Hasan melancarkan perlawanan di suatu muara sungai. Perlawanan dipimpin oleh Toindera, komandan pos di muara sungai Lasusua. Perlawanan segera dipatahkan oleh Belanda. Pada saat perlawanan Toindera di muara sungai, Haji Hasan dengan beberapa pengikutnya mengatur siasat penyerangan di Rantelimbang, tetapi secara tiba-tiba terjadilah penyerangan yang dipimpin oleh La Tollong dan dibantu La Kampucu. Keduanya adalah pengikut setia Haji Hasan. Dalam penyerangan pasukan Haji Hasan di Rantelimbang ini telah pula menimbulkan korban jiwa di pihak Belanda.⁵⁾ Belanda mundur dan memperkuat pasukan lalu meneruskan pengejaran terhadap Haji Hasan ke daerah Malili, Masamba sampai ke sekitar Palopo. Akhirnya Haji Hasan tertangkap pada tanggal 14 April 1914 di kampung Salubongko, 20 km sebelah utara Palopo. Tertangkapnya Haji Hasan adalah merupakan hasil siasat Belanda menggunakan dua orang pemberani dari S ppeng yang terdiri dari suku Bugis dan kurang diperhitungkan oleh Haji Hasan sebagai musuhnya.

Haji Hasan tertangkap lalu dipenjarakan di Palopo. Ia dipukul dan disiksa berkali-kali. Ia akhirnya meninggal di dalam penjara Palopo karena tidak mau makan makanan yang disediakan yang dianggapnya makanan kafir.

Perlawanan Haji Hasan dilanjutkan oleh Opu Todjabi bekerja sama dengan Pombili. Berkali-kali Todjabi tertangkap dan ditahan tetapi selalu berhasil meloloskan diri dari tahanan. Ia bermarkas di suatu lokasi yang dilindungi oleh gunung batu dan disebut gunung Todjabi. Pada saatnya menyergap Belanda selalu berkesudahan dengan kekecewaan di pihak musuh, sebab Opu Todjabi tidak dimakan besi ataupun peluru. Tetapi lama-kelamaan usaha pengejaran Belanda kian berkurang dan Todjabi menetap saja dalam markas perlingkungannya tidak lagi menghiraukan kejadian di luar kediamannya. Yang jelas bahwa Opu Todjabi tidak mau berdamai dengan Belanda apalagi akan mengikuti pemerintahan penjajah Belanda. Keadaan itu berlangsung terus sampai Belanda meninggalkan Indonesia setelah dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1942.

Opu Todjabi diperdayakan oleh semboyan Saudara Tua dari Jepang sehingga mau datang ke Palopo pada tahun 1942. Di Palopo ia ditangkap lalu dipenjarakan. Ia disiksa dengan pukulan yang bertubi-tubi dari Harada algojo Jepang dan pada akhirnya meninggal setelah tidak diberi makan dalam penjara selama 10 hari di Palopo, dalam tahun 1943.

Teman Opu Todjabi yang dikenal gelarnya Kapita Pombili mengadakan perlawanan-perlawanan sejak masuknya Belanda di Mekongga pada tahun 1906. Perlawanan yang bersenjata taawi atau parang panjang baik dalam pasukan Haji Hasan maupun Opu Todjabi adalah merupakan pasukan Kapita Pombili. Daerah pengawasannya memanjang dari Mangolo (7 km) sebelah utara Kolaka sampai Laikamborasaa (29 km) sebelah timur Kolaka. Ia mendukung Bokeo Bula (I Bio) raja Mekongga menolak bekerja sama dengan Belanda. Ia selalu membantu Haji Hasan dan Opu Todjabi melawan Belanda, ia sudah banyak pengalaman berhadapan dengan Belanda, antara lain mendampingi Petta Ponggawae mem-

pertahankan wilayah Bone Tengah pada tahun 1905. Pombili memiliki ilmu-ilmu mistik kejantanan, tidak mempan dimakan besi dan tidak dimakan peluru jadi kebal terhadap besi dan peluru.

Pada tahun 1911 terjadilah perlawanan Pombili terhadap Belanda bertempat di Mangolo yaitu suatu tempat yang terletak 7 km sebelah utara Kolaka sekarang. Pasukannya terdiri dari orang-orang Tolaki Mekongga yang bersenjata taawi (parang panjang), tombak dan beberapa laras senjata api kuno. Bersama-sama dengan Opu Todjabi yang bersenjata keris mereka menahan pasukan Marsose Belanda. Pombili memilih pertahanan sekitar sungai Mangolo di dekat sebuah tebing batu. Karena persenjataan yang tidak seimbang pada akhirnya anggota pasukan Pombili terpaksa mengundurkan diri setelah berhasil membunuh beberapa orang tentara Belanda. Opu Todjabi mengundurkan diri ke Lasusua dan Pombili mundur lalu mengatur perlawanan di Puuwonggia yaitu suatu situs yang jaraknya 11 km sebelah timur dari kota Kolaka sekarang. Walaupun Pombili memberikan perlawanan yang sengit namun pada akhirnya Belanda dapat memenangkan pertarungan. Pombili mengundurkan diri ke pedalaman yang kemudian melakukan petualangan ke daerah Konawe. Di daerah Konawe ia berusaha membantu para bangsawan Konawe yang bersiap-siap mempertahankan wilayahnya agar tidak dikuasai oleh penjajah Belanda yang telah memasuki Kendari sejak tahun 1906.

4. Akibat perlawanan

Perlawanan-perlawanan yang dilancarkan oleh Haji Hasan, Opu Todjabi dan Pombili sangat menyakiti hati Belanda, sehingga menyebabkan timbulnya tindakan balas dendam yang berat dipikul. Perlawanan pasukan Haji Hasan di Wawo menyebabkan Belanda menahan Opu Patunru, Andi Baso Lampulle (Anggota Hadat Luwu) dan menangkap serta membunuh siapa saja yang dicurigai. Dengan sergapan Haji Hasan di Lasusua, Belanda mundur lalu menangkap rakyat yang tidak bersalah, Tomadina bersama keluarganya.⁶⁾

Dengan berakhirnya perlawanan-perlawanan rakyat di daerah Mekongga dan pendudukan penjajah Belanda berlangsung maka Mekongga yang tadinya merupakan kerajaan merdeka dijadikan daerah jajahan Belanda yang digabung dengan Luwu. Daerah Mekongga dijadikan Onderafdeeling Kolaka sebagai salah satu Onderafdeeling dalam wilayah Afdeeling Luwu dan diperintah oleh seorang Gezaghebber dengan ibukota Kolaka.

B. PERLAWANAN TERHADAP NETHERLANDS INDIA CIVIEL ADMINISTRATION (NICA)

Perlawanan tersebut merupakan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia atas dasar Proklamasi 17 Agustus 1945.

1. Latar belakang perlawanan

Penjajahan Belanda yang dimulai tahun 1906 sampai dengan berlangsungnya pendudukan Jepang telah menimbulkan kesulitan hidup di kalangan masyarakat Kolaka. Berbagai macam pajak dipikulkan kepada rakyat. Di samping pajak juga kerja dinas yang disebut *heeredienst* dan lain sebagainya, telah menyita sebagian besar waktu yang akan digunakan oleh rakyat untuk berusaha menghidupi keluarganya. Pajak yang tinggi di samping upah buruh yang sangat rendah dalam suasana ketiadaan lapangan kerja menyebabkan taraf hidup rakyat sangat menyedihkan. Rakyat petani tidak bisa mengharapkan hidup dari hasil pertaniannya pengusaha pribumi boleh dikatakan tidak ada, ditambah lagi dengan kemerosotan ekonomi dunia setelah selesai Perang Dunia I, yang mengakibatkan kesulitan hidup yang dikenal dengan istilah populer "zaman malaise" sangat terasa pengaruhnya di daerah Kolaka. Rakyat yang sementara hidup dalam kesukaran ditugaskan lagi membuka jalan raya dengan biaya sendiri tanpa imbalan sedikitpun menambah beban penderitaan yang sangat berat di kalangan rakyat. Suasana hidup sedemikian itu mendorong timbulnya kesadaran rakyat Kolaka untuk meyakinkan bahwa bagaimanapun juga kalau namanya hidup

di bawah telapak kaki penjajah tidak ada kebahagiaan. Keyakinan di atas kesadaran itulah yang telah pula mendorong para pemuda, cerdik-cendekia mengusahakan penggalangan persatuan untuk menghimpun potensi mereka dalam badan-badan perjuangan. Hal inilah yang menyemangati didirikannya organisasi-organisasi Muhammadiyah PSII dan Penyadar pada tahun-tahun tiga puluhan.

Matrigi, seorang Guru Sekolah Klas II (Gouvernement 2 de klas asal Kalimantan bersama-sama dengan Haji Daeng Marakka, Abdurrahim dan M. Sanusi telah mendirikan perkumpulan Hummadiyah (Cabang) di Kolaka pada tahun 1934. Selain itu kepanduan juga didirikan. Usaha-usaha Muhammadiyah diutamakan pada da'wah Islamiyah. Beberapa lama kemudian terbentuklah ranting-ranting Muhammadiyah di Kolaka Utara dan selatan. Di Kolaka bagian utara ranting Muhammadiyah didirikan di Wawo yang dipelopori oleh Muh. Ali Kamry dan A. Madjid Yunus. Didirikan pula ranting Muhammadiyah di Tolala yang dipelopori oleh Petta Rukka, sedangkan di bagian selatan Kolaka ranting Muhammadiyah didirikan di Tangketada pada tahun 1939.

Pada tahun 1935 dibentuklah sebuah organisasi pemuda yang disebut Pemuda Muslimin Indonesia dan berpusat di Lasusua (Kolaka Utara), Pelopornya dikabarkan adalah seorang pensiunan polisi. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1937 Pemuda Muslimin Indonesia berhasil mendirikan sekolah agama yang disebut Sekolah Arab. Dengan ajaran-ajaran agama yang disebarluaskan oleh gerakan-gerakan pemuda baik melalui Perkumpulan Pemuda Muhammadiyah maupun Pemuda Muslimin Indonesia dengan Sekolah Arabnya memberikan corak dan dinamika masyarakat di Kolaka bagian utara. Sisa-sisa gerakan Haji Hasan dan Opu Todjabi turut mewarnai kehidupan masyarakat. Di wilayah Kolaka Utara banyak menghasilkan kopra, rotan dan damar. Wilayah ini agak sulit dijangkau oleh pemerintah penjajah Belanda karena komunikasinya yang sangat sukar. Dengan demikian agak menguntungkan bagi masyarakat pedagang untuk leluasa berlayar keluar daerah misalnya ke Jawa,

Sumatera bahkan kadang-kadang sampai ke Singapura untuk menjual barang dagangannya. Dari pelayaran mereka banyak diperoleh pengalaman dan berita-berita tentang perjuangan pemuda di Jawa dan Sumatera. Pengalaman dan berita-berita yang diperoleh di Jawa dan Sumatera sangat besar manfaatnya untuk mengembangkan usaha-usaha perjuangan mereka. Dari hasil perdagangan hasil bumi itulah salah satu modal dalam menghidupkan organisasi mereka.

Tiga tahun usia Pemuda Muslimin I donesia maka pada tahun 1938 diresmikanlah pembukaan cabang Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pengurusnya berkedudukan di Lasusua, diketahui oleh M. Rahim Daeng Nompo. Rupanya Pemuda Muslimin Indonesia yang didirikan di Lasusua pada tahun 1935 adalah organisasi bawahan (onderbouw) Partai Syarikat Islam Indonesia yang didirikan tiga tahun kemudian. Dengan berdirinya Partai Syarikat Islam Indonesia di Lasusua itu membangkitkan perhatian pemerintah Belanda di Kolaka untuk mengawasi dan mengikuti perkembangannya. Aparat pemerintah sudah sering ditugaskan mengunjungi Kolaka bagian utara. Di antara aparat yang sering ditugaskan ke sana terdapat simpatisan Partai Syarikat Islam Indonesia antara lain Abd. Waris seorang ambtenar yang memangku jabatan Hulp Bestuur Ambtenaar (HBA). Sudah dapat dibayangkan peranan dan pengaruh kedatangannya di Lasusua bertemu dengan para pelopor Partai Syarikat Islam Indonesia di sana.

Pada tahun 1939 Partai Syarikat Islam Indonesia mengalami perpecahan dari pusat sampai ke cabang dan ranting. Di Lasusua mengalami hal yang sama. Beberapa tokoh PSII memisahkan diri lalu mendirikan penyedar pada tahun 1939. Pelopor berdirinya Penyedar di Kolaka Utara itu adalah M. Junus, Makkajareng, Halide Usman, Ibrahim Daeng Massure, M. Rasyid dan Yassir.

Dengan berdirinya penyedar berarti wadah perjuangan bertambah pula, namun sebaliknya pemerintah Belanda semakin meningkatkan pengawasannya terhadap gerakan-gerakan masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya gerakan-

gerakan perjuangan rakyat pemerintah meningkatkan pula bermacam-macam beban pungutan berupa pajak kepala, pajak hasil bumi, kerja rodi dan sebagainya. Belanda memeralat kaum feodal (bangsawan) di daerah Kolaka untuk memeras dan menindas rakyat. Rakyat yang kehilangan daya terpaksa mengungsi ke pedalaman yang sukar dijangkau oleh para penagih pajak. Mereka hidup berkelana di pedalaman seperti suku yang terasing. Kejengkelan mereka terhadap pemerintah dibarengi dengan ketakutan dari aniaya penguasa. Rakyat yang mempunyai kesadaran akibat binaan dari organisasi-organisasi perjuangan lain pula taktiknya. Mereka banyak berlayar meninggalkan daerah yang sibuk dengan penagihan pajak dan bermacam-macam kerja dinas. Dari pelayaran mereka bertambah pengalaman terutama dalam hal peningkatan kesadaran beragama. Dalam keadaan serba tak menentu itu, pecahlah Perang Asia Timur Raya yang biasa disebut Perang Pasifik, 8 Desember 1941. Kedudukan Belanda di Kolaka segera diduduki oleh Nippon (Jepang) setelah tentara Jepang berhasil mendarat di Kendari pada tanggal 24 Januari 1942.⁷⁾

Sebermula rakyat berharap bahwa penggantian tuan yang terjadi setelah kekalahan Belanda dari Jepang, akan membawa angin baru dan suasana hidup yang menyenangkan hati. Harapan itu timbul karena kelihayan Jepang memulai kontakannya dengan rakyat sambil menampilkan kata-kata yang mengumpan hati. Semboyan TIGA A yang sangat populer dan ucapan Nippon-Indonesia sama-sama merupakan therapy yang tepat sekali untuk mengobati kepedihan hati rakyat akibat tindasan pemerintah Belanda. Jepang merupakan saudara tua dari Indonesia ingin membahagiakan kehidupan di Asia Timur Raya, kata orang Jepang. Sebagai saudara tua maka Nippon adalah CAHAYA ASIA, PELINDUNG ASIA dan PEMIMPIN ASIA. Inilah yang disebut TIGA "A" dan dengan semboyan inilah menyebabkan hati rakyat terpukau. Rakyat bersahabat dengan Jepang. Mereka berusaha mendekati pemuka-pemuka Islam yang diketahuinya paling membenci Belanda. Jepang tidak mengadakan

perubahan prinsipil terhadap struktur pemerintahan yang ditinggalkan Belanda kecuali penggantian nama/istilah jabatan, misalnya Kepala Onderafdeeling diganti Bunken Kanrikan; Kepala District diganti Gunco; Kepala Kampung menjadi Sunco; Kepala sekolah menjadi Koco dan lain-lain.

Dalam waktu yang begitu singkat, setelah Jepang melihat bahwa seluruh keadaan telah dikuasainya, mulailah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap menguntungkan kepentingan perang melawan sekutu. Organisasi dan Partai yang ada di Kolaka seperti Muhammadiyah, Sekolah Arab dari PMI, Ranting Syarikat Islam Indonesia dan penyadar di Lasusua dan Wawo serta Tangketada dibubarkan dalam tahun 1943. Rakyat dipaksa bekerja keras, seperti membuka kebun padi, sayur-mayur, tembakau dan sebagainya tetapi hasilnya tidak boleh digunakan sendiri melainkan seluruhnya harus dikumpulkan dan diserahkan kepada Jepang demi untuk memenangkan perang. Rakyat cukup makan ubi-ubian yang tumbuh sendiri di hutan-hutan. Kalau ada kain yang dimiliki rakyat, harus dikuasai oleh dan untuk Jepang. Rakyat harus bersembunyi kalau akan mengisap rokok dari tembakau yang ditanamnya sendiri. Rakyat hanya boleh memakai garam apabila garam yang dibuat sendiri dengan memasak air laut sampai kering membatu. Bila ada garam dari perusahaan harus diserahkan kepada Jepang. Lapangan kerja tidak ada sama sekali, kecuali lapangan kerja paksa (kerja romusha) bagi keperluan perang diwajibkan kepada setiap raga kuat. Akibatnya rakyat hidup kelaparan, miskin melarat penuh kesedihan. Perbendaharaan material rusak, perbendaharaan moral dirusakkan. Tidak sedikit kaum wanita yang dipaksa atau terpaksa hidup sebagai pelayan nafsu tentara Jepang. Bagi rakyat awam kadang-kadang secara tidak sadar mengatakan lebih baik di jaman dulu (di zaman pemerintah Belanda?). Bagi rakyat yang sadar seolah-olah terngiang-ngiang ke telinga panggilan kemerdekaan, lepas kekuasaan asing dan bebas mengatur diri sendiri.

Di puncak penderitaan rakyat di sanalah kekejaman Jepang semakin menjadi-jadi. Mungkin merupakan taktik

mereka untuk melumpuhkan seluruh potensi masyarakat agar "tidak berdaya untuk membangkang dan menentang kekuasaan Jepang, kemudian dengan leluasa dibentuk masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat Asia Timur Raya di bawah lindungan dan pimpinan Dai Nippon (Jepang). Para pemuda baik yang duduk di bangku sekolah maupun yang tidak ditanami dengan semangat patriotisme Jepang. Mereka dilatih sebagai militer melalui latihan-latihan pemuda yang disebut Seinendan malah ada di antaranya yang dilatih menjadi Heiho (Pasukan Pembantu Militer Jepang). Dari latihan-latihan ini berhasil dicapai pembentukan disiplin yang kuat di kalangan pemuda. Di samping itu keterampilan menggunakan senjata api telah pula dikuasai oleh para pemuda.

Perang berjalan terus. Dari Perang Asia Timur Raya berkembang menjadi perang Dunia II. Di front barat (Eropah) Italia dan Jerman akhirnya terdesak kalah pada tahun 1943/1944, sedangkan di front Pasifik, ternyata Jepang tidak mampu menahan serangan Amerika/Sekutu. Pada saat-saat menghampiri kekalahan, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah selesai perang. Janji-janji tersebut walaupun mungkin hanya taktik pura-pura belaka, namun dapat diketahui secara luas di kalangan masyarakat. Rakyat yang sudah sangat menderita, dengan menerima berita janji kemerdekaan itu mengimpikannya seolah-olah akan kedatangan juru selamat. Walaupun demikian para pemuda di Kolaka tidak begitu yakin akan janji Jepang, kecuali yang dipastikan bahwa perang hampir berakhir dengan kekalahan Jepang.

Jika kenyataan membuktikan bahwa Jepang kalah, maka pada saat itulah suatu kesempatan yang paling baik untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa merdeka. Diadakanlah persiapan-persiapan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan dari tangan Jepang.

Dalam bulan Juli 1945, dibentuklah di Kolaka, sebuah panitia yang bersiap-siap akan menerima kemerdekaan yang dinantikan saatnya. Panitia tersebut disebut Gerakan Kemer-

dekaan Rakyat (GKR). Dari panitia tersebut terdapat beberapa tokoh di antara adalah :

1. Andi Kasim, Kepala Pemerintahan Kolaka
2. M. Jufri
3. Ch. Pingak
4. M. Rasyid
5. Tahrir
6. Abd. Wahid R
7. Abubaedah
8. Andi Punna
9. M. Ali Kamry

Panitia tersebut dilengkapi dengan organisasi ketentaraan yang terdiri dari empat pasukan. Pimpinan pasukan-pasukan tersebut, masing-masing adalah Angi Punna, Tahrir, M. Ali Kamry dan H. Abd. Wahid Rahim. Setelah Jepang kalah perang dengan pernyataan menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 dan disusul dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasa Jepang di Kolaka berinisiatif menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah setempat. Sebelum penyerahan dilaksanakan, bahkan Andi Kasim langsung bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Kolaka.

Atas dorongan para pemuda, Andi Kasim mengumumkan bahwa Kolaka adalah wilayah Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 1945. Para pemuda yang mendorong Andi Kasim agar mengumumkan Kolaka sebagai wilayah RI adalah pemuda yang gerakannya dan organisasinya segera dibentuk setelah diterima berita kekalahan Jepang. Gerakan Pemuda itu disebut Pembela Tanah Air (Peta) yang tujuan pertamanya ialah merebut senjata Jepang. Beberapa saat kemudian Peta dirobah menjadi API (Angkatan Pemuda Indonesia), yang dengan terang-terangan menggalang kesatuan pemuda Republik. Setelah pengumuman Andi Kasim pada 17 September 1945 organisasi pemuda Kolaka dirobah lagi namanya dari API menjelma menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia)

Komposisi dan personalia kepengurusan Pemuda Republik I donesia (PRI) Kolaka adalah sebagai berikut :

- I. Pelindung/penasihat : 1. Andi Kasim (Petor Kolaka)
2. Supu Jusuf (AIB Kolaka).
- II Ketua : Andi Kamaruddin
Wakil Ketua : Tahrir
Penulis I : Ch. Pingak
Penulis II : Hanimase
Bendahara : Abd. Rasyid.
Pembantu-pembantu : 1. Indumo Dg. Makkalu
2. Andi Baso Umar
3. Andi Panrangrang
- III. Bagian-bagian (departemen)
 1. Penerangan :
Ketua : M. Jufri
Wakil : Abd. Rahim
wakil : H. Basir.
 2. Propaganda : I M. Ohyver.
 3. Keamanan/pertahanan : H. Abd. Wahid Rahim
 4. Penyelidik : Andi Punna
 5. Perbekalan : Indumo Dg. Makkalu
 6. Perhubungan : M. Junus Makkajarang.
 7. Kesehatan (Palang Merah)
 - Ketua : dr.Mahyu Kwi (Kwi Hoat Yu)
 - Wakil : Benyamin Gulu
 - Wakil : Wempi Sumilat
 8. Kepolisian : Usman Effendi
 9. Persenjataan : Lappase
 10. Penggalang massa : M. Jufri
- IV. Dewan Pertimbangan : 1. Opu Tompanangi
2. H. Mahdi
3. Baso Umar
4. H. Abd. Rahman
5. Muh. Nurung.

Pemuda Republik Indonesia membentuk pula suatu badan kelayakaran yang disebut Pembela Keamanan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh M. Joseph dibantu oleh Sarilawang, M. Billibao dan I.M. Ohyver.⁸⁾ Para pemimpin PKR ini adalah bekas tentara KNIL yang dipekerjakan Jepang di tambang nikel Pomalaa. Dengan kesadaran mereka bertekad akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan organisasi PRI inilah yang menggerakkan semangat perjuangan dan menggalang kekuatan pemuda dan rakyat Kolaka memberi bentuk atas kemerdekaan yang telah diumumkan baik atas dasar proklamasi 17 Agustus 1945 maupun dengan pengumuman Pemerintah Kolaka pada tanggal 17 September 1945.

Di Kolaka, bendera Merah Putih telah dikibarkan dengan iringan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada tanggal 17 September 1945. Atas usaha PRI di Kolaka bendera Merah Putih telah pula dikibarkan di Wawotobi (Kendari) pada awal bulan Oktober 1945, di Kota Kendari pada akhir Oktober 1945 demikian pula di Andoolo (Kendari) dan BoEpinang (Moronene/Buton) sempat dikibarkan bendera kebangsaan Indonesia oleh pemerintah dan rakyat setempat. Tempat-tempat yang sudah mengibarkan bendera Merah Putih terus mengadakan kontak dengan PRI dan Pemerintah Republik di Kolaka. Di wilayah hukum pemerintah Kolaka rakyat dan pemudanya disiagakan menghadapi segala kemungkinan. Dibentuklah cabang-cabang PRI dan kompi-kompi PKR di wilayah Distrik dan di desa-desa. Nampaknya seluruh rakyat mendukung pengumuman Kepala Pemerintahan Kolaka (Andi Kasim) menyatakan bahwa Kolaka adalah wilayah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengurus PRI Cabang terdapat di beberapa tempat antara lain :

1. Di Lasusua dengan anggota-anggota pimpinan :
 - a. M. Rasyad (tokoh PSII)
 - b. Hasyim Pangerang
 - c. Hamzah Pangerang
 - d. Mahmud Dg. Sisila

- e. M. Jassir
 - f. Abd. Manan
2. Di Wowo dan sekitarnya (Wowo, Ranteangin, Lambai/Pueuhu, Wolo dan Alaaha) atas inisiatif Muh. Ali Kamry dan M. Jufri dibentuk pula pengurus gabungan dengan susunan :
- a. Pemimpin umum : Moh. Ali
 - b. Penerjang : A. Madjid Yunus
 - c. Wakil Penerjang : Moh. Kasim

Demikian pula di tiap kampung dibentuk pengurus PRI, misalnya di kampung Wowo yang dipimpin oleh Moh. Ali selaku Ketua, di Ranteangin diketahui oleh Moh. Kasim, di Lambai/Porebu diketuai oleh Hasan Dg. Katareng, di Woimendaa diketuai oleh Pabolloi, di Wolo diketuai oleh Abd. Wahab Dg. Pasele dan di kampung Alaaha diketuai oleh H. Muh. Sanusi.

Organisasi kelayakan Pembela Kemerdekaan Rakyat (PKR) menempatkan kompi-kompi pasukan antara lain di Wundulako dengan tokoh-tokoh :

- a. Konggoasa
 - b. Latumaa
 - c. Lambido
 - d. Satula
 - e. Guro
- di Rate-Rate dengan tokoh-tokohnya :
- a. Moh. Nur Latamoro
 - b. H. Supu
 - c. A. Hamid
 - d. LapaE
 - e. Azis Manu
- di Tawanga dengan Tokoh-tokohnya :
- a. J. Poapa
 - b. Darius Tonga
 - c. Lahasa
 - d. Larumasa
 - e. Tabou alias Abubakar

di Alaaha/Andolaki dengan tokoh-tokohnya :

- a. Lele
- b. Dulahi
- c. Sumanga
- d. Djudda
- e. M. Tahir

di Tongauna dengan tokoh-tokohnya :

- a. Putete
- b. Palangga
3. Tawahe
dan lain-lain.

Selain dari pada itu terdapat pula satu kompi yang berkedudukan di Andoolo (termasuk wilayah Kendari Selatan) dengan tokoh-tokoh yang dikenal antara lain :

- a. Moh. Ali SilondaE
- b. Abdullah SilondaE
- c. AburaEra SilondaE
- d. Saiman
- e. Saradia
- f. Nuhung SilondaE (Kepala Distrik Andoolo)
- g. Jakub SilondaE

Setelah tersusun organisasi Pembela Kemerdekaan Rakyat (PKR), datanglah kebutuhan yang sangat menentukan yaitu senjata anggota pasukan. Beberapa kali pihak Pemuda Republik Indonesia (PRI) bersama PKR berkonsultasi dengan Komandan Tentara Jepang di Pemalaa untuk mendapatkan senjata namun tidak berhasil diperoleh. Alasan Komandan Tentara Jepang (Kabisima Taco) karena inventaris peralatan dan persenjataan telah dilaporkan untuk diamankan oleh Sekutu (Australia) yang akan datang ke Sulawesi Tenggara. Timbullah tekad PRI/PKR akan mengambil senjata Jepang dengan cara kekerasan. Tekad para pemuda segera diketahui oleh Kabasima Taco. Untuk menghindari kemungkinan gempuran dari rakyat Kolaka, Kabisima Taco memerintahkan kepada tentaranya membuang ke laut dangkal sejumlah 50 pucuk senjata L.E. bersama dengan sejumlah peluru. Kejadian tersebut diketahui oleh para pemuda. Segeralah diadakan

usaha pencarian dengan mengadakan penyelaman senjata di tempat pembuangannya dan berhasil ditemukan seluruhnya. Senjata-senjata tersebut segera dibagikan kepada anggota PKR dan dilakukan latihan-latihan kemiliteran yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pemuda yang berasal dari bekas KNIL dan Heiho antara lain ialah M. Joseph, M. Billibao, Sarilawang, H. Abd. Wahid. Pelatih utamanya adalah M. Joseph. Pusat latihan ditempatkan di kampung Silea/Wundulako.⁸⁾

Dalam keadaan sibuk-sibuknya PRI/PKR mempersiapkan diri tiba-tiba mendarat di Kendari tentara Australia yang datang dari Makassar. Pendaratan Australia di Kendari terjadi pada awal bulan Nopember 1945. Kedatangan Australia adalah membawa tugas dari Sekutu sebagai pihak pemenang perang Dunia II. Tugas yang diembannya ialah untuk melucuti senjata Jepang dan menjaga keamanan di wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi sayang sekali karena di belakang tentara Australia membonceng personal-personal Belanda yang menyebut dirinya N.I.C.A. (Netherlands Indie Civil Administration). Dengan kekuatan satu pleton pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Wolhoff, Belanda kembali untuk menegakkan kekuasaan tradisional selaku penjajah di alam Indonesia Merdeka berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Rakyat Kolak dengan pimpinan Pemerintahnya yang telah mengumumkan bahwa wilayahnya adalah wilayah Republik Indonesia sangat prihatian dan waspada terhadap kedatangan Australia karena telah diketahui maksud pemboncengan personal Belanda (N.I.C.A) datang kembali ke Indonesia. Keprihatinan itu mendorong usaha meningkatkan kesiapan untuk mempertahankan Republik Indonesia di Kolaka dengan cara apapun juga. Latihan kemiliteran diperluas di kalangan pemuda dan rakyat disiagakan dengan senjata, parang, tombak, bambu runcing, keris dan sebagainya.

Seluruh rakyat terutama kaum pria diwajibkan mamakai lencana Merah Putih yang disematkan di bagian dada baju atau pada kopiah. Pekikan "merdeka" terdengar ramai di

kalangan masyarakat luas. Seolah-olah tiada yang memikirkan mati di ujung senapang musuh. Para juru penerang menyuarakan: lebih baik mati bercampur tanah daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah.

Dengan perintah dari pimpinan pemerintahan Kolaka diadakanlah penyiapan bekal berupa bahan makanan untuk persiapan perang, jika ternyata Belanda akan menginjak-injak kehormatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya wilayah Republik Indonesia di daerah Kolaka. Apa yang dipersiapkan pemerintah dan rakyat Kolaka pada akhirnya menjadi kenyataan. Perlawanan rakyat Kolaka selaku bagian dari perang kemerdekaan mempertahankan dan membela Proklamasi 17 Agustus 1945 akhirnya tak dapat dihindari lagi. Lahirlah perlawanan rakyat Kolaka terhadap kekuatan Belanda/N.I.C.A.

2. Wujud perlawanan

Akibat penderitaan rakyat yang dialami baik selama penjajahan Belanda maupun penduduk fascisme Jepang telah menyadarkan rakyat Kolaka menerima hangat berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan mengumumkan bahwa Kolaka adalah wilayah Republik Indonesia. Seluruh rakyat berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia dan mendukung sepenuhnya pengumuman Kepala Pemerintah Kolaka pada tanggal 17 September 1945 bahwa daerah Kolaka adalah wilayah Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlawanan yang terjadi di daerah Kolaka merupakan perlawanan seluruh rakyat yang dipelopori oleh golongan pemuda. Pada mulanya perlawanan merupakan kontak senjata secara frontal, walaupun diketahui bahwa kekuatan persenjataan tidak seimbang. Setelah keadaan medan banyak dikuasai musuh, perlawanan dilakukan secara bergerilya yang diselingi dengan penyerangan-penyerangan secara terbuka. Taktik demikian cukup merepotkan Belanda, walaupun kemudian mereka berhasil menduduki seluruh wilayah Kolaka pada awal tahun 1948.⁹⁾

3. Jalannya perlawanan

Pada hari-hari pertama kedatangan Australia di Kendari, Kapten Wolhoff bekas Controleur Kendari yang melarikan diri ke Australia selama Perang Dunia II, sebagai pemimpin kekuatan N.I.C.A. segera memulihkan kekuasaan Belanda. Untuk menghimpun kembali kekuatan tentaranya, dikumpulkanlah bekas-bekas KNIL yang ditempatkan Jepang di kamp-kamp tawanan lalu dipersenjatai kembali. Pada saat itu sebagian besar bekas tentara KNIL dipekerjakan Jepang pada pertambangan nikel di Pomalaa. Direncanakanlah penjemputan mereka di Pomalaa dengan memberangkatkan sepasukan tentara N.I.C.A. Agar tidak mengalami kesulitan, direncanakan pula agar pasukan yang dikirim nanti harus memakai seragam sekutu (Australia).

Berita tentang rencana kedatangan tentara N.I.C.A. diterima oleh PRI Kolaka pada tanggal 16 Nopember 1945. Segera dihubungi Kabasima Taico/Kemondan tentara Jepang di Pomalaa tentang kebenaran berita itu. Dari Kabasima Taico diperoleh berita pasti bahwa tentara N.I.C.A. akan tiba di Pomalaa pada tanggal 19 Nopember 1945 sekitar pukul 09.00 pagi.

PRI segera mengadakan rapat pimpinan. Keputusan rapat menetapkan bahwa N.I.C.A. tidak diizinkan memasuki wilayah Kolaka kecuali dengan izin Kepala Pemerintah Kolaka. Persiapan dan kesiagaan ditingkatkan baik dalam kota maupun sepanjang jalur hubungan ke Pomalaa. Yang dipertanyakan bagaimana sikap terakhir dari anggota-anggota bekas KNIL yang berada di Pomalaa. Untuk mengetahui itu maka subuh tanggal 19 Nopember 1945 berangkatlah ke Pomalaa Andi Kasim (Kepala Pemerintah Kolaka) bersama seorang pimpinan PRI yaitu Tahrir dan di sana diadakanlah pertemuan dengan para bekas KNIL. Semua anggota bekas tentara KNIL menyatakan tetap setia pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti M. Joseph, M. Billibao dan Sarilawang malah sudah menjadi pelatih kemiliteran PKR yang dipusatkan di kampung Silea. Antara pemerintah Kolaka, pemimpin PRI Kolaka dengan para

anggota bekas KNIL menetapkan tekad bersama akan menentang dan mencegah kedatangan-kedatangan N.I.C.A. ke dalam wilayah RI Di Kolaka. Diputuskanlah akan menghadang pasukan N.I.C.A dan ditetapkan Kampung Baru (Kombobaru) yang terletak 8 km dari Kolaka menjadi tempat penghadangan. N.I.C.A. tidak akan diizinkan masuk Kolaka atau Pomalaa. Persiapan perlawanan diatur dan barisan pengempur disiagakan pagi hati itu. Menurut Ch.Pingak bahwa sejak pagi hari tanggal 19 Nopember 1945, rakyat sudah berduyun-duyun dengan berjalan kaki menuju Kambobaru (Kampung Baru) 8 km dari Kolaka. Mulai dari kota sampai sepanjang jalan menuju km 8 telah diadakan pos-pos pertahanan. Segala jenis kendaraan darat seperti oto, sepeda dan lain-lainnya dipersiapkan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan perang dan untuk membawa berita. Yang sukar diatur ialah rakyat banyak yang begitu meluap-luap semangatnya untuk menggempur N.I.C.A. sehingga mereka tinggal di jalan di tempat terbuka stelling sudah diatur di tepi jalan yang waktu itu masih berhutan lebat. Yang lucu ialah bahwa senjata api berkelebihan, sedang yang tahu mempergunakannya terbatas jumlahnya. Senjata dibagikan pada para bekas KNIL dan Heiho yang ada, serta mereka yang biasa berburu rusa dan binatang hutan lainnya. Para pemuda yang belum dilatih kemiliteran dan belum tahu mempergunakan senjata tidak mau ketinggalan mengambil bagian dalam pertempuran yang bakal terjadi. Mereka itu minta supaya diberikan senjata. Agar tidak mengendurkan semangat juang pemuda-pemuda yang sementara berkobar-kobar dan memuncak itu maka diberikan senjata. Untuk itu diadakan latihan kilat bagaimana mempergunakan senjata yaitu bagaimana memasukkan peluru dan cara menembaknya kepada musuh, teori akan dipraktekan sebentar dalam pertempuran yang akan terjadi. Pemuda-pemuda sudah dilatih sudah disebarakan ke desa-desa. Pasukan PKR yang bersenjatakan tombak, parang, bambu runcing dan sebagainya diatur dalam stelling-stelling di sepanjang jalan antara km 8 ke jurusan Wundulako. Tenaga yang dikerahkan di waktu itu kurang

lebih 1.000 orang. Melihat suasana yang kurang menguntungkan maka dikirim seorang kurir ke Pomalaa untuk menemui Pemerintah (Andi Kasim) dan Pimpinan PRI (M.Tahrir) yang pergi menemui bekas-bekas KNIL di Pomalaa dan Huko-Huko untuk memberikan laporan dan meminta supaya segera ke front. Sementara itu beberapa pohon ditebang di tepi jalan untuk menghalangi kedatangan NICA, agar mereka tidak langsung ke Pomalaa. Di dekat pohon yang ditebang itu yaitu pada tempat ketinggian yang tersembunyi oleh hutan telah dipasang stelling untuk menggempur NICA.

Untuk menghadapi kedatangan NICA itu Oleh Kepala Pemerintah Kolaka (Andi Kasim) dan Pimpinan PKR Kolaka (Tahrir, Ch.Pingak, H.Abd.RAHim, Andi Punna dan I.M. Ohijver) diputuskan untuk menempuh dua cara yaitu :

- a. Dengan berunding; jika gagal,
- b. Digempur.

Dalam usaha untuk tidak meluaskan NICA memasuki wilayah Kolaka dan mengambil KNIL dari Pomalaa dan Huko-Huko.

Diputuskanlah, dalam pertemuan tersebut tentang syarat perundingan dengan NICA yaitu :

- Kalau mendapat tugas dari Sekutu, harus memperlihatkan surat perintah.
- Jika tidak ada surat perintah harus kembali ke Kendari.
- Kalau NICA (sekutu) berkeras untuk ke Pomalaa, mereka harus menyerahkan senjata pada Pemerintah RI di Kolaka untuk dititip dan dapat diambil kembali jika kembali ke Kendari.

Ternyata setelah tentara NICA berunding dengan Andi Kasim yang disaksikan oleh Abu Baeda dan beberapa kawan semua persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi, tetapi mereka berkeras untuk terus ke Pomalaa. Kekuatan tentara NICA sekitar satu pleton yaitu 3 truk ditambah dengan satu sedan Paccard yang ditumpangi oleh Letnan John Boon yang bertindak sebagai komandan pasukan. Namun perundingan gagal, tentara NICA terus dilepas untuk terus ke Pomalaa.

Bekas KNIL di Pomalaa dan Huko-Huko tak seorangpun yang mau dibawa kembali ke Kendari oleh NICA. Malah setelah dikunjungi oleh tentara NICA dan sementara tentara NICA masih di Pomalaa banyak diantara bekas KNIL di bawah pimpinan M. Joseph segera ke km 8 dengan kendaraan yang telah disediakan dan menggabung ke dalam pasukan penggempur. Sementara tentara NICA yang mengaku sebagai tentara sekutu (Australia) menuju ke Pomalaa, pasukan PKR Kolaka di Kampung Baru mengatur siasat penyerangan. Pimpinan atau Komandan pertempuran diserahkan kepada H. Abd. Wahid.

Pada waktu akan kembali mereka minta ditemani oleh tentara Jepang sebanyak satu truk dengan kekuatan satu platoon. Rupanya PKR di Kambo Baru (km 8) sudah siap. Tidak diduga oleh NICA bahwa mereka akan berani melawan. Rupanya dugaan yang salah itu menyebabkan kesulitan yang mengecewakan.

Setiba tentara NICA Belanda di km 8, dengan tiba-tiba mereka diserang dan diserbu oleh pasukan PKR. Serbuan orang banyak dan tembakan-tembakan yang gencar dari pihak PKR menimbulkan kepanikan pasukan NICA sehingga hampir saja tidak bisa membalas serangan. Tentara Jepang yang menyertai pasukan NICA dengan segera menyebar sedangkan pasukan NICA terpaksa lari kocar-kacir ke dalam hutan diburu oleh rakyat dan pemuda yang bersenjatakan parang, keris, tombak dan bambu runcing. Komandan NICA, Letnan J. Boon berhasil meloloskan diri, tetapi sembilan hari kemudian yaitu pada tanggal 28 Nopember 1945 tertangkap di LoEya Rate-Rate (sekitar 50 km dari Kolaka).¹⁰⁾

Pada peristiwa tanggal 19 Nopember 1945 itu, pasukan NICA dikocar-kacirkan oleh pasukan PKR Kolaka. Senjata dan perlengkapannya dapat dirampas. Kerugian yang diderita NICA sebagai berikut :

- 2 orang tewas;
- 2 orang ditawan;
- dirampas 4 truk, 1 buah sedan, 6 pucuk jungle, 2

pucuk L.E, 3 pucuk pistol, bayonet, granat, parang Australia, topi waja, ransel-ransel dan beberapa dokumen penting.

Disamping itu ditawan pula tentara Jepang sejumlah satu pleton. Di pihak PKR Kolaka diderita kerugian; satu orang gugur dan satu orang luka berat.

Letnan J.Boon setelah menghutun beberapa hari lamanya, akhirnya ditemukan oleh Abd.Halik, Kusoi, Hudaini dan Salaga di sungai Nango-Nango/LoEya akhirnya dengan cara tipu daya mereka menawan dan menyerahkan ke tangan PKR di Rate-Rate lalu dibawa ke Kolaka dan dipenjarakan di sana. ¹¹⁾

Dari penawan Letnan J.Boon disita senjata berupa satu pucuk pistol, sepucuk jungle dan satu buah granat tangan. ¹²⁾

Dengan penawanan Letnan J.Boon beserta dua orang pasukannya merupakan bukti bahwa Pemerintah RI di Kolaka tidak bisa dianggap ringan oleh Belanda. Untuk membebaskan mereka dikirimlah dari Kendari satu delegasi yang terdiri orang-orang Jepang dengan memakai tanda Palang Merah dan bendera Merah Putih, datang menemui Pemerintah Republik Indonesia di Kolaka sambil mengajukan permintaan :

- mayat korban pertempuran diterima untuk dibawa ke Kendari;
- pembebasan tawanan; dan
- pengembalian semua peralatan dan perlengkapan yang jatuh ke tangan PKR Kolaka.

Permintaan tersebut ditolak oleh Pemerintah dan Pimpinan PKR. Penolakan atas misi damai Jepang oleh Pemerintah RI di Kolaka didasarkan atas pendapat bahwa urusan tersebut adalah urusan antara Pemerintah RI dengan Sekutu (Australia). Walaupun demikian atas kemurahan hati Pemerintah RI, masih sampai meluaskan mengambil mayat-mayat tentara NICA yang gugur dalam peristiwa 19 Nopember 1945 untuk dibawa ke Kendari. ¹³⁾

Tentang tentara Jepang yang ditawan sejumlah satu pleton, setelah dilucuri mereka dibebaskan kembali ke Pomalaa dengan peringatan dari pemerintah RI supaya tidak ikut-ikutan mencampuri persoalan yang timbul antara Pemerintah RI dengan Australia yang datang melindungi kepentingan penjajah Belanda. Kepada delegasi Jepang yang datang dari Kendari juga diperingatkan agar tidak membantu Belanda dalam usaha menentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan harus mengetahui bahwa wilayah Kolaka adalah termasuk wilayah Republik Indonesia

Pada tanggal 26 Nopember 1945.¹⁴⁾ Pemerintah RI di Kolaka menerima sebuah kawat dari Makassar yang berasal dari pucuk pimpinan tentara Australia melalui Komandan tentara Jepang di Pomalaa. Kawat tersebut memberitahukan bahwa tentara Australia akan datang di Kendari. Setelah kawat itu diterima oleh Pemerintah RI di Kolaka, segeralah diadakan pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan PKR/PRI Kolaka dan dengan pimpinan-pimpinan PKR/PRI Luwu yang kebetulan sementara berada di Kolaka. Hasil-hasil pertemuan memutuskan sebagai berikut :

1. Tentara Australia diperbolehkan datang ke wilayah Kolaka, tetapi pertemuan diadakan di Pomalaa dan ruang gerak tentara Australia dibatasi sepanjang radius 1 km dari tempat perundingan.
2. Datu Luwu/Palopo supaya dibawa serta dalam perundingan, karena Kolaka adalah wilayah Kerajaan Luwu sejak tahun 1907.

Persyaratan dari hasil perundingan tersebut disampaikan kepada pimpinan tentara Australia di Makassar melalui Komandan tentara Jepang di Pomalaa. Beberapa hari kemudian tibalah kawat balasan yang menyatakan bahwa persyaratan diterima dan tentara Australia akan datang ke Pomalaa pada tanggal 19 Desember 1945.¹⁵⁾

Untuk menghadapi perundingan dengan tentara Australia, Kepala Pemerintah RI di Kolaka berunding dengan

pimpinan PRI Kolaka dan Pimpinan PRI Luwu yang kebetulan sedang berada di Kolaka. Maka disusunlah delegasi yang akan mendampingi Datu Luwu sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Kerajaan Luwu untuk menghadapi utusan tentara Australia. Delegasi itu terdiri dari :

- a) Andi Kasim, Kepala Pemerintah RI di Kolaka
- b) Andi kamsruddin, Ketua Umum PRI Kolaka
- c) Dr Kwa Hoat Yu, Bagian Kesehatan/Palang Merah PRI Kolaka.
- d) A Akhmad, Kepala Polisi Istimewa PRI Kolaka
- e) M Sanusi Dg. Mattata, Kepala Penerangan PRI Luwu.¹⁶⁾

Datu Luwu kemudian dalam perundingan ini mengirim 2 orang utusan yang datang bersama sama dengan tentara Australia yaitu:

- (1) Andi Mappanyompa, Opu Tomarilaleng Kerjaan Luwu.
- (2) M.A.Azikin, Sekretaris I PRI Luwu yang bertindak sebagai juru bahasa.

Sebelum perundingan diadakan dengan Australia, delegasi Kolaka berkesempatan mengadakan pertemuan dengan utusan Datu Luwu. Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan sebagai berikut.¹⁷⁾

1. Letnan J.Boon adalah seorang tawanan perang dan didakwa oleh Pemerintah RI (di KOLAKA pen) sebagai pengacau keamanan karena memasuki wilayah RI di Kolaka tanpa izin dan menggunakan senjata api dan tidak patuh pada persyaratan yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya sehingga menimbulkan kekacauan dan gangguan keamanan, sedang sekarang adalah keadaan damai. Letnan J.Boon juga dituduh telah melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia.
2. Kalau Australia menuntut senjata yang digunakan dalam pertempuran maka senjata itu sekarang berada di tangan

rakyat yang sudah merdeka dan tidak menginginkan negara dijajah oleh siapapun.

3. Mengenai masalah tawanan akan diserahkan resmi sebagai tawanan perang kemerdekaan dengan saran akan dipertukarkan dengan tawanan pemuda pejuang di Palopo. Sebagai langkah pertama maka Letnan J.Boon akan dibawa menghadap Australia sebagai terdakwa yang menggggu keamanan daerah Kolaka.

Sehari sebelum kedatangan tentara Australia terjadi suatu peristiwa yang hampir saja membahayakan kedudukan Pemerintahan RI di Kolaka dalam menghadapi tentara Australia yaitu tindakan sepihak dari sementara pemuda yang menculik Letnan J. Boon untuk dibunuh. Untung saja tindakan ini dapat diatasi oleh pimpinan pemuda.¹⁸⁾

Memang di kalangan pemuda timbul kegelisahan atas kedatangan Australia ke Kolaka. Malah mereka mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang terawat. Semua kekuatan dikerahkan dan rakyat disiagakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan pimpinan pemerintahan Andi Kasim dan pucuk pimpinan PRI menghendaki pembuktian adanya pemerintahan RI di Kolaka yang syah dan berdaulat dan menginginkan Australia menghormati kedaulatan ini.

Pada hari perundingan akan diadakan (pukul 14.00 – siang) di Pomalaa, di sekitar Pomalaa dipenuhi oleh pemuda, malah M. Joseph dan pasukannya berada tidak berapa jauh dari pesanggarahan tempat perundingan akan diadakan.¹⁹⁾ Malah rakyat berbondong-bondong dengan segala macam senjata telah memenuhi jalan antara Kolaka – Pomalaa.²⁰⁾ Keselamatan Letnan J.Boon dikhawatirkan ketika akan dibawa ke Pomalaa sehingga harus disembunyikan dengan ditutupi terpal. Pemuda dan rakyat Kolaka yang cinta kemerdekaan dan cinta RI telah bertekad untuk menghadapi siapa yang akan mengancam kemerdekaan. Pukul 14.00 perundingan dimulai. Delegasi Luwu/Kolaka dipimpin oleh Andi Mappanyompo (wakil dari Luwu) dan Andi Kasim Kepala Pemerintah RI di Kolaka, sedangkan Australia dipimpin oleh seorang perwira yang berpangkat Kapten.

Delegasi Luwu/Kolaka berjumlah 7 orang dan Australia juga terdiri 7 orang.

Dalam perundingan Letnan J.Boon dihadirkan pula. Delegasi Kolaka mula-mula menggambarkan kesalahan Boon, sementara tentara Australia tidak dapat membuktikan malah mengingkari bahwa J.Boon ke Pomalaa untuk menjemput bekas KNIL atas perintah Australia. Delegasi Luwu/Kolaka dalam kesempatan itu dapat pula menunjukkan dan meminta konfirmasi dari tentara Australia tentang selebaran Australia yang berbunyi sebagai berikut :^{2 1)}

- Australia tidak mencampuri urusan pemerintahan;
- NICA itu adalah pegawai Australia;
- Tidak boleh NICA melakukan sesuatu hal jika tidak diperintahkan Australia.

Delegasi Luwu/Kolaka adalah delegasi pemerintah yang menghormati hak-hak yang dikandung dan dihormati dalam kedaulatan pemerintahan. Sedangkan delegasi Australia adalah delegasi militer yang telah memperoleh perintah-perintah militer yang harus dilakukan sesuai perintah. Berdasarkan tugas ini maka Australia memajukan tuntutan sebagai berikut:^{2 2)}

1. Tawanan harus diserahkan;
2. Pemerintah RI di Kolaka harus dapat menyerahkan 50 pucuk senjata api yang digunakan ekstermis dalam peristiwa 19 Nopember 1945;
3. Kepala Ekstermis harus diserahkan;
4. Harus tunduk dan patuh pada Pemerintah Jepang atas nama Australia.

Kepala Pemerintah RI di Kolaka menyadari delegasi Australia adalah delegasi militer yang bekerja atas perintah yang mutlak dilaksanakan dan dipatuhi, tetapi kedaulatannya harus pula dihormati. Syarat pertama disetujui dengan permintaan bahwa Australia melepaskan pula 7 orang pemuda Luwu yang saat itu menjadi tawanan Australia di Makasaar. Permintaan ini disanggupi oleh delegasi tentara Australia untuk diurus tetapi tidak memberikan kepastian mengenai

waktu pelepasan mereka dari tahanan. Tuntutan kedua tentang penyerahan 50 pucuk senjata api dijawab oleh Andi Kasim tidak mengetahui ada senjata-senjata sebanyak itu namun bersedia mengadakan pemeriksaan dari rumah ke rumah dalam usaha mencari senjata-senjata tersebut. Rupanya berita tentang PRI Kolaka dapat menyelami dan mengambil senjata-senjata Jepang yang dibuang mereka di pelabuhan Pomalaa pada 10 September 1945 telah diketahui oleh Australia.

Tuntutan ke 3 dan ke 4 sama sekali tidak digubris oleh delegasi Luwu/Kolaka karena apa yang disebutkan ekstermis itu adalah para pejuang kemerdekaan, sedangkan tunduk kepada Jepang merupakan penghianatan terhadap kedaulatan sebagai rakyat merdeka. Hari itu juga Letnan J.Boon diserahkan pada tentara Australia sedangkan tawanan lainnya diserahkan keesokan harinya beserta sebuah karabijn rusak dan sepucuk pistol kepunyaan Letnan J.Boon beserta seberkas prosesverbal pemeriksaan/penggeledahan senjata api dari rumah ke rumah dalam kota Kolaka.

Rupanya yang dipentingkan oleh tentara Australia adanya pembebasan tawanan, karena nyatanya mereka meninggalkan Pomalaa dengan puas, malah meminta beberapa lambang merah putih yang dikenakan di dada delegasi Luwu/Kolaka sebagai kenang-kenangan.^{2 3}) Dengan peristiwa perlawanan 19 Nopember 1945 di Kambo Baru yang berkesudahan dengan penawanan J.Boon dkk. yang menyebabkan kedatangan tentara Australia ke Pomalaa berunding dengan PRI/PKR dipandang sebagai kegagalan Kabasima Taco/Komandan Tentara Jepang di Pomalaa, dalam tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu ia ditampar dan dimarahi oleh pimpinan Tentara Australia. Akibatnya, Kabasima Taco meninggalkan tempat lalu menggabungkan diri dengan para pemuda PKR Kolaka dengan memakai nama samaran Mansyur, lalu berjuang melawan NICA. Ia menjadi pelatih pasukan PKR Kolaka. Bersama dengan Kabasima Taco turut pula dua orang tentara Jepang yang rupanya bertekad tidak mau menyerah kepada

sekutu, lalu memilih jalan untuk bertempur bersama-sama PKR Kokaka sampai mereka gugur di medan tempur.

Pada tanggal 4 Februari 1946 PKR mengirim sebuah eskpedisi bersenjata ke daerah Kendari dengan sasaran kota Wawotobi. Pasukan PKR dipimpin oleh Konggoasa dan M.Djufri, memasuki Wawotobi sekitar pukul 21.00 tanpa perlawanan dari pemuda NICA yang disebut Pembela. Kecuali pimpinan pemuda Pembela melarikan diri ke Kendari dan melaporkan peristiwa Wawotobi kepada penguasa NICA di Kendari. Pasukan PKR menduduki Wawotobi selama tiga jam kemudian kembali pada malam itu juga dengan menawan tiga orang tokoh pemerintahan yaitu Laposudo Kepala Onder District Lambuya, Mohammadati, Juru tulis Kepala Onder District Lambuya dan Mahadini, putera Kepala District Konawe.

Tindakan PKR Kolaka memasuki wilayah Kendari tersebut di atas adalah salah satu tindakan mendahului musuh berhubung dengan tersiarnya berita bahwa tentara NICA segera akan memasuki Kolaka.

Berita masuknya PKR Kolaka di Wawotobi diketahui oleh NICA di Kendari pada malam itu juga. Segera dipersiapkan kekuatan untuk serangan balasan. Pasukan PKR yang kembali dari Wawotobi mengatur pengadangan di Rate-Rate. Pos pertahanan dibagi tiga rayon. Pos pertama dipimpin oleh Joseps, pos kedua dipimpin oleh Abu-baedah, dan pos ketiga dipimpin oleh Konggoasa dan Muh. Nur Latamoro.²⁴)

Pada tanggal 5 Pebruari 1946 wilayah Kolaka dimasuki oleh tentara NICA. Pertahanan PKR di Rate-Rate telah disiagakan. Segera terjadi pertempuran yang sangat dahsyat selama kurang lebih 4 jam.

Pada akhirnya PKR terpaksa mengundurkan diri karena persenjataan yang tidak seimbang. Dari pertempuran sengit itu beberapa orang tentara NICA mengalami luka-luka dan di pihak PKR mendeita kerugian 3 orang tewas yaitu, Djiman, Supardi dan H.Mala. Selain itu Rate-Rate dibumihanguskan oleh tentara NICA.²⁵)

Dari Rate-Rate yang sudah terbakar habis, pasukan NICA menuju Mowewe yaitu suatu ibukota District Lasolewatu. Di Mowewe tidak terjadi perlawanan, tetapi pasukan Konggoasa dan I.M.Ohyver yang berada di situ segera mengundurkan diri ke arah Kolaka sambil mengatur strategi perlawanan berikutnya. Sebaliknya NICA mengatur pula cara untuk menyerang Kolaka pada tanggal 7 Pebruari 1946. Pasukan NICA dipecah dua. Sebagian berjalan kaki dari Mowewe menuju Kolaka melalui jalan pintas dan sebagiannya lagi dengan berkendaraan melalui jalan raya.²⁶) Siasat NICA ini dengan segera dapat diketahui oleh pimpinan PKR sehingga PKR sempat mengatur pasukannya. PKR mengatur pasukannya di luar kota Kolaka yaitu jalan jurusan Kendari di 4 tempat yaitu :

- km 1
- km 4
- km 6
- km 8

Pasukan di km 8 menduduki tempat dimana terdapat sebuah jembatan. Dalam memperebutkan jembatan ini seorang PKR gugur. Di km 6 yang dijaga oleh satu regu PKR di bawah pimpinan A.Punna, pertempuran berlangsung kira-kira setengah jam. Km 4 yang dijaga oleh pasukan bersenjata tajam mendapat serangan sekitar pukul 05.00 subuh. Induk pasukan di km 1 menghadapi musuh sekitar pukul 06.00 pagi hari. Di sini berlangsung pertempuran sengit selama kira-kira 10 jam. Dari pihak PKR 1 orang gugur dan 1 orang luka yaitu penembak bren.

Karena gencarnya serangan musuh dengan peralatan yang lengkap maka PKR pada sekitar pukul 14.00 siang mengundurkan diri dari Kolaka ke arah utara yaitu ke Mangolo dan seterusnya dengan markas berpindah-pindah menuju Kolaka utara.

Kolaka pusat perjuangan dari PRI/PKR yang diumumkan oleh A.Kasim sebagai wilayah Republik Indonesia pada tanggal September 1945 berhasil diduduki oleh NICA pada

pukul 14.00 tanggal 7 Pebruari 1946. Dalam pertempuran di Andolo "Saiman" bekas sersan KNIL yang dengan tegas menolak panggilan Wolhof untuk menjadi tentara Belanda kembali terkepung lalu gugur pada saat itu. Tokoh-tokoh pejuang Andoolo semuanya tertangkap, antaranya Aburaerai SilondaE, Abdullah SilondaE dan Jakob SilondaE sedangkan pimpinannya yaitu M.Ali SilondaE saat itu sedang berada di sekitar Rate-Rate dalam usaha untuk mencari berita tentang pertempuran Rate-Rate. Beberapa hari setelah Andoolo diduduki NICA, M.Ali SilondaE tertangkap di wilayah Rate-Rate.²⁷⁾

PKR Kolaka sambil monsolidasi dalam pengunduran menuju Kolaka Utara (District Patampanua). Pada saat itu A.Jemma Datu Luwu dan anggota-anggota hadatnya beserta keluarga dan para pimpinan PRI/PKR Luwu telah pula mengundurkan diri dari Palopo ke Latowu (District Patampanua). Palopo ibukota Kerajaan Luwu telah pula diduduki NICA sebelum Kolaka direbut.

Pada tanggal 28 Pebruari 1946 pemerintah dan pimpinan PKR Luwu mengadakan rapat dengan pemerintah dan pimpinan PKR Kolaka di Latowu yang dipimpin langsung oleh Datu (Raja) Luwu A.Jermma. Dari pertemuan ini dihasilkan kesepakatan.²⁸⁾

1. Latowu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di Luwu.
2. Badan pemerintahan terdiri dari anggota-anggota Hadat Kerjaan Luwu dengan nama Pusat Keselamatan Rakyat. (PKR).
3. Untuk mendukung Pusat Keselamatan Rakyat dibentuk badan gabungan operasi bersama yang intinya terdiri dari dua kelasykaran yang berasal dari Luwu dan Kolaka yang diberi nama Pembela Keselamatan Rakyat (PKR).
4. Markas ditetapkan Benteng Batu Putih (3 km ke hulu sungai Latowu).

Pusat Keselamatan Rakyat merupakan badan pemerintahan, dan perwujudan dari KNIL. Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi dibentuk pertama kali oleh Gubernur Sulawesi pertama, Dr. Ratulangi. Cabang-cabangnya dibentuk di daerah-daerah antaranya di Luwu dengan anggota-anggotanya sebagai berikut :²⁹)

- Andi Kaso
- Andi Pangerang
- Andi Mappanyompa
- Andi Hamid.

Mereka ini adalah anggota Kabinet dari Kerajaan Luwu.

Sesudah rapat penggabungan di Latowu maka susunan Pusat Keselamatan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Andi Kaso (Opu Patunru–Petor Besar Luwu), sebagai Ketua;
2. Andi Mappanyompa (Opu Tomarilalang), anggota untuk urusan pemerintahan;
3. Andi Pangerang (Opu Pabbioara), anggota untuk urusan Kehakiman/Kesejahteraan;
4. Andi Kasim (Petor-Kepala Pemerintahan Kolaka), anggota untuk urusan Ekonomi/Keuangan;
5. Andi Hamid (Opu Balirante), anggota untuk urusan seberang.

Kelasykaran PKR (Pembela Keselamatan Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1946 di Latowu, susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :³⁰)

1. M.Jusuf Arif – Kepala Staf (Ketua)
2. Andi Akhmad – Wakil Kepala Staf (Wakil Ketua)
3. M. Sudarman – Anggota (Sekretaris)
4. Ch. Pingak – anggota (Sekretaris II)
5. Hasjim Pangerang – anggota (Keuangan)
6. M.Arsyad – anggota (Penghubung)
7. Mahmud Dg.Sialasa – anggota (Perbekalan)

8. Andi Tanriajeng – anggota (Pertahanan/Keamanan).

Bagian-bagian :

1. M. Sudarman – Kepala Sekretariat
2. Ch. Pingak – Wakil
3. Hamzah Pengerang – Kepala Persenjataan
4. Andi Mutakallimun – Wakil
5. Hasan Pangerang – Kepala Perlengkapan
6. H.Abd Wahid Rahim – Perlengkapan
7. W.Simulat – Kepala Kesehatan/
Palang Merah
8. B.Guluh – Kesehatan
9. M.Landau Dg.Mabbate – Kepala Kepolisian/
Ketentaraan (PKT)
10. M.Radhi Toaatemala – Wakil
11. M.Sanusi Dg.Mattata – Kepala Penerangan/
Juru Bicara
12. Supu Jusuf – Wakil
13. Andi Pangajoang – Perhubungan
14. Mansyur (Kabasima Taco) – Penasehat Kelasykaran.

Pimpinan Harian PKR :

1. Abdul Kadir Tokia
2. M.R. Salampessy
3. Paddare
4. M.Jafar.

Penerjang (Panglima) :

- Kepala – Andi Tenriajeng
- Wakil – Mustafa
- BS I Komandan – Mustafa
- BS II Komandan – M. Joseph
- BS III Komandan – A.Baso Rahim.

Barisan Berani Mati – Komandan, S.S. Mahmud
Wakil, Patang.

Dalam operasi-operasi PKR dibagi atas dua sektor yaitu sektor Barat dan sektor Timur. Sektor Barat meliputi pusat

Kerajaan Luwu (palopo) dan sekitarnya sampai Malili, sektor Timur meliputi Sulawesi Tenggara, khususnya wilayah Kolaka (dan Kendari). Karena pusat pemerintahan RI Kerajaan Luwu berada di sektor Timur (Latowu), maka di sektor Barat ditunjuk A.Hamid (Opu Balirante) yang tempatnya berpindah-pindah karena sektor Barat hampir seluruhnya pada saat itu telah dikuasai NICA.

Dalam organisasinya PKR berbentuk suatu kesatuan Devisi yang operasinya dipimpin oleh staf pimpinan dengan Kepala Staf M. Jusuf Arief sebagai pucuk pimpinan. Rupa-nya Raja Luwu A.Jemma dianggap dan didudukkan sebagai Panglima Kelasykaran PKR. Devisi PKR Luwu tersusun atas 7 resimen dan satu Barisan Berani Mati yang dipercayakan kepada S.S. Mahmud dan Guru Patang,³¹) dan tiga pasukan inti yang disebut Basis (BS) yang masing-masing dipimpin oleh Mustafa, M.Joseph dan A.Baso Rahim dibawah pimpinan Panglima Pertempuran A.Tenriajeng.

Susunan Resimen adalah :

- Resimen I Palopo (6 Batalion)
- Resimen II Masamba (5 Batalion)
- Resimen III Malili (3 Batalion)
- Resimen IV Patampanua (Kolaka Utara) yang terdiri dari 5 Batalion dengan susunan sebagai berikut :

- | | | | | |
|-------------------------|---|----------|---|-------------|
| 1. Batalion 1 (Lasusua) | : | Komandan | : | Badawi |
| | | Wakil | : | Marzuki |
| a. Kompi 1 Lasusua) | : | Komandan | : | Ismail |
| | | Wakil | : | Saleha |
| b. Kompi 2 (Limbung) | : | Komandan | : | Abd. Syukur |
| | | Wakil | : | Salewangeng |
| c. Kompi 3 (Katoi) | : | Komandan | : | Ahmad |
| | | Wakil | : | Sappe |
| d. Kompi 4 (Awo) | : | Komandan | : | Manggang |
| | | Wakil | : | Muhammad |
| e. Kompi 5 (Mala-Mala) | : | Komandan | : | Wa,na Hadia |
| | | Wakil | : | Syuaib |

2. Batalion II (Wawo) : Komandan : Abd. Rasyad
Mangga
Wakil : Mahariya
- a. Kompi 1 (Wawo) : Komandan : Abd. Rasyid
M a n g g a
Wakil : Mahariya
- b. Kompi 2 (Ranteangin) : Komandan : Kaseng
Wakil : Palancoi
- c. Kompi 3 (Waimenda) : Komandan : Palakia
Wakil : Arafah
- d. Kompi 4 (Lambai) : Komandan : Muh. Arafah
Wakil : M. Ali
- e. Kompi 5 : Komandan : Lacing
Wakil : Palandung
3. Batalion III (Latowu) : Komandan : Abd. Hamid
Wakil : Moh. Amin
- a. Kompi 1 (Latowu) : Komandan : La Mere
Wakil : Lauddin
- b. Kompi 2 (Tolala) : Komandan : Azis
Wakil : Mansyur
- c. Kompi 3 (Lelewawo) : Komandan : Latang
Wakil : Abd. Halik
- d. Kompi 4 (Porehu) : Komandan : Langesa
Wakil : La Misi
- c. Kompi 5 (Laarui) : Koamndan : Lawi
Wakil : So Turu
4. Batalion IV (Watunohu) : Komandan : H. Iskandar
Wakil : Nurdin
- a. Kompi 1 (Watunohu) : Komandan : H. Iskandar
Wakil : Nurdin
- b. Kompi 2 (Kosali) : Komandan : To Hanapi
Wakil : La Wenua
- c. Kompi 3 (Toaha) : Komandan : La Sanji
Wakil : La Mento
Dg.Macinde
- d. Kompi 4 (La Pai) : Komandan : Situru
Wakil : M. Ali
- e. Kompi 5 (Tiwu) : Komandan : Abd. Hamid
Wakil : Laroko
5. Batalion V (Olo-Oloho) : Komandan : Beddu Dg.
Mako

- | | | | |
|------------------------|------------|---|--------------|
| | Wakil | : | G. Beddu |
| a. Kompi 1 (Olo-Oloho) | : Komandan | : | La Kalo |
| | Wakil | : | Lasummung |
| b. Kompi 2 (Pakue) | : Komandan | : | La Tunggalim |
| | Wakil | : | La Naja |
| c. Kompi 3 (La Nipa) | : Komandan | : | H. Mallo |
| | Wakil | : | L.Werru |
| d. Kompi 4 (Labipi) | : Komandan | : | La Paddare |
| | Wakil | : | La Semmang |
| e. Kompi 5 (Puundoho) | : Komandan | : | La Marati |
| | Wakil | : | Manggasing |

Resimen V yang wilayahnya diharapkan untuk meliputi Kolaka dan wilayah Kendari serta wilayah-wilayah Doupinang yang termasuk kekuasaan Buton. Resimen ini belum sempat disusun dengan baik sampai pada saat seluruh wilayah ini dapat dikuasai oleh NICA. Dari Resimen V ini sempat disusun hanya kesatuan-kesatuan yang jauh dari jalan raya poros Kendari Kolaka, yaitu kompi-kompi dari Batalion III Mowewe antara lain :

- | | | | |
|------------------|------------|---|----------|
| – Kompi Tongauna | : Komandan | : | Putete |
| | Ka. Staf | : | Palangga |
| – Kompi Tawanga | : Komandan | : | J. Poapa |
| | Ka. Staf | : | Lahasa |

Tekanan dari tentara NICA semakin ditingkatkan sehingga pada awal Maret 1946 sejumlah 13 orang anggota PKR dari kompi III Tawanga tertangkap di suatu tempat di Rahabangga. Di antara anggota-anggota PKR yang tertangkap adalah J. Poapa, Baso, Samusu, Saidi, Tete, Kabora, Hado Asman.³²)

Di pihak PKR, menempatkan kekuatan gabungan PKR Kolaka dengan PKR Luwu dengan markas pusatnya di Latowu. Kekuatan gabungan ini merupakan pasukan induk yang dipimpin oleh Andi Tanriadjeng dan M. Joseph. Penasihat dan pelatih tentara ditunjuk Mansyur yaitu Kabasima Taco bekas Komandan tentara Jepang di Peamalaa. Pertahanan pasukan induk atau pasukan inti disebut Benteng Batu Putih. Benteng Batu Putih menjadi titik sasaran penye-

rangan NICA. Dalam gerak maju NICA untuk menghancurkan pertahanan PKR terjadilah pertempuran laut bertempat di suatu tempat yang disebut Matandahi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Februari 1946. Pasukan PKR yang dipimpin oleh La Guli berhasil memukul mundur pasukan NICA yang mempergunakan kapal motor.³³⁾

Pada tanggal 11 Maret 1946 Latowu diserang oleh patroli NICA. Walaupun Latowu dibakar oleh NICA tetapi pasukan PKR berhasil memukul mundur musuh. Dalam perjalanan NICA, tiba-tiba mendapat sergapan dari pasukan PKR yang dipimpin oleh Mansyur (Kabasima Taco) dan Sari-lawang. Terjadilah pertempuran di jalan antara Latowu dan Porehu yang berkesudahan dengan berhasilnya dirampas perbekalan NICA yang diangkut dengan kuda beban. Korban manusia di kedua belah pihak tidak ada. Sejak terbakarnya Latowu pada tanggal 11 Maret 1946, PKR memindahkan seluruh kekuatannya ke Benteng Batu Putih. Benteng Batu Putih adalah benteng alam, yaitu suatu tempat yang dibentengi oleh tebing-tebing batu yang terjal dan mempunyai satu-satunya jalan masuk dari mulut benteng yang dijaga secara ketat. Pada tanggal 21 Maret 1946 Latowu diserang kembali oleh NICA. Serangan dilancarkan dari arah utara dan dari arah selatan. Maksudnya untuk menjepit pasukan PKR tetapi apa yang terjadi tidaklah demikian. Pertempuran terjadi sejak pukul 09.00 sampai larut malam. Pada malam hari pasukan PKR mengambil kesempatan menyingkir dari medan pertempuran yang akhirnya pasukan NICA sendiri saling berhadap malah mendapat tembakan-tembakan dari kapal perang yang berlabuh di depan kampung Latowu. Pada malam itu juga pasukan penyerang NICA meninggalkan Latowu dengan kerugian besar.³⁴⁾

Pada tanggal 2 April 1946 rombongan pasukan NICA yang cukup kuat menyerang Lasusua yang terletak di sebelah selatan Latowu. Dengan persenjataan yang sangat kurang PKR mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh M. Yasir, Kongoosa, Muhidin dan Badewi. Kali ini PKR terpaksa Mundur dan meninggalkan beberapa teman yang gugur.³⁵⁾

NICA mengadakan perampokan disusul pembakaran rumah-rumah rakyat dan akhirnya meninggalkan tempat itu.

PKR kembali menghimpun kekuatan senjatanya yang tersebar di tempat-tempat penjagaan. Setelah terkumpul maka pada tanggal 18 April 1946 diberangkatkan pasukan PKR Kolaka di bawah pimpinan M. Joseph untuk menyerang NICA yang berkedudukan di Kolaka. Dengan didampingi oleh Supu Jusuf pimpinan M. Joseph membawa pasukan yang berjumlah 400 orang diperlengkapi dengan senjata tajam dan 15 pucuk senjata api.³⁶⁾

Pada tanggal 21 April 1946 subuh, pasukan PKR yang mengambil dari empat jurusan menggempur kota Kolaka. NICA yang mendapat serangan tiba-tiba menjadi kelam kabut, akhirnya PKR berhasil menduduki kota Kolaka selama enam jam. Sekitar pukul 12.00 pasukan PKR meninggalkan kota dan pasukan NICA kembali menempati pos-pos penjagaannya. PKR memang tidak bermaksud untuk menduduki kota seterusnya akan tetapi adalah suatu tindakan memamerkan kepada NICA dan masyarakat bahwa PKR dan Pemerintah RI masih mampu membela kemerdekaan Indonesia. Dari pertempuran itu timbul kerugian di kedua belah pihak. PKR gugur seorang pasukan panah dan seorang tertangkap yaitu Sarula, sedangkan di pihak NICA beberapa orang gugur di antaranya, Sersan Sembur, Agen Polisi "Alenunggu" dan di samping itu PKR berhasil merampas beberapa pucuk senjata api termasuk bren dan beberapa peti peluru.

Sebagian besar pasukan PKR kembali menuju Lapapawu dan terlibat dalam pertempuran membantu pasukan yang dipimpin oleh Sarilawang dari serangan NICA di markas PUU-WIAU pada tanggal 24 April 1946.

Karena pasukan PKR Luwu ternyata tidak membantu PKR Kolaka dalam penggempuran kota Kolaka, mengakibatkan timbulnya perpecahan antara PKR Kolaka dengan PKR Luwu. PKR Kolaka tidak mau tinggal lagi di Benteng Batu Putih, tetapi mengambil tempat dan langkah-langkah tersendiri dengan siasat markas berpindah-pindah dan mengadakan penyerangan musuh pada setiap kesempatan.

Sebagian kecil pasukan PKR yang selesai menyerang Kolaka menuju arah selatan untuk menyerang Pomalaa. Rombongan PKR yang bergerak menuju Pomalaa dipimpin oleh M. Joseph dan M. Billibao pada akhirnya kepergok

dengan patroli NICA di Huko-Huko pada tanggal 4 Mei 1946 dan setelah terjadi pertempuran sengit menyebabkan M. Joseph dan M. Billibao tertangkap karena kehabisan peluru. M. Joseph dan M. Billibao menjadi tawanan NICA sedangkan pasukannya kocar-kacir meninggalkan Daeng Parukka dan Bolala yang gugur di medan juang Huko-Huko (dekat Pomalaa).

Selesai pertempuran Huko-Huko patroli NICA diarahkan ke Kolaka utara. Markas PKR yang berpindah-pindah antara Puuwiau, Tamboli dan Lapapawu menjadi titik arah patroli NICA. Sementara itu Supu Jusuf dan Konggoasa dengan pasukan-pasukan yang kecil mengadakan operasi-operasi penghadangan di jalan-jalan poros Kolaka – Kendari.

Pada tanggal 21 Mei 1946 markas Puuwiau kembali diserang dengan tiba-tiba, menyebabkan PKR kehilangan beberapa pucuk senjata dan beberapa orang pasukan yang gugur dan tertawan.

Selanjutnya tekanan NICA ke pusat pertahanan Benteng Batu Putih lebih diperketat. Di sana beberapa saat lalu telah tiba Datu (Raja) Luwu dari Palopo beserta keluarga berhubung Palopo sudah diduduki NICA. Di Benteng Batu Putih pada tanggal 31 Mei 1946 diterima laporan bahwa :

1. Dari arah barat telah berlabuh sebuah kapal perang Belanda di pantai Latowu;
2. Dari arah utara terlihat pasukan NICA bergerak maju dengan perahu dari Lelewawo menuju Latowu;
3. Dari arah selatan pasukan NICA telah mendarat di Pakue. Rumah-rumah dibakar dan rakyattelah menyingkir. Rupanya NICA akan berpos di sana; dan laporan terakhir menyatakan bahwa pasukan NICA telah mendarat dan berpos di Latowu. Di samping itu pesawat udara selalu mengintai dan terbang rendah di atas Benteng Batu Putih.

Dalam keadaan itu disadari bahwa rahasia kedudukan Benteng Batu Putih sudah diketahui NICA, sehingga segera direncanakan pemindaha markas dan penyelamatan Datu Luwu.

Untuk kesiapsiagaan dari serangan tiba-tiba maka di mulut benteng dipusatkan seluruh kekuatan PKR di bawah pimpinan Panglima Pertempuran Andi Tenriadjeng. Dari sisi lain Benteng, tidak ada keraguan karena terdiri dari lereng batu yang terjal. Rupanya taktik ini terbaca oleh NICA sebagai hasil penyelidikan dari udara dan informasi dari anggota-anggota PKR yang tertangkap. M. Joseph pimpinan PKR yang tertangkap pada pertempuran Huko-Huko dengan tangan terbelenggu dijadikan penunjuk jalan pasukan NICA untuk memasuki Benteng Batu Putih dari belakang. Pasukan NICA dari Kendari dipimpin oleh Letnan Venick dengan bantuan tentara NICA dari Palopo yang dipimpin oleh Letnan Tupang berusaha menuruni tebing-tebing yang terjal, mulai waktu subuh tanggal 2 Juni 1946. Tanpa perlawanan seluruh penghuni benteng termasuk Datu Luwu jatuh ke tangan NICA pada pukul 09.00 hari itu. Setelah itu barulah ketahuan oleh pasukan PKR yang menjaga mulut benteng bahwa musuh telah menguasai benteng dan menawan Datu beserta keluarganya.

Andi Tenriadjeng panglima pertempuran segera mengundurkan pasukannya secara bergelombang dan menghimpun kekuatan di Lanpa seraya mengusahakan rujuk dengan PKR Kolaka supaya bersatu kembali melanjutkan perlawanan. Pada tanggal 3 Juni 1946, Datu Luwu bersama permaisuri dibawa ke Palopo, sedangkan tawanan lainnya di antaranya 100 orang wanita diangkut melalui laut ke Kolaka.

Dalam pada itu Andi Tenriadjeng berhasil menghimpun kembali kekuatan PKR, namun pada tanggal 10 Juni 1946 tibalah satu delegasi menyampaikan surat agar Tenriadjeng menyerah kepada NICA demi keselamatan Datu Luwu dan seluruh pimpinan serta anggota PKR yang tertawan. Dengan sangat berat hati memutuskan untuk menyerah, tetapi demi keselamatan kawan dan keluarga terpaksa Andi Tenriadjeng berbuat demikian.

Setelah PKR Luwu menghentikan perlawanan, PKR Kolaka masih bertekad melanjutkan perjuangan. Pemerintahan Kolaka yang dipimpin oleh Andi Kasim dengan kekuatan

pasukan yang dipimpin oleh M. Ali Kamry dan Madjid Junus serta pasukan Konggoasa dan Supu Jusuf tetap siap melanjutkan perlawanan. Wilayah Kolaka telah dikuasai NICA, kecuali wilayah enam kampung (Wawo, Wolo, Woimendaa, Ranteangin, Porehu dan Lambai) itulah yang masih merupakan wilayah RI yang dipertahankan.

Pada tanggal 12 Juni 1946 Andi Kasim dan M. Ali Kamry mengkonsolidasikan kekuatan untuk menyerang Kolaka. Andi Kasim di samping sebagai Kepala Pemerintah juga bertindak selaku pemimpin pasukan. Di dalam pasukan Andi Kasim terdapat tokoh-tokoh PKR, yaitu Sarilawang, H. Wahid, Baso Umar dan dua orang bekas tentara Jepang yang memakai nama samaran Mansyur dan Sukri. Dengan pasukannya Andi Kasim menyerang Kolaka pada tanggal 3 Juli 1946, tetapi serangan kali ini pasukan PKR dihancurkan oleh NICA. Andi Kasim tertangkap, Sarilawang menyerah dengan senjatanya, sedangkan H. Wahid dan Baso Umar lari menyelamatkan diri. Mansyur dan Sukri lari bersembunyi di hutan-hutan kemudian bergabung dengan M. Ali Kamry di Wawo, sedangkan Andi Punna, Abubaeda, Sempe lari dengan perahu dan kemudian berjuang di Jawa.³⁷⁾

Dengan tertangkapnya Andi Kasim, perjuangan diteruskan oleh M. Ali Kamry, Madjid Junus, Supu Jusuf dan Konggoasa. M. Ali Kamry dan Madjid Junus membuat kubu pertahanan yang sulit diketahui oleh NICA. Tetapi karena NICA semakin mantap menguasai seluruh wilayah, akhirnya mereka meluaskan rakyat menyingkalkan kubu kemudian M. Ali Kamry dan Madjid Junus berangkat ke Sulawesi Selatan melalui Balanipa. Di Balanipa mereka sempat membantu KERIS MUDA Balanipa menghadang dan merampas senjata NICA.³⁸⁾

Dengan keberangkatan M. Ali Kamry dan Madjid Junus ke Sulawesi Selatan, perjuangan PKR Kolaka dilanjutkan oleh Supu Jusuf dan Konggoasa. Di setiap kesempatan mereka mengadakan penyerangan dan pengadangan terhadap patroli NICA. Mereka menggunakan siasat bergerilya berhubung kekuatan pasukan semakin lemah. Pada awal tahun

1947 M. Ali Kamry berhasil kembali dari perjalanannya ke Sulawesi Selatan. Di sekitar Wawo bertempat di suatu pegunungan M. Ali Kamry mengadakan pertemuan dengan Supu Jusuf dan Kongoosa. Pertemuan menghasilkan suatu keputusan yaitu terbentuknya suatu wadah baru untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Wadah atau badan perjuangan itu disebut KRIST (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi Tenggara) yang personalia pimpinan terdiri dari :

1. Komandan Umum : M. Ali Kamry
2. Wakil Komandan Umum : Kongoosa
3. Kepala Staf Umum : Supu Jusuf.

Pusat perjuangan KRIST meliputi kampung Wawo dan lapapawu dengan wilayah yang dibagi dalam tiga sektor yaitu :

1. Sektor I meliputi wilayah dari Wawo ke utara sampai berbatasan Malili, dipimpin oleh M. Ali Kamry;
2. Sektor II meliputi wilayah dari kampung Lapapawu ke selatan sampai wilayah Buton, dipimpin oleh Kongoosa;
3. Sektor III meliputi wilayah dari Lapapawu ke arah timur sampai Kendari, dipimpin oleh Supu Jusuf.

Tetapi sayang sekali, pada tanggal 5 Desember 1947 maskas M. Ali Kamry diserang oleh patroli NICA secara tiba-tiba dan menyebabkan tertangkapnya 11 orang pasukan inti di samping gugurnya Mansyur (Kabasima Taco) dan Sukri. M. Ali Kamry beserta dua orang temannya yaitu Ukkas dan Nonci dapat meloloskan diri. Tetapi pada akhirnya M. Ali Kamry tertangkap di Lanipa pada tanggal 20 Januari 1948.

Pimpinan lainnya yaitu Supu Jusuf dan Kongoosa tetap bergerilya di gunung-gunung. Mereka semakin terdesak oleh patroli NICA.

Pada tanggal 23 September 1948 di dalam keadaan tak berdaya karena sakit Supu Jusuf ditangkap oleh Polisi NICA dari Kolaka lalu dibawa ke Kolaka kemudian dipindahkan

ke Palopo. Di sana diadili oleh pemerintah NICA dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun lamanya. M. Ali Kamry sendiri telah diadili lebih dahulu pada tanggal 14 Pebruari 1948 dengan hukuman 11 tahun.

Dengan tertangkapnya kedua pimpinan KRIST, tinggalah seorang diri Konggoasa disertai oleh beberapa orang pengikutnya. Pemimpin terakhir ini yaitu Konggoasa bertahan menderita di gunung-gunung dengan tekad tidak bersedia menyerah kepada NICA. Ia mengembara mencari keselamatan diri sampai berakhir kekuasaan NICA dengan penyerahan kedaulatan Indonesia, barulah beliau kembali ke kota Kolaka.

4. Akibat perlawanan

Perlawanan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kolaka walaupun didukung oleh semangat herois dan patriotisme namun karena kekuatan senjata yang tidak seimbang pada akhirnya dapat dipatahkan secara berangsur-angsur oleh NICA. Peristiwa-peristiwa yang sangat besar pengaruhnya dan sangat menentukan ketahanan PKR melawan musuh antara lain dengan tertangkapnya M. Joseph dan M. Billibao pada pertempuran Huko-Huko pada tanggal 4 Mei 1946, menyusul dengan didudukinya Benteng Batu Putih yang ditandai dengan penawanan Datu Luwu dan sejumlah pemimpin PKR Luwu di Kolaka Utara pada tanggal 2 Juni 1946. Tidak kurang arti buruknya bagi PKR dengan tertangkapnya Andi Kasim dalam penyerangan kota Kolaka pada tanggal 3 Juli 1946 dan tertangkapnya M. Ali Kamry pada tanggal 20 Januari 1948 kemudian diakhiri dengan peristiwa tertangkapnya Supu Jusuf pada tanggal 23 September 1948.

Walaupun salah seorang pemimpin PKR Kolaka terakhir sebagai pemimpin KRIST tidak pernah menyerah kepada NICA hingga penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, yaitu Konggoasa namun perlawanan secara fisik tidak pernah lagi terjadi.

Sebagai akibat perlawanan yang berakhir dengan penguasaan wilayah Kolaka di bawah tangan NICA mencatat

adanya penimpaan hukuman penjara bagi sebagian besar para pemimpin PKR baik PKR Kolaka maupun PKR Luwu yang berjuang di daerah Kolaka. Di antara mereka terdapat lima orang PKR Luwu yang dipenjarakan di Penjara Cipinang Jakarta dengan hukuman mati yang kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup.³⁹⁾ yaitu M. Jusuf Arif, Andi Ahmad, Andi Tenriadjeng, M. Landau Dg. Mabbate dan M. Djufri. Pemimpin-pemimpin lainnya dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Hadat Tinggi di Watampone sebagai berikut :⁴⁰⁾

1. Andi Djemma (Datu Luwu) 25 tahun dalam pengasingan di Ternate;
2. Andi Pangerang, 25 tahun dalam pengasingan di Bima;
3. Andi Kaso, 25 tahun dalam pengasingan di Tomohon;
4. Andi Mappanyompa, 20 tahun dalam pengasingan di Banda;
5. Andi Kasim, 20 tahun dalam pengasingan di Ende;
6. Andi Makkulau, 20 tahun dalam pengasingan di Morotai;
7. Andi Mangile, 5 tahun penjara;
8. M. Sanusi Dg. Mattata, 10 tahun penjara.

Di samping itu berdasarkan putusan pemerintah NICA di Palopo telah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun terhadap M. Ali Kamry dan hukuman penjara 3 tahun terhadap Supu Jusuf.

Hukuman pengasingan ataupun penjara dijalankan oleh para pejuang pembela kemerdekaan RI, tetapi tiba pada penyerahahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 para tahanan dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Daerah Kolaka yang sejak tahun 1907 masuk wilayah Afdeeling Luwu kemudian terbagi dua di zaman Jepang yaitu Kolaka Utara masuk wilayah Ken Luwu dan Kolaka Tengah/Selatan masuk wilayah Ken Buton dan Laiwoi, maka setelah selesai perang mempertahankan kemerdekaan RI akhirnya menjadi wilayah Daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara. Dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 terbentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dengan ibukota Kolaka.

BAB VI SELAYANG PANDANG KEADAAN DI ZAMAN JEPANG

A. KEADAAN UMUM

1. Pemerintahan

Tentara Jepang mendarat di Kendari pada tanggal 24 Januari 1942¹⁾ dan melancarkan serangan kilat ke seluruh wilayah pertahanan Belanda. Perlawanan tentara Belanda yang terhitung sengit terjadi di km 3 Puunggaloba, namun Belanda tak mampu bertahan lama. Seluruh kekuatan tentara Belanda ditarik ke pedalaman dan selanjutnya ke gunung-gunung yang akhirnya ada yang berhasil meloloskan diri ke Merauke dan Australia. Yang tidak berhasil meloloskan diri akhirnya menyerah kepada Jepang lalu ditahan di kamp-kamp tahanan seperti di Raha, di Wawotobi dan sebagiannya dipekerjakan di tambang aspal di Banabungi (Buton) dan tambang nikel di Pomalaa (Kolaka).

Setelah Jepang menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, segeralah diadakan hubungan dengan raja-raja dan pemerintah Bumi Putra setempat. Di Kendari, raja Tekaka mengaku tunduk kepada Jepang, sedangkan Kapitan Lasandara sudah ditangkap Jepang sejak tanggal 24 Januari 1942 dan sudah dengan sendirinya mengaku takluk kepada Jepang. Raja Tekaka diangkat Jepang sebagai Raja Satu berkedudukan di Kendari dan Kapitan Lasandara diangkat sebagai Raja Dua berkedudukan di Wawotobi.

Dari Kendari Jepang menguasai Muna dan Buton. Raja Muna pada waktu itu ialah La Ode Pandu sedangkan di Buton sedang berkuasa Sultan yang bernama La Ode Falihi. Segera Raja Muna dan Sultan Buton mengaku tunduk kepada Jepang.

Kemudian daripada itu Kolaka yang ditinggalkan Belanda dikuasai Jepang yang datang dari Makassar. Sulewatang yang berkuasa di Kolaka pada saat itu segera pula mengaku tunduk kepada Jepang.

Pemerintahan segera dinormalisasi oleh Jepang. Tidak terjadi perubahan-perubahan mendasar mengenai struktur pemerintahan, kecuali di Kendari (Laiwoi) terjadi peningkatan Kapitan van Laiwoi menjadi Raja II. Anggota-anggota pemerintah di zaman Pemerintah Hindia Belanda tetap menjalankan fungsinya semula. Yang berubah hanya penamaan wilayah dan jabatan pemerintahan. Afdeeling diganti dengan Ken dan Onderafdeeling diganti dengan Bunken. Jabatan Assistent Resident diganti nama dengan Ken Kanrikan dan jabatan Controleur atau Gezaghebber diganti dengan nama Bunken Kanrikan. Demikian seterusnya Kepala District diganti dengan Gunco, Kepala kampung diganti dengan Sunco.²)

Ken Kanrikan (Assistent Resident) berkedudukan di Bau-Bau dan membawahi 4 orang Bunken Kanrikan yang berkedudukan di Bau-Bau, Raha, Kendari dan Kolaka.

Walaupun Bau-Bau (Buton) menjadi pusat pemerintahan Jepang, tetapi Kendari dipilih tempat pemusatan tentara. Di sanalah diperbesar lapangan udara peninggalan Belanda menjadi Lapangan Udara Kendari Dua (Ambaipua), yang kelak menjadi Lapangan Udara AURI yang bernama Pelud WOLTER MONGINSIDI.

Untuk melancarkan tugas-tugas pemerintahan terutama tugas-tugas dalam peperangan selain dari Lapangan Udara Kendari Dua, dibuka pula beberapa lapangan cadangan yang dirahasiakan seperti lapangan Kosambi di Muna, lapangan Ambasea di Laiwoi Selatan dan lapangan Labua di Poleang/Moronene.

Pemerintahan Jepang di Sulawesi Tenggara adalah pemerintahan militer dari Kaigun (Angkatan Laut). Pada mulanya kekuasaan raja-raja/para bangsawan masih diperkenankan dan dihargai oleh Pemerintah Jepang, tetapi

lama-kelamaan berangsur dikurangi akhirnya terasa bahwa raja-raja/para bangsawan tinggal simbol. Semuanya harus menjadi alat Jepang untuk menindas rakyat dengan motif "bagi kejayaan Asia Timur Raya" dan "kemenangan Dai Toa Sensoo" (Perang Asia Timur Raya). Mulai dari raja sampai kepada Kepala Kampung merasa sangat terjepit; dijepit oleh rasa untuk melindungi rakyatnya dan usaha melindungi keselamatan jiwanya sendiri. Seluruh rakyat harus turut memenangkan perang. Pemuda-pemuda dilatih secara militer dalam barisan Seinendan dan sebagian pemuda dilatih menjadi tentara pembantu Jepang (Heiho). Rakyat yang terhitung raga kuat dijadikan buruh kerja wajib atau Romusha. Sekolah-sekolah dijadikan sekolah bekerja untuk keperluan Jepang. Organisasi-organisasi politik dan sosial semuanya dibekukan seperti PSII, Penyadar, Muhammadiyah dan Kepanduan.

2. Kehidupan masyarakat

Struktur sosial tradisional masyarakat boleh dikatakan lenyap sama sekali. Perbedaan perlakuan terhadap kaum bangsawan dan bukan bangsawan tidak ada lagi. Faktor keturunan tidak lagi menjadi alat ampuh untuk memperoleh penghargaan, kesempatan ataupun fasilitas dari penguasa. Kewajiban rakyat terhadap kepentingan Jepang dilaksanakan secara merata tanpa kecuali. Pada mulanya proses itu diterima sebagai suatu proses sosialisasi yang menguntungkan rakyat () banyak () rakyat () biasa. () Tetapi pada akhirnya terasa benar bahwa dari proses itu telah mengakibatkan lenyapnya wibawa golongan atas yang selama ini bertindak selaku pemimpin masyarakat.

Rakyat bersama pemimpin-pemimpinnya yang pada mulanya menerima baik kedatangan Jepang karena bujuk rayu dan semboyan-semboyan yang mengelabui kesadaran rakyat terhadap harga dirinya akhirnya berubah menjadi gelisah dan benci terhadap penguasa.

Ketika Jepang telah merasa berkuasa atas segala bidang dan lapangan hidup, hilanglah semboyan "Nippon-Indonesia

sama-sama,” bujuk rayu tak pernah lagi bahkan timbul kekejaman, kekerasan dan kekejian.

Kerja wajib/paksa dilakukan bagi kaum pria sebagai romusha. Mereka bekerja keras tanpa balas jasa atau jaminan hidup, semua tertuju untuk keperluan perang dan kepentingan pemerintah Jepang. Yang malas dan tidak membantu Jepang dicurigai sebagai mata-mata sekutu.

Lain pula halnya bagi kaum wanita. Ibu-ibu yang suaminya sudah menjadi romusha, mereka harus bekerja kebun dan ladang. Berbagai tanaman palawija harus ditanam dan hasilnya dikumpulkan dengan harga rendah sekali untuk keperluan perang. Kadang-kadang dengan alasan dibuat-buat hasil tani rakyat diambil tanpa harga. Bagi wanita yang tak bersuami ada yang dipaksa atau terpaksa hidup sebagai penghibur nafsu tentara Jepang. Pendek kata kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan moral dan kehancuran material. Toketai (Polisi Militer) Jepang dengan mudah memberikan hukuman militer bagi siapa saja yang mengeluh. Hukuman yang dikenakan pasti tindakan aniaya secara kejam. Dengan demikian suasana masyarakat diwarnai oleh kebencian dan ketakutan.

3. Sosial budaya

Untuk membentuk generasi Indonesia yang benar-benar menguntungkan pembinaan semangat Asia Timur Raya, Jepang melihat pentingnya peranan guru sekolah. Oleh sebab itu sekolah perlu dikembangkan. Di samping karena sekolah adalah wadah pembentukan generasi yang diharapkan memiliki semangat dan jiwa yang berorientasi kepada ide ”Asia Timur Raya,” juga sekolah merupakan kekuatan yang bisa digerakkan secara cepat untuk bekerja bagi keperluan dan kepentingan pemerintah dan tentara Jepang.

Sekolah Desa (Volksschool) di zaman Hindia Belanda dirobah namanya menjadi Futsu U Kogakko yang berkelas III. Sekolah Sambungan (Vervolgschool) di zaman Hindia Belanda dirobah namanya menjadi Jokyu Kogakko dan di-

jadikan sekolah berkelas VI. Sekolah Guru CVO (Cursus Volks Onderwijzer) di Bau-Bau dirobah menjadi Kiyoin Yoseiso, bahkan pada tahun 1944 dibuka lagi Kiyoin Yoseiso di Wawotobi. I i kurikulumnya hampir sama saja dengan kurikulum di zaman Hindia Belanda kecuali pelajaran bahasa Jepang sudah diajarkan mulai dari kelas I Sekolah Desa. Guru-guru sekolah didorong untuk pandai berbahasa Jepang. Bagi mereka yang dinyatakan lulus dalam suatu tingkat penguasaan bahasa Jepang diberikan tunjangan sebagai penambah gaji bulanan. Taiso (senam pagi) diterapkan ke dalam kegiatan proses belajar, semangat kerja kinrohosi (kerja bersama-sama) diwajibkan. Tari dan lagu-lagu perang diajarkan kepada murid-murid. Usaha pembentukan semangat Jepang terasa pesat sekali. Tetapi sebaliknya rakyat tenggelam dari rasa percaya diri sendiri, rasa bangga dengan budayanya lemah sekali. Seni budaya rakyat kurang mendapat tempat. Mungkin juga karena tiada waktu di luar dari kesibukan kerja fisik untuk kebutuhan Jepang. Yang biasa dilakukan bila ada izin dari penguasa hanyalah tari molulo dari suku Tolaki dan nyanyian Kantola dari suku Muna.

Usaha-usaha pembinaan keagamaan seperti Gerakan Muhammadiyah, Zending Protestan dan Missi Katholik menjadi sangat mundur. Organisasi Muhammadiyah bahkan dibekukan dan beberapa orang Pastor dan Suster Katholik di Raha dan Pendeta-Pendeta Protestan (Zending) ditawan oleh Jepang. Salah seorang Pendeta Zending yang bernama Gouweloos malah lebih dahulu telah ditembak Jepang di Puunggolaka pada tanggal 24 Januari 1942.³⁾

Jepang mungkin melihat bahwa agama Kristen adalah agama orang Belanda, sehingga melarang kegiatan kebaktian agama Kristen walaupun di kalangan penduduk bumiputera, malah menjelang akhir Perang Dunia II mereka diancam akan dibunuh jika kegiatan kebaktian tidak dihentikan.⁴⁾

Sebaliknya, pemeluk agama Islam boleh menjalankan ibadah menurut syariat Islam, boleh mempelajari agama Islam, asalkan tetap setia kepada Jepang sebagai Saudara Tua. Jepang nampaknya berusaha menarik simpati dari

pemuka-pemuka Islam. Latar belakangnya dapat disadari bahwa Jepang mengakui agama Islam mempunyai pengikut terbesar dan bahwa pemeluk agama Islam sudah tentu tidak mendukung Belanda.

4. Hubungan ke luar daerah

Pengawasan Jepang sangat ketat sehingga hubungan antara pulau sangat sulit. Walaupun demikian berita-berita luar daerah masih sering diterima, misalnya berita dari pulau Jawa. Soekarno sebagai pemimpin Putera kemudian Jawa Hokokai sangat dikagumi namanya. Beritanya sangat harum di kalangan masyarakat. Pelopor-pelopor Muhammadiyah senantiasa memasang telinga tentang berita-berita dari Jawa dan Makassar, kendatipun organisasi Muhammadiyah sudah dibekukan Jepang.

Berita perkembangan perang tentu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun demikian masih juga diketahui oleh penduduk bahwa kekuatan Jepang kian hari kian berkurang bahkan sudah dapat diperkirakan bahwa Jepang kian melaju ke arah kekalahannya. Kesemuanya itu adalah bersumber dari berita-berita yang sempat diperoleh di luar daerah oleh para pelayar dari Kepulauan Tukang Besi dan Kolaka Utara yang berani berlayar ke Jawa, Sumatera dan ke tempat lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari Jepang atau pada kesempatan mendapat tugas dari Jepang sebagai armada perahu pengangkutan ke Jawa. Dengan berita-berita itu kaum terpelajar dan para pemuka agama sangat berharap agar peperangan segera berakhir dan membawakan suatu perubahan yang dapat mengakhiri penderitaan rakyat.

B. TINDAKAN-TINDAKAN PEMBANGKANGAN DAN PER-LAWANAN TERHADAP JEPANG

Akibat tindakan-tindakan pemerasan Jepang, rakyat menderita kesukaran hidup yang luar biasa. Rakyat banyak menjadi fakir-miskin yang tak berdaya. Perasaan cemas meliputi masyarakat luas. Timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah Jepang. Hal tersebut mungkin terbaca oleh Jepang bahwa masyarakat Kolaka Utara sangat kecewa dengan tindakan-

tindakan Jepang, akhirnya bertindak tanpa alasan menangkap Opu Tojabi menentang Belanda, lalu dibawa ke Palopo. Di sana beliau disiksa dan pada akhirnya meninggal dalam penjara pada tahun 1943 setelah tidak diberi makan sepuluh hari lamanya.⁵⁾

Tindakan Jepang memeralat penguasa-penguasa setempat untuk memeras rakyat baik dengan cara kerja paksa maupun dengan bermacam-macam pungutan mengakibatkan sakit hati dan pembangkangan rakyat terhadap kekuasaan Jepang.

Pada tahun 1943 di Wanci Distrik Wangi-Wangi Bunken Buton rakyat menyerang Gunco (Kepala Distrik) di bawah pimpinan La Ode Manitu dan La Ode Abdulu. Gunco menderita luka-luka dan dua orang Polisi Jepang tewas. La Ode Manitu dan La Ode Abdulu ditangkap Jepang dan dihukum mati di muka umum di Wanci.⁶⁾

Di Kolaka Utara para pemuda anggota PKR menembak mati Sakata, seorang Jepang yang datang dari Palopo dan berlaku tidak senonoh terhadap masyarakat di sana. Di samping itu pada tanggal 19 November 1945 pasukan PKR menyerang dan akhirnya menawan satu pleton tentara Jepang yang bertindak turut-turutan mendampingi tentara NICA yang melanggar kehormatan Pemerintah RI Kolaka, yang dihadang dan digempur oleh PKR di Kambobaru (Km. 8 dari kota Kolaka.)⁷⁾

BAB VII P E N U T U P

Tiga setengah abad lamanya bangsa Indonesia terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme belum termasuk pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun. Tetapi tidak selama itu pula bangsa penjajah menduduki daerah-daerah di Sulawesi Tenggara. Walaupun VOC sudah mengadakan hubungan dengan kesultanan Buton sejak abad ke-17, tetapi tidak pernah menetap tinggal di Buton sebagai penguasa atas Buton. Demikian pula halnya dengan lainnya. Pemerintah Hindia Belanda pernah mengadakan perjanjian dengan La Mangu yang diakui sebagai pada tahun 1858, namun perjanjian itu ditandatangani di luar daratan Laiwoi dan kerajaan Laiwoi yang dimaksud sebenarnya tidak pernah terwujud sampai awal abad ke 20. Yang ada pada waktu itu adalah kerajaan Konawe yang dipimpin oleh Sulemandara Saranani. Secara resmi Belanda tiba dan tinggal sebagai pemerintah penjajah di Sulawesi Tenggara nanti terlaksana pada tahun 1906, yaitu setelah perang Bone selesai pada tahun 1905.

Namun demikian perlawanan terhadap imperialisme telah terjadi sejak abad ke 17 dengan aksi-aksi menentang tindakan penjajah yang timbul di Buton dan Muna. Selanjutnya pada awal abad ke 20 di saat datang untuk memulai tindak kekuasaannya sebagai penjajah telah timbul pula perlawanan-perlawanan di daerah Mekongga (Kolaka) dan kerajaan Konawe (Kendari). Perlawanan baru berakhir setelah penandatanganan Lange Verklaring antara Belanda dengan wakil-wakil bangsawan setempat pada tahun 1917.

Di samping itu, pengaruh pergerakan nasional yang berpusat di Jawa telah sampai pula di Sulawesi Tenggara. Organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat politik maupun sosial dan pendidikan, mendirikan cabang-cabangnya di Sulawesi Tenggara.

Karena dianggap sebagai wadah perjuangan yang tepat untuk menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda, segeralah rakyat menerima kehadiran Partay Syarikat Islam Indonesia. Penyadar, Muhammadiyah/Kepanduan Misbul Wathan dan lain-lain.

Di zaman pendudukan Jepang, rakyat Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam menanggung derita. Sementara organisasi-organisasi perjuangan dilumpuhkan dan dibekukan dari kegiatannya, dibarengi dengan berbagai macam aturan yang ditetapkan pemerintah pendudukan Jepang. Karena praktek-praktek penindasan yang luar biasa, rakyat menjadi sangat menderita. Akhirnya rakyat bangkit mengadakan perlawanan fisik. Pada tahun 1943 rakyat di Wanci/Wangi-Wangi Bunken Buton bangkit menyerang Gunco (Kepala Distrik) yang dianggapnya sebagai alat kekuasaan Jepang untuk menindas dan memeras rakyat. Perlawanan dipimpin oleh La Ode Maniru dan La Ode Abdulu yang kemudian berhasil ditangkap lalu dihukum mati di muka ribuan pasang mata di Wanci. Di tempat lain seperti di Kolaka Utara (Distrik Patampuan) rakyat yang tergabung ke dalam PKR telah membunuh seorang Jepang yang bernama SAKATA karena bertindak tidak senonoh terhadap masyarakat di sana. Pada tahun 1946, sedangkan di Kambobaru (Km. 8 dari Kolaka) lebih dahulu telah menyerang dan menawan satu pleton tentara Jepang pada tanggal 19 November 1945.

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia telah terjadi peperangan melawan NICA yang berusaha mengembalikan penjajahan di Indonesia. Perlawanan-perlawanan menentang NICA dipelopori oleh Pembela Keamanan Rakyat (PKR) Kolaka, yang bermula dengan pertempuran sengit melawan NICA yang dipimpin oleh Letnan J. BOON. Perlawanan terhadap NICA di daerah Kolaka telah memakan waktu yang panjang dan nanti dirasakan tenang dari suasana perlawanan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Semua bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Tenggara, secara fisik memang mengalami kegagalan, namun secara psikhis dan moril, pengaruhnya amat

besar. Perasaan benci dan menolak imperialisme tertanam dalam hati rakyat. Hal tersebut dibuktikan setelah proklamasi kemerdekaan. Rakyat Sulawesi Tenggara telah membuktikan keberaniannya dan kesetiiaannya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950.

CATATAN :

- BAB I : -
- BAB II : 1. A. Mulku Zahari, (Wawancara)
2. Hazirun, (Wawancara)
3. **Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton**, Stensilan, tahun 1979.
4. Monografi **Daerah Sulawesi Tenggara**, hal 56.
5. Ibid.
6. La Pou, (Wawancara)
7. Chaidir, (Wawancara)
8. Monografi **Daerah Sulawesi Tenggara**, hal 54.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. M. Asmar Lio, (Wawancara)
- BAB III : 1. S. Watukila (Wawancara)
2. S. Watukila (Wawancara)
3. **Dokumenta DPRD Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Tahun 1982**, halaman 130.
4. S. Watukila (Wawancara)
5. Batauga (Wawancara)
6. Paeko (Wawancara)
7. Husen A. Chalik, (Wawancara)
8. **Dokumenta DPRD Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Tahun 1982**, loc.sit halaman 131 - 132 - 133.
9. S. Watukila (Wawancara)
10. Husen A. Chalik, (Wawancara)
- BAB IV : 1. Monografi **Daerah Sulawesi Tenggara** halaman 25.
2. Memori Bupati KDH Muna : Drs. La Ode Kaimuddin, halaman
3. Op Chit Halaman 25
4. Ibid halaman 25.

5. Ibid.
6. Ibid halaman 33.
7. Alifin Tjoa (Wawancara) tgl. 15 - 8 - 1982.
8. La Kare (Wawancara) tgl. 16 - 7 - 1982.
9. Monografi **Daerah Sulawesi Tenggara** halaman 31.
10. Ibid halaman 31.
11. La Kare (Wawancara) tgl. 16 - 7 - 1982.
12. Idem.
13. Idem.
14. **Sejarah Revolusi Fisik Daerah Sulawesi Tenggara** halaman 3.
15. Ibid halaman 5.

- BAB V : 1. Ch. Pingak (Wawancara)
2. Laporumba alias Daeng Mangngati (Wawancara)
 3. Gogoso (Wawancara).
 4. M. Sanusi Daeng Mattata Luwu dalam **Revolusi** halaman 130.
 5. Ibid, halaman 131
 6. Ibid, halaman 133
 7. Monografi **Propinsi Sulawesi Tenggara**, halaman 18.
 8. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 81.
 9. Tahrir (Wawancara)
 10. Abd. Halik (Wawancara)
 11. Abd. Halik (Wawancara)
 12. Moh. Nur Latamoro (Wawancara)
 13. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 88.
 14. Ibid, halaman 89.
 15. Ch. Pingak (Wawancara)
 16. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, Op Chit, halaman 88.
 17. Op Chit, halaman 89.
 18. M. Sanusi Dg. Mattata, Luwu dalam **Revolusi** halaman 318.
 19. Ibid, halaman 319.
 20. Ch. Pingak (Wawancara)

21. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 91.
22. Ibid, halaman 91.
23. Ibid, halaman 93.
24. Abd. Halik, (Wawancara).
25. Kaleako, (Wawancara)
26. Sunu, (Wawancara).
27. Moh. Ali SilondaE (Wawancara).
28. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 107.
29. Ibid, halaman 108.
30. Ibid, halaman 109.
31. Ibid, halaman 111.
32. Ibid, halaman 114.
33. Ibid, halaman 115.
34. Tahrir (Wawancara).
35. Ch. Pingak (Wawancara).
36. Ch. Pingak (Wawancara).
37. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 123.
38. Ibid, halaman 123.
39. Ibid, halaman 124.
40. Ibid, halaman 139.

- BAB VI :
1. **Sejarah Derah Sulawesi Tenggara**, halaman 325.
 2. Ibid, halaman 327.
 3. Ibid, halaman 334.
 4. Ibid, halaman 334.
 5. M. Sanusi Dg. Mattata, Luwu dalam **Revolusi** halaman 134.
 6. **Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 329.
 7. **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara**, halaman 85.

DAFTAR SUMBER

A. DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. A. Ligtoet : **Beschrijving en Gescheidenis Van Boeton 1877.**
2. A.M. Zahari : **Sejarah dan adat Fiy Darul Butuni; Stensilan 1976.**
3. A.M. Zahari : **Kumpulan Perjanjian Kerajaan Buton ; Stensilan 1974.**
4. A.M. Zahari : **Salinan Surat Menyurat Kerajaan Buton Di Masa Lampau; Yayasan Pembina Pendidikan Mutiara; Bau-Bau 1976.**
5. B. Bhurhanuddin dkk
: **Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara (Naskah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara 1977/1978)**
6. B. Bhurhanuddin dkk
: **Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tenggara (Naskah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara 1978/1979)**
7. Ch. Pingak : **Dokumenta Kolaka; Penerbit Pemerintah Daerah Tingkat II Kolaka; tahun 1963**
8. D.M.G. Koch : **Menuju Kemerdekaan, Sejarah Pergerakan Kebangsaan I donesia sampai 1942 (Terjemahan Aboel Moes) Yayasan Pembangunan Jakarta 1951**
9. De Jong : **Militair Memorie (Boeton en Moena) 1919**
10. H.J. Van Den Berg; Kroeskamp, Dr. H; Simandjoentak, I.P.; **Dari Pangung Peristiwa Sejarah Dunia (I); J.B. Wolters, Groningen, Jakarta 1951**

11. Gyseb A.Chalik: **Perkembangan Masyarakat Tolaka di Kendari** (Naskah 1974)
12. Husen A.Chalik dkk **Monografi Propinsi Sulawesi Tenggara; Tim Survei Perencanaan Permuseuman Sulawesi Tenggara Tahun 1977/1978**
13. H.M.R. Amin Daud : **Almarhum Pahlawan Ranggong dg Romo; Yayasan Arca Pahlawan; Makassar 1971.**
14. John A. Pattikayhatu, Drs dkk : **Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Maluku; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1981/1982.**
15. Louis Cottschalk : **Mengerti Sejarah; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia; Jakarta 1975.**
16. Makmun Salin, Drs : **Ikhtisar Sejarah Perang Dunia II; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971.**
17. La Ode Zaenu : **Buton dalam Sejarah (I); Naskah 1975.**
18. M. Sanusi Dg Mattata : **Luwu dalam Revolusi Yayasan Pembangunan Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu; Makassar, Juni 1967.**
19. Muhammad Abdub, Drs. dkk : **Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme di Sulawesi Selatan; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1981/1982.**
20. Nugroho Notosusanto, Kol. Drs. : **Ikhtisar Sejarah RI (1945 - sekarang) Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971.**
21. Nugroho Notosusanto, Kol. Drs. : **Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971.**
22. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara : **Dokumenta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara; Tahun 1977.**
23. Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-

pinsi Sulawesi Tenggara: **Monografi Daerah Sulawesi Tenggara**; Kendari 1974.

24. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1980/1981 : **Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan. Suatu Kumpulan prasaran pada berbagai lokakarya.**
25. Sidi Gazalba, Drs. : **Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu**; Penerbit Bhratara Karya, Jakarta 1981.
26. Sartono Kartodirdjo dkk : **Sejarah Nasional Indonesia**, Jilid III, IV, V; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1976.
27. Sagimun, M.D. : **Sultan Hasanuddin menentang VOC** Proyek Biografi Pahlawan Nasional; Jakarta 1975.
28. Sutrasno : **Sejarah dan Ilmu Pengetahuan**; Pradnya Paramita Jakarta 1975.
29. Soeroto : **Indonesia di tengah-tengah Dunia dari abad ke abad (I)**; Penerbit Jambatan Jakarta 1954
30. Tanu Suherly, Drs. : **Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia**; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1971.

B. DAFTAR INFORMAN (BAB II).

1. Nama : La Ode Madu
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Dep. P dan K. (Bekas Kepala Seksi Kebudayaan Kandep P dan K Kabupaten Buton).
Alamat : Bau-Bau Buton.
2. Nama : La Pou
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Dep. P dan K
Alamat : Bau-Bau Buton.
3. Nama : La Ode Modi Ali
Umur : 80 tahun

- Pekerjaan : Tidak ada (Tokoh Masyarakat Sampolawa)
 Alamat : Sampolawa, Kabupaten Buton.
4. Nama : La Ode Biti
 Umur : 65 tahun
 Pekerjaan : Bekas Kepala Desa Laporo
 Alamat : Sampolawa, Kabupaten Buton.
5. Nama : La Patu
 Umur : 75 tahun
 Pekerjaan : Bekas pengawal Kraton Buton
 Alamat : Kraton Buton
6. Nama : Chaidir
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Penilik Kebudayaan
 Alamat : Bau-Bau Buton.
7. Nama : Hazirun
 Umur : 57 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Dep. P dan K.
 Alamat : Kompleks Kraton Buton.
8. Nama : La Mahandiri
 Umur : 76 tahun
 Pekerjaan : Purnawirawan ABRI (Angkatan Darat)
 Alamat : Kendari.

DAFTAR INFORMAN (BAB III)

1. Nama : S. Watukila
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan (Bekas Kepala Distrik Tongauna)
 Alamat : Desa Tongauna/Kecamatan Unaaha.
2. Nama : Batauga
 Umur : 66 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Tongauna/Kecamatan Unaaha.
3. Nama : Paeko
 Umur : 69 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Tongauna/Kecamatan Unaaha.
4. Nama : Husen A. Chalik, Ba.

Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Kepala Bidang PSK Kanwil Dep. P dan K
Propinsi Sulawesi Tenggara,
Alamat : Kendari.

DAFTAR INFORMAN (BAB IV)

1. Nama : Abdul Hamid Langkosono
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI (Angkatan Laut)
Ketua LVRI.
Alamat : R a h a.
2. Nama : Alifin Tjoa
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI (Angkatan Laut)
Sekretaris LVRI.
Alamat : R a h a.
3. Nama : La Kare
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Tani (Bekas pengurus Muhammadiyah
Raha)
Alamat : R a h a.
4. Nama : Abd. Wahe Daeng Mapease.
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : R a h a.
5. Nama : Tasi Alimin
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : R a h a.
6. Nama : La Ode Ibu
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Kasi Sarana Kebudayaan pada Bidang
Kesenian Kanwil Dep. P dan K Propinsi
Sulawesi Tenggara.
Alamat : Kendari.
7. Nama : La Sipala
Umur : 60 tahun

- Pekerjaan : Purnakaryawan Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara
 Alamat : Kendari.
8. Nama : B. Bhurhanuddin
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Kepala Bidang PMK, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tenggara
 Alamat : Kendari.

DAFTAR INFORMAN (BAB V)

1. Nama : Ch. Pingak
 Umur : 63 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Dep. P dan K/Anggota LVRI
 Alamat : Kolaka
2. Nama : Benyamin Guluh
 Umur : 58 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Dep. Kesehatan/Anggota LVR
 Alamat : Lamekongga.
3. Nama : Abd. Halik
 umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Polisi Praja/Anggota LVRI
 Alamat : Rate-Rate.
4. Nama : Tahrir
 Umur : 58 tahun
 Pekerjaan : Dagang/Anggota LVRI
 Alamat : Kolaka.
5. Nama : Kaleako
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Penilik SD
 Alamat : Wundulako.
6. Nama : Muh. Nur Latamoro
 Umur : 62 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Pamong Praja
 Alamat : Rate-Rate.
7. Nama : Laporamba alias dg. Mangngati.
 Umur : 99 tahun
 Pekerjaan : Tidak ada

- Alamat : La Osu.
8. Nama : Tungge
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SD.
Alamat : Kolaka – Kendari.
9. Nama : Pute.
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Penilik Pendidikan Masyarakat
Alamat : Wundulako.
10. Nama : Sunu
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan
Wundulako.
Alamat : Wundulako.
11. Nama : Gogoso
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Kolaka.
12. Nama : Muh. Ali SilondaE
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pamong Praja.
Alamat : Kendari.

SULAWESI TENGGARA
 Ukuran 1:300.000



KETERANGAN

- + + + + + Batas Propinsi
- — — — — Batas Kabupaten
- ▭ Ibukota Propinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Tempat pertemuan dan perundingan

LAUT FLORES

